

DR. Hi. Usman Moonti, M.Si.



**KOPERASI
&
PEREKONOMIAN
MASYARAKAT GORONTALO**

Sebuah Analisis Relasi dan Aksi



Kutipan Pasal 44 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KOPERASI DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT GORONTALO

SEBUAH ANALISIS RELASI DAN AKSI

Penyusun:

DR. Hi. Usman Moonti, M.Si.



INTERPENA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Moonti, Usman

Koperasi dan Perekonomian Masyarakat Gorontalo;
Sebuah Analisis Relasi dan Aksi / Usman Moonti ---- Yogyakarta: Interpena,
2014

X - 235 hlm, 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-602-1330-07-4

1. Ekonomi

1. Judul

KOPERASI DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT GORONTALO

SEBUAH ANALISIS RELASI DAN AKSI

Karya : DR. Hl. Usman Moonti, M.Si.

Tata Letak: M. Muallim

Design Sampul: Intermata Design

Penyelaras Akhir: Lazua

Tim Pra & Pasca Cetak: Abdurrahman al-Kendali,
Budiarto, Paryadi

Cetakan Pertama, Maret 2014

Penerbit:



INTERPENA Yogyakarta

Jl. Anggrek No. 74, Kradenan Rt. 10/ Rw. 69

Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

Telp. 0274-6800724, 0274-32600032

Hp. 0811-850-100, 0811-851-934

Email: interpena@gmail.com

ISBN: 978-602-1330-07-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun -termasuk memfoto copi- tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Sejak kemunculan lembaga koperasi di Inggris pada tahun 1844, koperasi telah menjalankan peranannya sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi liberal dan kapitalistik. Sistem yang dibangun koperasi, pada faktanya sangat sesuai dengan kultur dan budaya di Indonesia yang cenderung lebih senang bergotongroyong, mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, dan lebih suka bersama-sama dalam menghadapi keadaan sulit.

Meskipun demikian, lembaga ekonomi koperasi juga tidak terlepas dari berbagai permasalahannya, seperti terjadinya permasalahan kredit macet, tidak berjalannya lembaga koperasi sebagaimana yang seharusnya, dan masalah-masalah yang lainnya. Gerakan ekonomi rakyat juga menjadi bahan perdebatan yang hangat, karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan organisasinya. Secara kuantitatif, koperasi di Indonesia sampai tahun 2006 sudah mencapai 138.411 unit, dengan jumlah anggota 27.042.342 orang, manajer 29.207 orang, dan karyawan 278.441 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah koperasi aktif hanya sebanyak 43.703 unit atau hanya sekitar 31,5 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi memiliki derajat kompleksitas yang lebih tinggi dengan aspek kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan wilayah dibandingkan dengan organisasi ekonomi semata yang memengaruhi keunikan dan kerumitan tersendiri dalam pengelolaannya.

Perkembangan koperasi di Indonesia termasuk di Gorontalo pada kenyataannya lebih tertinggal jika dibandingkan dengan koperasi di berbagai negara industri maju yang menganut sistem ekonomi liberal dan kapitalis. hal ini menjadi ironi tersendiri, karena lembaga yang diharapkan menjadi *sokoguru* perekonomian,

dengan kultur yang sudah sesuai, masih cenderung jalan di tempat, dan tidak mau beranjak dari ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sementara organisasi koperasi di sejumlah negara baik di Eropa, Amerika, Canada, dan beberapa negara Asia lainnya mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi.

Peran dan keberadaan koperasi di Kota Gorontalo sangat penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Selama krisis ekonomi, koperasi berperan dalam pemberian pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, koperasi di Kota Gorontalo menunjukkan tingkat sebaran yang tidak merata, dan hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal, seperti SDM, organisasi dan kelembagaan, manajemen, modal, kegiatan usaha, keanggotaan, teknologi maupun faktor eksternal, seperti politik, informasi dan komunikasi, perekonomian, hukum dan sosial budaya.

Buku ini berisi jejak rekam perkembangan koperasi dari awal berdirinya sampai masa kini, teori-teori koperasi dari berbagai ahli, ragam bentuk koperasi di Indonesia serta perkembangannya di kota Gorontalo. Fokus pembahasan secara komprehensif dan mendetail, akan di pusatkan pada koperasi di kota Gorontalo, yang mencakup sejarah, sebaran, perkembangan, dan kemampuannya dalam menopang ekonomi kerakyatan di kota Gorontalo. Tentunya akan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan referensi, dan bahan data sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan koperasi kedepan di Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, kearah sistem ekonomi yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi, lebih bermanfaat dan lebih berperan positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Teori Sebaran Keruangan	6
B. Teori Pola Spasial Kota	7
C. Teori lokasi	8
D. Penataan Ruang	10
E. Teori Tempat Pusat	12

BAB II

SEJARAH TUMBUH KEMBANG KOPERASI	15
A. Memahami Makna Koperasi	15
B. Perkembangan Koperasi	22
1. Perkembangan Koperasi di Dunia	22
2. Perkembangan Koperasi di Indonesia	24
3. Jenis dan Macam-Macam Koperasi	30
4. Perangkat Organisasi Koperasi	36
5. Keanggotaan	41
6. Tumbuh Kembang Koperasi	43
7. Perkembangan Permodalan	51
8. Perkembangan Jumlah Sisa Hasil Usaha	52
9. Program-Program Penentu Perkembangan Koperasi	53
10. Program Kerjasama antar Koperasi dan Kemitraan Usaha	54
11. Program Penelitian dan Pengembangan Koperasi	55
12. Pembangunan Ekonomi Wilayah	55
C. Kontribusi Perkembangan Koperasi dalam Pembangunan Wilayah	61
D. Tingkat Perkembangan Koperasi	66
E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Koperasi	71

Daftar Isi

1. Faktor internal	73
2. Faktor eksternal	76
F. Prospek Perkembangan Koperasi terhadap Perekonomian Masyarakat	77

BAB III

REKAM JEJAK KOPERASI DI KOTA GORONTALO	83
A. Kondisi Geografis Kota Gorontalo.....	83
B. Penggunaan Lahan	86
C. Sarana dan Prasarana.....	87
1. Sarana	87
2. Perdagangan dan Jasa	88
3. Pendidikan	89
4. Peribadatan.....	90
D. Kependudukan dan Angkatan Kerja	91
1. Kependudukan.....	91
2. Angkatan Kerja	93
3. Sosial Ekonomi Masyarakat	96
E. Pendidikan	96
F. Pendapatan	97
G. Budaya Masyarakat	98
H. Kondisi Koperasi di Wilayah Kota Gorontalo	99
1. Koperasi Konsumsi	99
2. Koperasi Produksi	100
I. Klasifikasi Koperasi Berdasarkan Hasil Penilaian Disperindagkop Kota Gorontalo Tahun 2010	102

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN PERAN KOPERASI TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT	105
A. Deskripsi Karakteristik Responden	105
1. Umur Responden	105
2. Jumlah Anggota Rumah Tangga Berdasarkan Responden	107
3. Tingkat Pendidikan Responden	109
4. Pengetahuan Responden tentang Koperasi	112
5. Sebaran dan Perkembangan Koperasi	118
a. Koperasi Konsumsi	121

b. Koperasi Produksi Pertanian	124
c. Koperasi Produksi Jasa	126
d. Koperasi Perdagangan	127
B. Tingkat Perkembangan Koperasi	134
1. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jumlah Unit Usaha	134
2. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jumlah Permodalan	134
3. Aset Koperasi	141
4. Kontribusi Koperasi terhadap Perekonomian Masyarakat.....	155
5. Karakteristik Perkembangan Koperasi	167
6. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Koperasi.....	176
7. Peran Koperasi terhadap Perekonomian Masyarakat.....	180

BAB V

PROSPEK PERKEMBANGAN KOPERASI TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT	189
A. Prospek Perkembangan Koperasi dalam Rumah Tangga	189
1. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Pendidikan.....	191
2. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Pengetahuan	192
3. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Modal	193
4. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Penyediaan Sandang	194
5. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kepemimpinan	195
6. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Berorganisasi	196
7. Tingkat Perkembangan Koperasi dalam Prospek Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	197
8. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Rasa Keakraban	198
9. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Peluang Pekerjaan	199
10. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Menjual Produk	200
11. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kesejahteraan	201

B. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Perkembangan Wilayah.....	202
1. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Terhadap PAD	203
2. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kegiatan Produksi.....	204
3. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Peluang Kerja	205
4. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Produktivitas Kerja Anggota	206
5. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Pemasaran Produk	207
6. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Komoditas Unggulan	208
7. Tingkat Perkembangan Koperasi terhadap Prospek Multiplier Effect	209
8. Tingkat Perkembangan Koperasi terhadap Prospek Integritas Wilayah	210
9. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Pembangunan Fisik	210
C. Prospek Jenis Usaha Koperasi	213
D. Kemajuan Usaha Koperasi	215
E. Prospek Koperasi Berdasarkan Tempat/Lokasi Koperasi	217
DAFTAR PUSTAKA	219
INDEX.....	227
RIWAYAT PENULIS	229



BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga koperasi sejak awal telah diperkenalkan baik di negara-negara Eropa Barat sebagai tempat kelahirannya maupun di Indonesia. Hal ini diarahkan untuk mampu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang beruntung dalam sistem ekonomi pasar liberal. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan perekonomian kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan "*Rochdale Principles*" (Prinsip Rochdale). Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Perancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam (Masngudi, 1990).

Pada mulanya, Prinsip Rochdale memang banyak ditentukan oleh semangat kerja para pengurunya, yang benar-benar merasakan kepahitan hidup era revolusi industri di Inggris. Karena itu, rumusan prinsip Rochdale itu merupakan hasil dari proses pemikiran yang mendalam, matang oleh kepahitan zaman, teruji oleh kenyataan sejarah, dan didorong oleh semangat tinggi untuk mengangkat martabat manusia. Sejalan dengan perkembangan koperasi di bagian dunia lainnya, prinsip Rochdale itu dijadikan contoh dan pedoman oleh seluruh gerakan koperasi di dunia (Baswir, 2012). Tetapi, mereka mulai mengembangkan sayapnya dengan melakukan usaha-usaha produktif, dengan berpegang pada prinsip Rochdale yang mengembangkan usaha dan mampu mendirikan pabrik, menyediakan perumahan untuk para anggotanya, serta menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurus koperasi.

Prinsip di atas sejalan dengan asal kata koperasi, yaitu dari kata "*co*" dan "*operatie*" (bahasa Belanda) yang mempunyai arti bekerja bersama-sama atau bekerja sama atau kerja sama (Sudarsono dan Edilius, 1992). Dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa, "Koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi yang dimaksudkan Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 dalam kaitan dengan demokrasi ekonomi adalah bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Organisasi koperasi mempunyai tujuan dan memiliki sistem pengelolaan, tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar dalam melakukan kegiatannya.

Sendi-sendi dasar koperasi ini menurut Pandji dan Widiyanti (1997) berperan sebagai:

1. Pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuannya adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan. Bila tujuan ini dapat dicapai karena pedoman kerja yang menjadi sendi dasarnya, koperasi kemungkinan akan dapat bekerja tidak hanya sebagai organisasi ekonomi melainkan juga dapat menjadi suatu perkumpulan orang-orang yang meningkatkan kesejahteraannya;
2. Ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak di bidang ekonomi. Sendi dasar ini bukan saja mengatur koperasi ke dalam, melainkan juga mengatur hubungan koperasi dengan anggotanya, koperasi dengan organisasi atau perkumpulan-perkumpulan lain yang bukan koperasi.

Terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat bahwa koperasi memiliki peranan penting, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada anggota masyarakat yang memanfaatkan keberadaan koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat yang mempunyai nilai dan prinsip koperasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 di mana koperasi melaksanakan prinsip-prinsip berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi

lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Setelah lebih dari 46 tahun keberadaan koperasi di Indonesia (lahir 1967), lembaga koperasi diharapkan menjadi pilar atau *sokoguru* perekonomian nasional. Gerakan ekonomi rakyat sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan, karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan organisasinya. Secara kuantitatif, koperasi di Indonesia sampai tahun 2006 sudah mencapai 138.411 unit, dengan jumlah anggota 27.042.342 orang, manajer 29.207 orang, dan karyawan 278.441 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah koperasi aktif hanya sebanyak 43.703 unit atau hanya sekitar 31,5 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi memiliki derajat kompleksitas yang lebih tinggi dengan aspek kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan wilayah dibandingkan dengan organisasi ekonomi semata yang memengaruhi keunikan dan kerumitan tersendiri dalam pengelolaannya.

Fenomena empiris koperasi Indonesia termasuk di Gorontalo jika dibandingkan dengan praktek-praktek koperasi di berbagai negara industri maju yang menganut sistem ekonomi liberal dan kapitalis dinilai banyak kalangan masih jauh tertinggal, jalan di tempat, dan cenderung tidak mau beranjak dari ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sementara organisasi koperasi di sejumlah negara baik di Eropa, Amerika, Canada, dan beberapa negara Asia lainnya mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi (Kartasapoetra dkk, 2000).

Peran dan keberadaan koperasi di Kota Gorontalo sangat penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Selama krisis ekonomi, koperasi berperan dalam pemberian pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, koperasi di Kota Gorontalo menunjukkan tingkat sebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan, dan hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal, seperti SDM, organisasi dan

kelembagaan, manajemen, modal, kegiatan usaha, keanggotaan, teknologi maupun faktor eksternal, seperti politik, informasi dan komunikasi, perekonomian, hukum dan sosial budaya.

Perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di era globalisasi ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Gorontalo. Di lain pihak, hal ini akan memunculkan persaingan yang semakin terbuka. Namun, hal ini tentu harus diiringi dengan keunggulan kompetitif koperasi dalam mengembangkan usaha masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai anggota sehingga menghasilkan koperasi yang tumbuh dan berperan dalam perkembangan wilayah.

Dalam konteks perkembangan wilayah, peran koperasi tentu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat lokal. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, terbuka peluang bagi pemberdayaan koperasi secara lebih baik sehingga sebutan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat di daerah diharapkan benar-benar terwujud. Bila fungsi dan peran koperasi yang dicita-citakan pada satu sisi dan pemberdayaan koperasi melalui kebijakan otonomi daerah terlaksana dengan tepat pada sisi lainnya, hal ini tentu akan sinergis dengan masyarakat, di mana koperasi memberikan kontribusi besar dalam perkembangan wilayah, termasuk juga di Kota Gorontalo.

Di Kota Gorontalo ini, dapat dilihat berbagai program pemerintah dalam membangun swadaya perkoperasian dalam masyarakat, antara lain peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penciptaan iklim kondusif, bantuan langsung, dan perkreditan. Sebagai wujud nyata peran koperasi dalam pembangunan wilayah, indikator dan variabel harus terlihat jelas dan terukur sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan performa koperasi dalam perkembangan wilayah di Kota Gorontalo. Karena itulah, tentu menjadi sangat menarik jika melihat perkembangan tentang dunia perkoperasian di Kota Gorontalo ini, bagaimana tingkat dan pola persebarannya, apa yang memengaruhinya, dan bagaimana prospek perkembangannya. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan gambaran tentang pola penyebaran koperasi di Kota Gorontalo ini, mampu

memberikan analisis tentang berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan koperasi dan bagaimana prospeknya ke depan.

Agar bisa membahas sisi menarik buku ini, ada teori-teori yang bisa digunakan agar bisa menjadikan buku ini sebagai buku yang sah dalam khazanah keilmuan. Ada beberapa teori berkaitan dengan pola sebaran koperasi ini, seperti teori sebaran keruangan (Chapman, 1979), teori pola spasial kota yang menyebar secara sporadis dan perkembangan lokasi daerah pinggiran kota (Yunus, 1987). Teori lokasi (Tarigan, 2005) yang secara fisik dipengaruhi oleh kepadatan jumlah penduduk. Sedangkan teori penataan ruang (Muta'ali, 2011) juga bisa digunakan, yang memperhatikan faktor lingkungan walaupun daerahnya berada di pinggiran kota. Terakhir teori tempat pusat Christaller (Daldjoeni, 1997).

A. Teori Sebaran Keruangan

Teori sebaran keruangan (Chapman, 1979) mengemukakan bahwa aspek alam, sosial, ekonomi maupun budaya dalam geografi telah menjadi perhatian utama karena faktor tersebut dapat membentuk variasi spasial. Dalam analisis keruangan, unsur alam dan manusia berada dan berinteraksi secara dinamis menghasilkan berbagai kenampakan. Kenampakan tersebut merupakan refleksi dari pengambilan keputusan dalam memanfaatkan ruang dan hasil hubungan antara manusia yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dari distribusi aktivitas manusia. Sementara itu, keberulangan suatu kenampakan objek (dalam hal ini koperasi) di suatu lokasi disebut dengan distribusi keruangan (*spatial distribution*). Distribusi objek atau kenampakan yang mempunyai karakter sama di lokasi berbeda disebut pola keruangan. Dalam dimensi ini unsur yang terkait adalah lokasi, jarak dan arah.

Dalam memahami teori Chapman (1979), sebaran keruangan memberikan gambaran bahwa keberadaan koperasi pada setiap kecamatan di Kota Gorontalo sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan para anggota sebagai masyarakat yang memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tetap memperhatikan lokasi koperasi di mana koperasi tersebut berada. Sebaran koperasi pada setiap kecamatan di Kota Gorontalo menggambar-

kan sebaran yang tidak merata, tetapi masyarakat sebagai anggota sangat peduli terhadap keberadaan koperasi di tengah-tengah mereka dan menghendaki koperasi dapat dijangkau dengan mudah oleh para anggota dan masyarakat sehingga kebutuhan mereka mudah dapat terpenuhi melalui koperasi, walaupun mereka berada jauh dari pusat kota. Dengan demikian, keberadaan koperasi bagi anggota sangat berpengaruh terhadap kehidupan anggota dari tempat di mana anggota dengan mudah memenuhi kebutuhannya, termasuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat koperasi berada.

B. Teori Pola Spasial Kota

Teori pola spasial kota (Yunus, 1987) terbagi ke dalam tiga macam pola yaitu: 1) *ribbon development*, di mana perkembangan kota hanya terjadi di sepanjang jalur jalan darat ataupun sepanjang sungai, 2) *concentric development*, di mana daerah yang terbangun hampir merata di setiap kecamatan pada permukiman perkotaan yang telah ada, 3) *leaf-frog development*, di mana perkembangan kota menyebar di hampir semua kota dan penyebarannya secara sporadis. Pakar ini berpendapat bahwa pola spasial Kota Gorontalo merupakan gabungan antara pola kedua *concentric development* dan pola ketiga *leaf-frog development*. Karena pada daerah pusat kota dan sekitarnya, di mana polanya membentuk satu kesatuan yang kompak dan menyebar merata hampir di setiap wilayah kecamatan.

Untuk daerah yang berada pada pinggiran kota atau yang agak jauh dari pusat kota, pola spasial kota menyebar secara sporadis dan menempati areal-areal persawahan yang masih digunakan untuk pertanian. Areal yang menyebar secara sporadis ini lama-kelamaan akan membentuk satu kesatuan yang kompak bila tidak ada pengaturan oleh pemerintah daerah, sehingga lama-kelamaan areal persawahan yang ada akan berkurang bahkan bisa berubah seluruhnya menjadi areal permukiman. Daerah resapan air akan hilang dan ancaman bencana banjir akan semakin besar. Dengan situasi ini, mulailah berkurang daerah resapan airnya di setiap kecamatan di wilayah Kota Gorontalo pada setiap hujan

berlangsung sehingga terjadi genangan air yang menyebabkan areal genangannya semakin bertambah. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah, perkembangan Kota Gorontalo semakin tidak baik termasuk perkembangan koperasinya di kalangan masyarakat.

Pemahaman teori pola spasial Kota (Yunus, 1987), di mana dalam teori ini dikemukakan bahwa pola sebaran spasial menggambarkan keberadaan lokasi secara fisik, termasuk dalam hal ini sebaran koperasi di wilayah Kota Gorontalo. Bentuk sebaran koperasi didasarkan pada daerah yang sudah terbangun pada setiap wilayah kecamatan di Kota Gorontalo, di mana tempat koperasi itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena berdekatan dengan tempat domisilinya. Secara fisik, pola sebaran tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi koperasi di mana wadahnya itu menjadi tempat pelaksanaan jalannya organisasi yang dapat melayani kepentingan anggota dan masyarakat secara bersama. Di samping itu, kondisi masyarakat sekitar dapat memengaruhi tempat/lokasi yang menjadi pusat-pusat kegiatan yang menunjang keberhasilan koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasinya. Untuk itu, masyarakat menghendaki koperasi berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan mudah mereka memenuhi kebutuhan mereka melalui koperasi, walaupun mereka berada di daerah pinggiran kota. Pola persebaran koperasi di Kota Gorontalo membutuhkan penanganan yang baik dari pemerintah sehingga penyebarannya dapat merata pada setiap kecamatan sehingga anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi.

C. Teori lokasi

Menurut Tarigan (2005), teori lokasi adalah ruang, sehingga tanpa ruang tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi yang ada di atasnya maupun di bawahnya sepanjang manusia awam masih bisa menjangkaunya. Lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Namun dalam studi ruang, yang menjadi perhatian bukanlah

kemampuan kita untuk membuat daftar tentang posisi berbagai benda/kegiatan yang ada dalam suatu ruang wilayah melainkan analisis atas dampak/keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan lain pada lokasi lain. Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan (berjauhan).

Teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau yang menyelidiki lokasi geografis dari sumber-sumber yang langka serta hubungannya dengan pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dilaksanakan.

Dalam teori lokasi (Tarigan, 2005), posisi keberadaan ruang menjadi perhatian dalam membuat posisi ruang/lokasi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Lokasi tersebut dapat dijadikan berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah, yang menunjukkan pola dan susunan kegiatan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan usaha koperasi. Kondisi dan potensi setiap wilayah berbeda dampaknya menjadi lebih mudah dianalisis oleh manusia.

Dalam kondisi potensi ruang, diketahui bahwa salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan gangguan ketika manusia dalam bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga untuk mencapai lokasi yang satu dengan lokasi lainnya yang tentunya membutuhkan biaya. Selain itu, jarak dapat menciptakan keinginan para anggota untuk memenuhi kebutuhannya melalui koperasi di mana makin jauh jarak dari suatu lokasi, makin kurang diketahui potensi dan karakter yang terdapat pada

lokasi tersebut, sehingga makin menurun minat anggota untuk bepergian menuju tempat tersebut. Oleh karena itu, keberadaan koperasi harus memerhatikan kondisi masyarakat sebagai anggota dengan cara mendekatkan koperasi dengan anggota dengan harapan para anggota dengan mudah memenuhi kebutuhannya walaupun jauh pusat kota.

D. Penataan Ruang

Menurut Muta'ali (2011), penataan ruang adalah usaha manusia yang diwujudkan berupa struktur ruang yang menggambarkan ikatan manfaat ruang yang terpadu bagi sektor-sektor pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dalam membina hidup manusia beserta segalanya. Ikatan manfaat ruang yang terpadu meliputi pengaturan tata ruang, perencanaan fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pengaturan ruang memerlukan dimensi waktu untuk mengarahkan kegiatan manusia agar sesuai dengan keseimbangan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, bagaimana manusia mengatur kegiatannya dalam ruang baru, karena kemudian asumsi ini dilonggarkan secara bertahap sehingga ditemukan kondisi dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, kondisi dan potensi setiap wilayah berbeda dampaknya menjadi lebih mudah dianalisis, karena tingkah laku manusia, dalam kondisi potensi ruang sama, sudah diketahui salah satu unsur ruangnya adalah jarak. Jarak menciptakan gangguan ketika manusia bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Makin jauh jarak yang ditempuh, makin menurun minat orang untuk bepergian dengan asumsi faktor lain semuanya sama.

Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya di mana orang masih ingin mendatangi daerah pinggiran kota yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Perkembangan kota secara fisik dipengaruhi oleh kepadatan jumlah penduduk sehingga masyarakat cenderung melihat ketersediaan lahan yang sempit untuk membangun. Dengan memperhatikan faktor lingkungan yang berbeda mengharuskan terjadinya perubahan tertentu, walaupun daerahnya berada di pinggiran kota. Misalnya, perkembangan fisik kota yang dominan akan berkembang di daerah pinggiran kota sebagai daerah baru yang memiliki peluang untuk membuka usaha baru. Fenomena lainnya yang tampak adalah terjadinya pemanfaatan rumah tinggal sekaligus sebagai tempat usaha di sepanjang jalan di pusat kota, sehingga tampak di daerah pinggiran kota akan semakin maju.

Untuk memahami penataan ruang (Muta'ali, 2011), dalam kaitan dengan keberadaan koperasi, secara dinamis memiliki nilai strategis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam pembangunan koperasi yang dapat memengaruhi penataan ruang pada kawasan tersebut. Perubahan penataan ruang dalam satu wilayah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memerhatikan keadaan jarak antara yang satu dengan yang lainnya sehingga anggota dapat menjangkau tempat tersebut dengan biaya rendah. Penataan ruang di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh adanya aktivitas pembangunan perkantoran, perdagangan dan jasa yang letaknya cenderung tidak menyebar di wilayah kota, walaupun di sisi lain daerah pinggiran memiliki potensi untuk mengembangkan koperasi. Perkembangan daerah pinggiran kota ditandai dengan tumbuhnya kawasan permukiman baru dan semakin padatnya permukiman lama. Pertautan antara komunitas baru dan penduduk lokal tersebut menimbulkan pertanyaan menarik yang berdampak terhadap pembangunan permukiman baru di daerah pinggiran kota.

Teori-teori yang menyangkut pola lokasi ini telah berkembang sejak awal abad ke-19. Secara empiris dapat diamati bahwa pusat-pusat pengadaan dan pelayanan barang dan jasa umumnya di perkotaan (*central places*), terdapat tingkat penyediaan pelayanan yang berbeda-beda. Pelayanan masing-masing kota untuk tingkat yang berbeda bersifat tumpang-tindih, sedangkan untuk yang setingkat walaupun tumpang-tindih tetapi tidak begitu besar. Keadaan ini bersifat universal dan dicoba dijelaskan oleh beberapa ahli ekonomi Geograf antara lain seperti Christaller.

E. Teori Tempat Pusat

Christaller mengemukakan teori *central place* (teori tempat Pusat) (Daldjoeni, 1997). Teori ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: apakah yang menentukan banyaknya, besarnya, dan persebaran kota. Untuk menjawabnya, ia mengemukakan beberapa konsep, dua diantaranya adalah *range* (jangkauan) dan *threshold* (ambang). Ia membayangkan suatu wilayah (*region*) sebagai suatu daratan yang homogen secara geografis dengan penduduk yang merata persebarannya, penduduk tersebut membutuhkan berbagai barang dan jasa, seperti: makanan, minuman, pakaian, pelayanan dokter, media massa, dan sebagainya. Semua kebutuhan tadi memiliki dua hal yang khas: *pertama*, yang disebut *range*, yaitu jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. *Kedua*, *threshold*, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang. Barang dan jasa yang mempunyai batas permulaan besar dan ber-*range* besar disebut barang dan jasa tingkat tinggi. Sebaliknya, barang dan jasa tingkat rendah pada batas permulaannya kecil dan *range*-nya terbatas. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bahwa barang dan jasa tingkat tinggi terdapat di pusat kota yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

Dalam hubungan dengan persebaran dalam teori Christaller, yang menekankan pada persebaran koperasi di wilayah Kota Gorontalo yang pada saat ini kondisinya tidak menyebar secara merata pada setiap kecamatan, tetapi dari sisi keberadaannya

masyarakat sangat membutuhkan koperasi berada di kalangan mereka sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi mereka yang berada dipinggiran kota. Pola persebaran koperasi di wilayah Kota Gorontalo membutuhkan penanganan yang baik dari pemerintah sehingga penyebarannya dapat merata kepada masyarakat dan anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi. Keberadaan koperasi dilihat dari banyaknya, besarnya, dan persebarannya tetap memerhatikan transportasi yang digunakan untuk mendekatkan anggota dengan koperasi, sehingga anggota dengan mudah menjangkaunya guna memenuhi kebutuhannya melalui koperasi.

Merujuk pada pendapat Christaller, aktivitas anggota koperasi mengelompok di pusat kota, khususnya di Kota Gorontalo yang berada di Kota Selatan yang sebelumnya kota tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan serta jasa, sehingga menyebabkan saat ini keberadaan koperasinya terbanyak, yaitu 79 unit dengan rata-rata asetnya 36,75%, dengan jumlah penduduk 35.988 jiwa.



BAB II

SEJARAH TUMBUH KEMBANG KOPERASI

A. Memahami Makna Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa, "Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi." Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya dapat berstatus sebagai individu-individu untuk koperasi primer dan badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder.

Dari sisi usahanya, kegiatan usaha koperasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi yang berlaku. Selain itu, sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi tentu mendasarkan diri pada asas kekeluargaan, gotong royong dan tolong-menolong di antara sesama anggota. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi

dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju terciptanya cita-cita bersama koperasi. Gerakan koperasi di sini meliputi semua organisasi yang dibentuk dalam rangka untuk mendukung terwujudnya cita-cita bersama sehingga keterpaduan gerak di antara lembaga/organisasi koperasi dapat berjalan secara terpadu, dan hal ini mencakup definisi koperasi, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA, 2001)*, koperasi didefinisikan sebagai: (1) perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka dikendalikan secara demokratis; (2) koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, kejujuran, keadilan, dan kesetiakawanan; (3) dalam tradisi dari para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain; (4) prinsip-prinsip koperasi sebagai penjabaran nilai-nilai, meliputi: keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh anggota secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan kebebasan; pendidikan, pelatihan dan informasi; kerja sama antar koperasi; dan kepedulian terhadap komunitas.

Definisi di atas menekankan bahwa koperasi memiliki karakteristik sebagai perkumpulan otonomi dari orang-orang dan sejauh mungkin koperasi bebas dari pengaruh atau tekanan dari pemerintah dan perusahaan swasta. Sebagai perkumpulan otonomi orang-orang, koperasi memiliki kelebihan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, anggota koperasi primer adalah individu; anggota koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi (primer); sukarela berarti setiap orang bebas masuk keluar koperasi dalam batas tujuan-tujuan dan sumber daya koperasi. Memenuhi kebutuhan ekonomi bersama artinya koperasi diorganisasikan oleh anggota untuk kemanfaatan bagi diri anggota secara bersama-sama yang dioperasionalkan secara efisien dan hati-hati. Dengan dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis itu berarti pengendalian koperasi dibagi di antara anggota-anggota atas dasar prinsip-prinsip demokratis.

International Labor Organization (ILO) No. 127 Pasal 12 ayat (1) mendefinisikan koperasi sebagai suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai suatu tujuan bersama melalui suatu organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama mengontribusikan sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung risiko dari kegiatan tersebut, serta turut menikmati usaha bersama tersebut sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut. Setelah itu, orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung akan turut memanfaatkan organisasi tadi.

Dari definisi tersebut, dapat digarisbawahi bahwa anggota koperasi harus bersifat sukarela, tanpa ada paksaan oleh pihak lain, tidak membedakan ras, agama, budaya, dan latar belakang lainnya. Koperasi dibentuk secara sukarela dalam rangka mencapai tujuan bersama, dikelola secara demokratis, dimodali bersama dan risiko yang terjadi menjadi tanggungan bersama. Prinsip-prinsip ini memuat sejumlah nilai, norma, serta tujuan yang dapat dicapai oleh koperasi walaupun tidak harus sama yang ditemukan pada setiap koperasi.

Menurut Hanel (1989), untuk dapat disebut sebagai koperasi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (*cooperative group*).
2. Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (*self-help of the cooperative group*).
3. Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu koperasi yang dimiliki dan dibina secara bersama (*cooperative enterprise*).
4. Koperasi ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu dengan cara menyediakan/ menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para

anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam koperasi/ usaha dan/atau rumah tangganya masing-masing (*charge or principle of member promotion*).

Berkaitan dengan keempat karakteristik tersebut, lebih lanjut Hanel (1989) menjelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonom, yang dimiliki oleh para anggotanya dan ditugaskan untuk menunjang para anggotanya, sebagai rekanan/pelanggan dari koperasi, atau sebagai pekerja/karyawan dari koperasinya, seperti pada koperasi produksi. Penjelasan ini memberikan petunjuk bahwa dalam organisasi koperasi melekat secara utuh lima unsur yang esensial, yaitu: (1) anggota-anggota perorangan; (2) kegiatan ekonomi anggota secara individu, yang bersatu atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama; (3) kelompok koperasi, yang secara sadar bertekad melakukan usaha bersama dan saling membantu demi perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka; (4) koperasi-koperasi, yang didirikan secara permanen yang dimiliki dan dibina secara bersama, sehingga tercipta suatu hubungan yang baik; (5) pemilikan antara kelompok koperasi atau hubungan usaha yang saling menunjang antara kegiatan ekonomi anggota dengan koperasi secara individu.

Koperasi modern mendudukan peran anggota sebagai indikator penting dalam mendefinisikan koperasi secara universal dengan tidak dibatasi oleh visi politis maupun kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat di mana koperasi itu hidup. Kedua peran tersebut menjadi kriteria identitas (*identity criterion*) bagi koperasi. Peran atau identitas ganda (*dual identity*) koperasi menunjukkan bahwa yang melakukan kerja sama (*cooperation*) adalah anggotanya, baik pada saat mengelola maupun pada saat memanfaatkan hasil usaha koperasi. Peran unik dari anggota inilah yang dijadikan acuan dalam mengenali sistem koperasi di berbagai negara. Koperasi ini juga memiliki hubungan-hubungan di antara unsur organisasi koperasi, yaitu anggota-anggota perorangan, kegiatan ekonomi anggota, kelompok koperasi (Hanel, 1989).

Casselmann (dalam Hendrodjogi, 2004) berpendapat bahwa *cooperation is an economic system with social constant*, yang berarti koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung

unsur sosial. Jadi, menurut Casselman, koperasi itu mengandung unsur ekonomi dan sosial. Koperasi dilihat dari unsur ekonomi ditekankan pada cara kerjanya berdasarkan motif ekonomi, sedangkan dari unsur sosial lebih menekankan pada kedudukan anggota dalam koperasi (anggota sebagai pemilik, pelanggan, dan hubungannya sesama anggota).

Koperasi memiliki dua dimensi, yaitu sebagai sistem ekonomi yang dicita-citakan, dan sebagai badan usaha yang berguna untuk memperjuangkan kegiatan ekonomi anggota guna mencapai kesejahteraan. Soewardi (1986) mengemukakan bahwa koperasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek makro yang merupakan sistem ekonomi koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945, serta aspek mikro yaitu koperasi sebagai badan usaha. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Soedjono (1983) yang menyatakan:

Bagi Indonesia, koperasi mempunyai dua fungsi, yaitu (1) sebagai alat perjuangan untuk membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan koperasi sebagai *sokoguru*-nya; (2) sebagai wadah bagi alat anggota-anggotanya untuk memajukan dan memenuhi kepentingan mereka dalam upaya menyejahterakan para anggota.

Sedangkan menurut Roy (dalam Djahmat, 1997), "*the cooperative is defined as a business voluntarily organized operating at cost. Which is owned capitalized and control by member patrons, sharing risk and benefits proportional to their participation*". Menurut Roy koperasi didefinisikan sebagai usaha sekunder yang diorganisasi dan dibiayai oleh pemilik modal serta diawasi oleh anggota, serta menanggung risiko secara bersama dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan partisipasi anggota.

Menurut Wirasasmita (1992), masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah *masalah partisipasi*. Anggota koperasi yang aktif berpartisipasi selalu lebih sedikit dibandingkan anggota terdaftar dalam berbagai bentuk koperasi. Padahal, partisipasi anggota merupakan dasar untuk berkembangnya suatu koperasi secara sehat. Partisipasi anggota pada koperasi merupakan suatu hal yang sangat esensial, karena

tinggi rendahnya partisipasi anggota akan memengaruhi manfaat yang diperoleh para anggota baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan dari suatu koperasi.

Dalam kedudukannya sebagai pemilik, para anggota koperasi dapat: (a) memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk keuangan (penyertaan modal atau saham, pembentukan cadangan, simpanan) melalui usaha-usaha pribadinya; (b) ikut ambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan, dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya. Di samping itu, dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang keberhasilan koperasi.

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan koperasi adalah faktor internal seperti rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM), terutama kemampuan yang dimiliki pengurus dan manajer yang masih sangat terbatas, dan rendahnya pengetahuan anggota tentang rasa memiliki koperasi yang tecermin dari rendahnya partisipasi.

Sejalan dengan kinerja koperasi lainnya, bila dilihat dari segi citra, kemandirian, sumber daya manusia, manajemen, permodalan, cakupan dan skala usahanya, jika memang masih ada kelemahan seperti itu tentu koperasi tersebut belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Apalagi selama ini koperasi dipandang sebagai suatu badan usaha yang kecil dan terbatas, baik keanggotaan maupun kegiatan usahanya. Koperasi masih dianggap sebagai wadah golongan masyarakat ekonomi lemah dan kurang potensial untuk diajak bekerja sama oleh badan usaha lainnya (Wirasmita, 1992).

Dalam aspek sumber daya manusia, harus diakui adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para manajer koperasi tentang hakikat, ciri dan teknis dalam menjalankan organisasi koperasi sebagai suatu badan usaha. Di samping itu, personal atau individu yang diserahi tugas untuk mengelola koperasi masih belum memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan.

an kewirausahaan yang memadai, sehingga hal ini berdampak terhadap perkembangan koperasi. Apalagi jika ditambah dengan pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi yang kurang memadai dan rendahnya partisipasi anggota.

Dari berbagai pengertian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa suatu organisasi memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Organisasi terbentuk lebih dari dua orang yang tergabung di dalamnya.
- b. Organisasi memiliki tujuan yang diharapkan untuk dicapai.
- c. Organisasi relatif bersifat terus-menerus atau berjalan dalam jangka waktu yang lama.
- d. Organisasi merupakan suatu wadah yang terorganisasi. Artinya, suatu organisasi dikelola secara sistematis oleh orang-orang yang ditunjuk dan dipercaya untuk menjalankan aktivitas organisasi tersebut oleh para pembentuk atau anggotanya.

Berbagai definisi di atas juga menekankan bahwa koperasi memiliki karakteristik sebagai perkumpulan otonomi dari orang-orang, yang sejauh mungkin koperasi bebas dari pengaruh atau tekanan dari pemerintah dan perusahaan swasta. Sebagai perkumpulan otonomi orang-orang, koperasi memiliki kelebihan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setiap orang mempunyai hak untuk masuk/keluar dari keanggotaan koperasi, dan memenuhi kebutuhan secara bersama. Artinya, koperasi diorganisasi oleh pengurus untuk melayani kepentingan anggota secara bersama-sama yang dioperasionalkan secara efisien dan hati-hati serta dikendalikan secara demokratis guna mencapai kesejahteraan anggota secara bersama.

Jelaslah bahwa koperasi sebagai suatu lembaga atau wadah ekonomi yang bersifat sosial juga termasuk ke dalam pengertian bahwa tidak semua definisi mengenai koperasi yang dapat digunakan secara umum dapat berlaku di seluruh dunia. Karena masing-masing faktor pada setiap negara memberikan definisi yang selintas tampak berbeda satu sama lain. Untuk itu, dari pengertian di atas, UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja, dan menaati segala ketentuan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota.

B. Perkembangan Koperasi

1. Perkembangan Koperasi di Dunia

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (Barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di Barat, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembangnya koperasi di sana adalah dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi kemudian tumbuh sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang, koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pada saat ini, dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian sosialis di Eropa Timur serta terbukanya Afrika, gerakan koperasi di dunia telah mencapai suatu status yang menyatu di seluruh dunia. Pada tahun 1950-an, jangkauan pertukaran pengalaman gerakan koperasi dibatasi oleh blok politik/ekonomi, sehingga orang berbicara koperasi sering dengan pengertian berbeda. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional, namun dengan lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966, dasar pengembangan koperasi mulai digunakan dengan tekanan pada saat itu adalah untuk memanfaatkan model koperasi sebagai wahana promosi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum pekerja yang ketika itu kental dengan sebutan kaum buruh. Syarat yang ditekankan bagi keanggotaan koperasi adalah "Kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi". Dalam hal ini resolusi tersebut telah mendorong tumbuhnya program-program pengembangan koperasi yang lebih sistematis dan digalang secara internasional.

Pada akhir 1980-an, koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang terjadi di mana-mana, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992, kongres ICA di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi untuk dikembangkan. Bahkan Sven Akheberg menganjurkan agar koperasi mengikuti layaknya "*private enterprise*". Namun, perdebatan Tokyo tersebut melahirkan kesepakatan untuk mendalami kembali semangat koperasi dan mencari kekuatan gerakan koperasi serta kembali kepada sebab didirikannya koperasi. Sepuluh tahun kemudian, Presiden ICA, Roberto Barberini, menyatakan bahwa koperasi harus hidup dalam suasana untuk mendapatkan perlakuan yang sama "*equal treatment*" sehingga apa yang dapat dikerjakan oleh perusahaan lain juga harus terbuka bagi koperasi (ICA, 2002).

Pada tahun 1995, koperasi menyelenggarakan kongres koperasi di Manchester Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan dengan *International Cooperative Identity Statement* (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip

dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi. Patut dicatat bahwa kerisauan tentang globalisasi dan liberalisasi perdagangan di berbagai negara terjawab oleh gerakan koperasi dengan kembali pada jati diri, namun pengertian koperasi sebagai "enterprise" dicantumkan secara eksplisit. Dengan demikian, hal itu telah mengakhiri perdebatan apakah koperasi itu menjadi lembaga bisnis atau lembaga "quasi-sosial". Sejak saat itu, semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistem ekonomi yang semula tertutup kini menjadi terbuka.

Di kawasan Asia Pasifik, hal serupa juga terjadi, sehingga pada tahun 1990 diadakan konferensi pertama para menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang koperasi di Sydney, Australia. Pertemuan ini adalah kejadian kali pertama untuk menjembatani aspirasi gerakan koperasi yang dimotori oleh *ICA-Regional Office of The Asian dan Pacific* dengan pemerintah. Pertemuan ini telah melicinkan jalan bagi komunikasi dua arah dan menjadi pertemuan regional yang reguler setelah Konferensi ke-II di Jakarta pada tahun 1992. Pesan Jakarta yang terpenting adalah hubungan pemerintah dan gerakan koperasi terjadi karena kesamaan tujuan antara negara dan gerakan koperasi, namun harus diingat bahwa program bersama tidak harus mematikan inisiatif dan kemurnian koperasi. Pesan kedua adalah kerja sama antara koperasi dan swasta (secara khusus disebut penjualan saham kepada koperasi) boleh dilakukan sepanjang tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan nilai dasar koperasi.

2. Perkembangan Koperasi di Indonesia

a. Zaman Belanda

Sejarah koperasi di Indonesia, khususnya koperasi simpan pinjam, dimulai pada waktu penjajahan Belanda. Konsep koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang patih di Purwokerto dengan pendirian bank khusus untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh rentenir. Bank ini dinamakan Bank Penolongan dan Tabungan (Hudiyanto, 2002).

Pada 1915, terbitlah UU koperasi yang pertama, yaitu *Verordenin op de Cooperative Vereenigingen*. Namun, dengan

pelaksanaan UU ini, pemerintah Belanda memang tidak secara ikhlas dan tulus akan mengembangkan dan memajukan koperasi di Indonesia (Widiyanti dan Sunindhia, 2003). Namun demikian, bisa dilihat bahwa negara Indonesia masuk gerakan koperasi sebelum mencapai kemerdekaan.

b. Zaman Jepang

Pada zaman Jepang, gerakan koperasi di Indonesia berubah secara drastis. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003), koperasi yang ada di Indonesia pada waktu itu "dihancurkan sama sekali" oleh Jepang. Pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1942 yang antara lain menentukan bahwa untuk mendirikan perkumpulan dan mengadakan rapat-rapat harus minta ijin terlebih dulu pada residen. Padahal, koperasi menjadi alat pemerintahan militer Jepang untuk mengadakan pengumpulan dan distribusi barang-barang, berdasarkan ketentuan dan kebutuhan perangnya di pasifik (Hudiyanto, 2002). Oleh karena ini, koperasi Indonesia terpaksa harus dimulai lagi dengan deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945.

c. Zaman Awal Kemerdekaan

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003), ketentuan koperasi ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian, koperasi di Indonesia tentu berpijak dan bermula di awal kemerdekaan ini. Menurut pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas berikut:

- 1) demokrasi ekonomi
- 2) kekeluargaan
- 3) kebersamaan
- 4) individualisme ditolak
- 5) keadilan sosial

Selain UUD 1945, ada ragam undang-undang tentang perkoperasian yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, sehingga perkembangan koperasi mengalami percepatan

karena adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi (Kartasapoetra, dkk, 2000).

Pada 1939, jumlah koperasi yang ada di Indonesia adalah 574, sedangkan pada 1958, jumlah ini sudah mencapai 11.863 koperasi (Widiyanti dan Sunindhia, 2003). Koperasi tumbuh dengan keinginan masyarakat setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan. Koperasi yang didirikan termasuk koperasi pertanian, perikanan, unggas, konsumsi, dan juga koperasi desa. Akan tetapi, dengan fenomena liberalisme yang ada di Indonesia pada waktu menjelang zaman Orde Baru, gerakan koperasi ini tidak berjalan lancar oleh karena gerakan politik yang semakin lama semakin kuat.

Koperasi sendiri mendeklarasikan gerakannya sejak 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Dengan demikian, gerakan koperasi di tanah air kita lebih unik, karena koperasi yang pernah lahir dan tumbuh alami di zaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbarui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Dasar penjelasan itulah yang kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat pola pengembangan koperasi. Namun, antara tahun 1959 sampai 1965, banyak penyalahgunaan oleh pengelola koperasi di Indonesia (Widiyanti dan Sunindhia, 2003: 102). Karena itulah, koperasi Indonesia semakin lama semakin kehilangan sifatnya sebagai koperasi yang sebenarnya, karena bisa dikatakan bahwa koperasi dijadikan alat distribusi dan propaganda politik.

d. Zaman Orde Baru

Di bawah pemerintahan Presiden Suharto, koperasi Indonesia mengalami pembersihan untuk mengembalikan fungsi yang hakiki dari gerakan koperasi Indonesia, agar dapat berjalan sesuai dengan pasal 33 UUD tahun 1945. Jadi, dirumuskanlah kebijaksanaan baru terhadap perkoperasian Indonesia, dan ini diwujudkan dalam PELITA I tahun 1969-

1973. Pertumbuhan koperasi dan anggotanya bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Pertumbuhan Koperasi dan Anggota Tahun 1969-1973

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1969	13 349	2 723 056
1970	16 263	2 931 340
1971	16 755	2 750 193
1972	18 054	2 791 076
1973	18 850	2 921 750

Sumber: Widiyanti & Sunindhia, 2003.

Sejak Orde Baru, gerakan koperasi di Indonesia makin lama makin besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya koperasi baru yang didirikan di seluruh daerah di Indonesia.

Secara khusus, pemerintah memerankan fungsi "*regulatory*" and "*development*" sekaligus (Shankar, 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu: (a) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (b) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (c) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya, prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.

Selama ini, "koperasi" dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh, sebagian besar KUD berfungsi sebagai koperasi program di sektor pertanian yang didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD.

Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian dalam rangka swasembada beras yang menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi.

Koperasi secara eksplisit ditugaskan untuk melanjutkan program yang kurang berhasil yang ditangani langsung oleh pemerintah melalui bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Akibatnya, koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswada-ya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media massa. Dalam pandangan pengamatan internasional, Indonesia masih mengikuti lazimnya pemerintahan di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti di sektor pertanian (Sharma, 1992).

Sejarah kelahiran koperasi di dunia yang melahirkan model-model keberhasilan umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti yang terjadi di Perancis dan Belanda, serta produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika maupun di Eropa yang sudah cukup maju. Namun, ketika koperasi-koperasi tersebut mencapai kemajuan dapat dijelaskan bahwa pendapatan anggota yang digambarkan oleh masyarakat pada umumnya telah melewati garis kemiskinan. Contoh pada saat Revolusi Industri, pendapatan anggota di Inggris sudah berada pada sekitar US\$ 500, atau di Denmark pada saat revolusi pendidikan dimulai pendapatan per kapitanya berada pada kisaran US\$ 350. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan belanja rumah tangga, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen, karena hal itu mampu menunjang kelayakan bisnis perusahaan koperasi. Pada akhirnya penjumlahan keseluruhan transaksi para anggota harus menghasilkan suatu volume penjualan yang mampu mendapatkan penerimaan koperasi yang layak, di mana hal ini ditentukan oleh rata-rata tingkat pendapatan atau skala kegiatan ekonomi anggota.

Selain sebagai organisasi ekonomi, koperasi juga merupakan organisasi pendidikan dan awalnya ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh anggota koperasi. Oleh karena itu, kemajuan koperasi juga didasari oleh tingkat perkembangan pendidikan dari masyarakat.

Secara historis, pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakkan melalui dukungan program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, tidak akan mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap *marketing* program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha, terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pertanian terutama pangan, di samping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha dalam mengembangkan koperasi serta mengikuti latihan untuk mengurus dan mengelola koperasi.

Jika melihat posisi koperasi saat ini, sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 yang lalu, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah, hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI unit desa yang sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dalam hal ini, pemerintah cukup gencar dalam mengembangkannya pertumbuhan kemandirian koperasi, namun hal ini hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer

sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektifnya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini di masa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah arah ini hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom.

Implementasi undang-undang otonomi daerah akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumberdaya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun, koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena asas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peran advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah pun akan semakin penting. Dengan demikian, peran pemerintah di tingkat provinsi yang disertai tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat kabupaten/kota sebagai daerah otonom menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Di samping itu, juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar, sementara sistem perbankan yang sentralistik mendorong pengawasan modal.

3. Jenis dan Macam-Macam Koperasi

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Guna memahami koperasi sebagai *sokoguru* perekonomian bangsa Indonesia,

berikut dijelaskan mengenai pemahaman konsep koperasi berdasarkan jati diri koperasi yang meliputi, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, pengertian, nilai-nilai, prinsip, dan karakteristik koperasi.

Jenis koperasi berdasarkan fungsi, menurut Pandji dan Widiyanti (1998: 19) dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu:

- a. *Koperasi konsumsi*. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Koperasi konsumsi menyalurkan barang-barang yang bermanfaat bagi anggota dan selalu mempertimbangkan bahwa anggota tidak boleh dipaksa untuk membeli barang-barang tersebut sehingga kebutuhan anggota terpenuhi sesuai keinginan sendiri.
- b. *Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam*. Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dengan ongkos/biaya yang ringan. Tetapi untuk dapat memberikan pinjaman, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari simpanan yang terkumpul itu dipinjamkan kepada anggota yang perlu dibantu.
- c. *Koperasi produksi*. Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang sebagai anggota koperasi. Anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang, semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli.
- d. *Koperasi jasa*, yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia dan Koperasi Perumahan Nasional (KOPERNAS), koperasi yang mengurus dokumen-dokumen seperti

SIM, STNK, paspor, sertifikat tanah dan lain-lain.

- e. *Koperasi Serba Usaha*, yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan para anggota. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-macam jenis usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat tingkat risiko yang lebih tinggi dan sangat terbatas tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri.

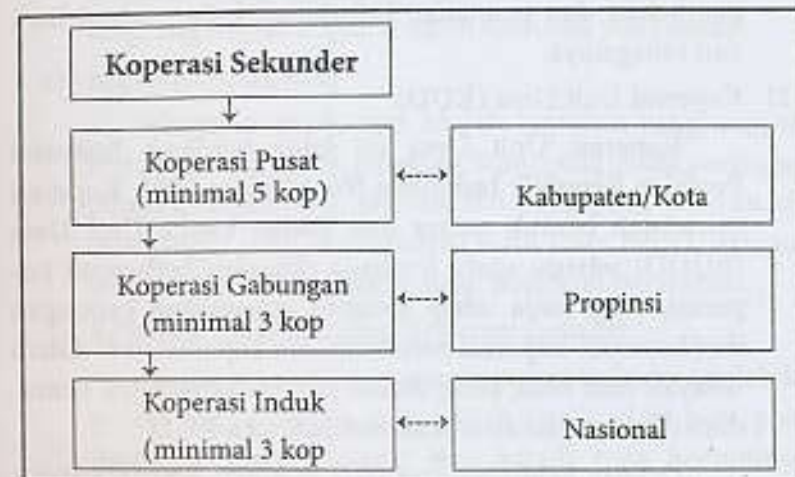
Menurut Pandji dan Widiyanti (1998: 37), jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Koperasi Primer*, yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggota tersebut. Contoh, KUD di desa-desa dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan menaati segala ketentuan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota. Dengan demikian, usaha meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri. Sesungguhnya peran dan tugas koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan anggotanya.
- b. *Koperasi Sekunder*, yaitu koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan hukum koperasi dan kesamaan kepentingan ekonomis. Mereka bergabung untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:
- 1) koperasi pusat, yaitu koperasi yang anggotanya paling sedikit 5 koperasi primer;
 - 2) gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat;

- 3) induk koperasi, yaitu koperasi yang minimal anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

Bagan koperasi sekunder dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Koperasi Sekunder



Sumber: Anoraga Pandji, Ninik Widiyanti (1998: 92)

Menurut Pandji dan Widiyanti (1998), jenis koperasi jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan adalah seperti berikut ini:

- a. Berdasar pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut:
- 1) Koperasi Konsumsi;
 - 2) Koperasi Kredit;
 - 3) Koperasi Produksi.
- b. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:
- 1) Koperasi Desa

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan ter-

tentu. Untuk satu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu koperasi desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat *single purpose*, tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat *multi-purpose* (serba usaha) untuk mencukupi segala kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu. Misalnya, usaha pembelian alat-alat pertanian, usaha pembelian dan penyaluran pupuk, usaha pembelian dan penjualan kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagainya.

2) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa ini lahir berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973. Koperasi ini adalah bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD.

Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, KUD bukan lagi bentuk antara dari BUUD, tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

3) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

4) Koperasi Pertanian (Koperta)

Koperta adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau

buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

5) Koperasi Peternakan

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan, dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan.

6) Koperasi Perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

7) Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri

Koperasi kerajinan atau koperasi industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

8) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam. Pendekatan menurut golongan fungsional, dikenal jenis koperasi, misalnya Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Angkatan Darat (KOPAD), Koperasi Angkatan Laut (KOPAL), Koperasi Angkatan Udara (KOPAU), Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK), Koperasi Pensiunan Angkatan Darat, Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, dan lain-lainnya. Sedangkan pendekatan dari sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, dikenal jenis-jenis koperasi seperti Koperasi Batik, Bank Koperasi, Koperasi Asuransi, dan sebagainya.

Tujuan utama koperasi pada dasarnya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggotanya. Pada dasarnya, koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi didirikan dan diperuntukkan secara bersama untuk kepentingan anggota dari koperasi itu sendiri.

Keragaman jenis koperasi yang tengah berkembang sekarang ini tidak mudah dibagi dalam jenis yang baku, sebagaimana dikatakan dalam undang-undang. Namun demikian, hampir tidak mungkin membagi koperasi ke dalam jenis tertentu yang bersifat baku, karena undang-undang memberikan peluang untuk secara luwes memilih dan menentukan jenis usahanya sendiri sesuai kebutuhannya.

4. Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 31 bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengawas dan pengurus sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam UU No 17 Tahun 2012 pasal 33 Rapat Anggota berwenang:
 - 1) Menetapkan kebijakan umum koperasi.
 - 2) Mengubah Anggaran Dasar.
 - 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
 - 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi.
 - 5) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi.
 - 6) Memintaketerangan dan pengesahan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
 - 7) Menetapkan pembagian selisih hasil usaha.
 - 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.

- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 - 10) Rapat Anggota Luar Biasa. Selain rapat anggota, sebagaimana dimaksud di atas, koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang tata caranya diatur dalam Anggaran Dasar.
- b. Pengawas, menurut UU No 17 Tahun 2012 pasal 48 sebagai berikut:
 - 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota
 - 2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengawas meliputi:
 - a) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris/direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan pailit.
 - b) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
 - 3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.
 - c. Pengurus, menurut UU No 17 Tahun 2012 pasal 55 sebagai berikut:
 - 1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota.
 - 2) Orang perseorangan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mampu melaksanakan perbuatan hukum
 - b) Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi
 - c) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi jatuh pailit.

- d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi.
- 3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Menurut Leon Garoyan dan Paul O. Mohn (dalam Sukamdiyo, 1996: 124), sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, setiap anggota harus mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu:

- a. Menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota.
- b. Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas.
- c. Mengesahkan serta memberhentikan pengurus dan pengawas.
- d. Mengesahkan perubahan anggaran dan investasi yang penting.
- e. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan.
- f. Membantu permodalan koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- g. Membayar simpanan-simpanan yang menjadi kewajibannya.
- h. Melakukan transaksi dan aktif dalam kegiatan koperasi.
- i. Memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan kerja pengurus
- j. Mengikuti dan mendorong perkembangan koperasi.

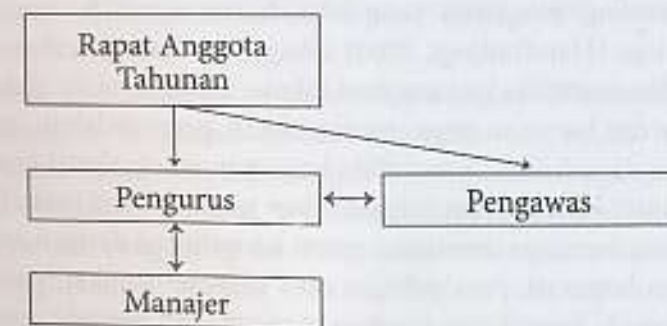
Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan. Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru berlalu dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Selain laporan keuangan tersebut juga perlu diuraikan tentang keadaan dan usaha koperasi serta usaha yang dapat dicapai dalam periode bersangkutan. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan R/L tahunan yang merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Koperasi mengenal adanya alat-alat perlengkapan organisasi, yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pengawas.

Dalam proses manajemen ini, rapat anggota melaksanakan fungsi perencanaan dengan membuat rencana kerja yang disiapkan oleh pengurus. Pengurus mengerjakan apa yang telah diputuskan dalam rapat anggota dengan melaksanakan fungsi pengorganisasian dan pengarahan atau menggerakkan pelaksanaan. Sedangkan badan pengawas melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan rencana untuk dan atas nama para anggota koperasi.

Bila ditinjau dari jumlah barang dan uang yang dikelolanya, koperasi di Indonesia itu bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu skala kecil, sedang, dan ada pula yang besar kegiatan usahanya. Koperasi yang masih kecil banyak yang tidak menggunakan manajer, tetapi koperasi yang usahanya sedang dan besar yang bisa dilihat dari perputaran modal, banyak yang menggunakan manajer sebagai pelaksana kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan (Pandi dan Widyanti, 1998). Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Perangkat Organisasi Koperasi



Semua unsur tersebut, baik anggota, pengurus, pengawas, maupun manajer merupakan tim organisasi koperasi, dengan kelompok inti organisasi koperasi adalah anggota, pengurus, dan pengawas. Anggota dan pengurus sebagai sumber daya manusia inti dalam organisasi koperasi memiliki tugas mengembangkan kerjasama *internal* dan *eksternal* dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lain seoptimal mungkin sehingga terjalin satu kesatuan sistem manajemen dalam mencapai tujuan organisasi koperasi.

Unsur-unsur dalam perangkat organisasi koperasi mempunyai tujuan rangkap, yaitu memenuhi kebutuhan anggotanya dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota secara umum. Koperasi sebagai gerakan ekonomi tidak bisa luput dari pengaruh lingkungan seperti lingkungan konsumen, situasi persaingan, dan perubahan harga-harga, di mana koperasi harus menghayati lingkungan dengan mengidentifikasi keberadaan pasar, tanggapan anggota terhadap usaha koperasi, dan keinginan anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka sehingga koperasi dapat berhasil dengan baik (Pandji dan Widiyanti, 1998).

Kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan dalam suatu koperasi ditentukan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan hikmah kebijakan permusyawaratan, di mana setiap anggota dengan tidak memandang umur dan besarnya simpanan pada koperasi mempunyai suara yang sama di dalam keanggotaan. Pengurus dalam hal ini hanyalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Seorang pengurus yang baik harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (Hendradjogi, 2004) sebagai berikut: (1) cakap (*intelligent*) dan memiliki kemampuan teknis (*technical skill*), dalam arti bahwa dia harus mampu memecahkan permasalahan sumber-sumber daya fisik; (2) memiliki kemampuan eksekutif (*executive skill*), yaitu kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti komunikasi dengan anggota-anggota koperasi, para pekerja, atau manajer tingkat bawah dan pesaing; (3) kreatif dan mampu menciptakan metode atau cara-cara baru dalam pekerjaan, sehingga membuatnya lebih efisien; (4) mempunyai kepemimpinan (*leadership*), sehingga dipatuhi oleh bawahan; (5) memiliki kemampuan organisasi (*organizational skill*), sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional usaha; (6) mampu mengambil keputusan tanpa ragu-ragu; (7) harus mampu memisah-misahkan mana yang benar dan mana yang salah; (8) harus fleksibel; (9) dapat bekerja sama dengan orang lain; dan (10) harus memadukan perbedaan-per-

bedaan pandangan dari bawahan, menganalisis dan akhirnya menemukan kompromi di antara pandangan-pandangan yang berbeda itu.

5. Keanggotaan

Berdasarkan pengertian koperasi yang dikemukakan oleh ICA sebelumnya, maka: "Anggota koperasi adalah orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis".

Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, di pihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik yang berkewajiban memberikan kontribusi pada organisasinya. Di pihak yang lain, anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Dengan kedua fungsi tersebut, anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan, dan hak serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, kedudukan anggota dapat diuraikan menjadi:

- a. pemilik dan sekaligus pemakai, dan mengambil kesepakatan berdasarkan kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen, produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunal;
- b. keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara yang memenuhi persyaratan spesifikasi koperasinya;
- c. keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya;
- d. memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya;
- e. memiliki keyakinan bahwa hanya dengan bergabung bersama-sama kepentingan ekonomi dan sosialnya secara bersama-sama akan dapat diselesaikan;
- f. memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.

Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran rasional dari orang-orang yang: (a) merasa cocok bila mereka melakukan kegiatan tolong-menolong khususnya dalam bidang ekonomi, (b) merasa kuat bila mereka bersatu menjadi anggota koperasi, dan (c) merasa tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya.

Status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik mereka harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang perkoperasian yang ada. Sedangkan sebagai pengguna mereka harus secara sadar dan rasional menggunakan dengan maksimal pelayanan yang diselenggarakan oleh koperasi. Apabila koperasi belum mampu memberikan pelayanan yang baik, anggota harus berusaha untuk memampukannya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa keanggotaan koperasi merupakan basis bagi perkembangan, pemantapan, maupun kelanjutan hidup usaha koperasi. Sebagai konsekuensinya, keanggotaan koperasi haruslah terdiri dari orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan kualitas tertentu dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Kualitas keanggotaan tersebut selanjutnya akan sangat berpengaruh pada organisasi, manajemen, dan usaha koperasinya. Pengaruh tersebut tecermin pada profil koperasi dari yang masih sederhana sampai pada koperasi yang sudah maju.

Adapun persyaratan kualitas bagi anggota koperasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memiliki jiwa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan serta rasa harga diri.
- b. Anggota itu tidak lagi berada pada tingkat kehidupan subsistem dan mempunyai potensi ekonomi.
- c. Mampu memberikan kontribusi finansial kepada organisasinya.
- d. Mampu mengambil keputusan secara bebas (tidak terikat) terhadap kebutuhan ekonomis yang diperlukannya.

Persyaratan kualitas di atas adalah suatu kondisi anggota yang ideal di mana dalam kenyataannya di Indonesia sebagian besar masyarakat kita belum memenuhi kualitas tersebut. Oleh

karena itu, tugas utama koperasi Indonesia sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional adalah membawa masyarakat tersebut mengembangkan secara maksimal potensi dan kemampuan masing-masing untuk berfungsi sebagai pelaku ekonomi melalui proses pendidikan dan pembinaan sehingga minimal bisa memenuhi persyaratan kualitas keanggotaan tersebut. Tugas tersebut adalah satu pencerminan watak sosial koperasi yang menempatkan anggota bukan saja sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek.

Dalam hubungan dengan hal di atas, dalam perkembangannya, kualitas anggota koperasi dapat diklasifikasikan sebagai calon mitra dan anggota penuh. Calon anggota adalah mereka yang sekadar memerlukan pelayanan dan hanya memiliki keterlibatan dan kemampuan yang terbatas. Selanjutnya calon anggota tersebut bisa berkembang menjadi lebih mantap untuk mencapai posisi mitra. Pada posisi demikian, mereka telah sadar untuk melibatkan dirinya lebih aktif karena merasakan manfaat dari koperasinya. Dari tingkat mitra seperti itu, para calon anggota kemudian dibina lebih lanjut, sehingga dapat menjadi anggota penuh. Pada status posisi terakhir ini, mereka telah menunjukkan keterlibatan serta tingkat kemampuan usaha yang lebih tinggi dan bersedia ikut menanggung risiko serta menunjukkan loyalitas terhadap koperasinya sebagai badan usaha.

6. Tumbuh Kembang Koperasi

Penyebarluasan koperasi modern dan gerakan koperasi di Eropa sering kali dikatakan sebagai suatu "proses perkembangan yang cepat", yang juga dipengaruhi oleh ideologi para pelakunya. Perkembangan koperasi pada akhir abad ke-19, yaitu satu sampai dua generasi setelah perintisan koperasi pertama yang berhasil, struktur kelembagaan koperasi tingkat primer dan sekunder baru terbentuk di negara-negara Eropa ketika itu. Selama itu, berbagai kekecewaan dan kegagalan harus dialami dan berbagai tindakan harus diambil untuk mengatasinya dan memperbaiki keadaan yang memungkinkan koperasi bisa berkembang di masa berikutnya (Widiyanti dan Sunindhia, 2002). Dalam hubungan ini, perlu

dikemukakan mengenai pembentukan lembaga-lembaga usaha koperasi tingkat sekunder dan federasi koperasi penyediaan pelayanan *auditing* dan pemberian nasihat/bimbingan, pembuatan undang-undang koperasi dan juga pemberian bantuan-bantuan pemerintah.

Selama abad ke-20, koperasi-koperasi 'modern' terus berkembang dengan baik di hampir semua negara industri. Mereka juga diprakarsai dan didirikan di banyak negara berkembang. Karena itu, berbagai bentuk dan tipe organisasi koperasi tumbuh dan berkembang di hampir seluruh negara di dunia.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2002), tahap-tahap perkembangan koperasi modern di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

Tahap *pertama*, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama para imigran dari Eropa yang mendirikan koperasi-koperasi pertanian seperti di Argentina dan Brasil bagian selatan, dan juga di Transvaal dan Rhodesia. Di India, pemerintah kolonial Inggris mendorong pembentukan koperasi-koperasi kredit atas dasar ketentuan undang-undang yang berasal dari undang-undang koperasi Inggris dan sesuai dengan suatu strategi, yang dipadukan dengan unsur-unsur konsepsi awal Koperasi *Raiffeisen* yang dikembangkan di Jerman.

Tahap *kedua*, selama periode antara kedua perang dunia, pemerintah kolonial Inggris di Afrika mendorong pembentukan organisasi-organisasi koperasi modern atas dasar pola pengembangan koperasi Inggris-India, yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan, dan juga dianggap sebagai suatu model usaha pengembangan koperasi di beberapa negara Asia. Selanjutnya di bekas daerah jajahan Prancis di Afrika, penguasa kolonial mendirikan organisasi-organisasi koperasi, yang disesuaikan dengan berbagai bentuk *'societe de prevoyance'* yang berbeda-beda dalam pemanfaatannya sebagai sarana administratif untuk berbagai kepentingan. Berbagai prakarsa untuk mengembangkan koperasi-koperasi pertanian telah dilakukan pula di beberapa daerah jajahan/negara di Asia dan Amerika Selatan selama perio-

de ini (misalnya: di Iran, Indonesia, Korea, Muang Thai, Chili, Meksiko). Pemerintah kolonial sering kali menghindari perkembangan koperasi-koperasi modern yang diprakarsai oleh penduduk setempat, kecuali di daerah-daerah di mana tinggal para petani Eropa yang membentuk koperasi di kalangannya sendiri; dan juga di daerah-daerah di mana terdapat hubungan antara koperasi dan pergerakan kemerdekaan (misalnya di Indonesia).

Tahap *ketiga*, penyebaran koperasi-koperasi pertanian selanjutnya berlangsung selama periode dari tahun 1945 sampai awal dasawarsa pembangunan PBB I. Konferensi Pangan dan Pertanian Internasional tahun 1943 di Hot Springs Virginia, USA (*resolution XVII*) menekankan pentingnya organisasi (swadaya) koperasi. Untuk mendorong pertumbuhan koperasi, berbagai kegiatan pemerintah telah dilakukan pula selama tahap ini. Kegiatan-kegiatan ini telah dilaksanakan oleh penguasa kolonial Inggris dan Perancis di Afrika, pemerintah-pemerintah negara-negara Asia, terutama setelah proklamasi kemerdekaan (seperti di India dan Indonesia), dan juga oleh beberapa negara di Amerika Selatan.

Tahap *keempat*, selama dasawarsa pembangunan PBB I (1960-1970) penyebaran dan penambahan jumlah koperasi modern terjadi di banyak negara berkembang. Pemerintah dari negara-negara di Afrika yang baru merdeka dan juga di Asia dan Amerika Selatan mulai mendorong pembentukan koperasi dengan bantuan bilateral dan internasional dan memanfaatkannya sebagai sarana pembangunan pertanian. Sejumlah kesimpulan dan rekomendasi telah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi internasional mengenai peranan penting yang dapat dimainkan oleh koperasi dalam pembangunan sosial-ekonomi, dan mengusulkan kepada pemerintah untuk mendorong perintisan dan pengembangan organisasi-organisasi swadaya, seperti Resolusi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1966 (*Recommendation No. 127*); Resolusi Rapat Umum PBB 2459 (XXIV) tahun 1968; Resolusi 1413, 1969, Dewan Sosial dan Ekonomi PBB.

Harapan yang muluk-muluk atas berbagai dampak terhadap pembangunan yang ditimbulkan oleh organisasi-organisasi

down harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach* (Sitio dan Tamba, 2001). Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi dari anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal tersebut dapat dikembangkan, diharapkan koperasi benar-benar mengakar dari bawah sehingga akan tercipta koperasi yang tumbuh, dan berkembang di kalangan masyarakat.

Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya, jika tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggota dan masyarakat.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di negara berkembang (Sitio dan Tamba, 2001) adalah:

- a. Koperasi sering kali hanya dianggap sebagai organisasi swadaya yang otonom partisipatif dan demokratis dari rakyat kecil (kelas bawah) seperti petani, pengrajin, pedagang dan pekerja/buruh.
- b. Di samping itu, ada berbagai pendapat yang berbeda dan diskusi-diskusi mengenai keberhasilan dan kegagalan serta dampak koperasi terhadap proses pembangunan ekonomi sosial di negara-negara dunia ketiga (sedang berkembang), dan inilah yang menjadi alasan yang mendesak untuk mengadakan perbaikan tatacara evaluasi atas organisasi-organisasi swadaya koperasi.
- c. Kriteria (tolok ukur) yang dipergunakan untuk mengevaluasi koperasi seperti perkembangan anggota dan hasil penjualan koperasi kepada anggota, pangsa pasar penjualan koperasi, modal penyertaan para anggota, cadangan, SHU, dan sebagainya, telah dan masih sering digunakan sebagai indikator mengenai efisiensi koperasi.

Kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan dan program yang mensponsori pengembangan koperasi, yaitu :

- a. Untuk membangkitkan motivasi para petani agar menjadi anggota koperasi desa, ditumbuhkan harapan-harapan yang tidak realistis pada kerjasama dalam koperasi, dan bagi anggota diberikan janji-janji mengenai perlakuan istimewa melalui pemberian bantuan pemerintah.
- b. Selama proses pembentukan koperasi, persyaratan dan kriteria yang mendasari pembentukan kelompok-kelompok koperasi yang kuat, efisien, dan perusahaan koperasi yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara otonom, tidak mendapat pertimbangan yang cukup.
- c. Karena alasan-alasan administratif, kegiatan pemerintah sering kali dipusatkan pada pembentukan perusahaan koperasi, dan mengabaikan penyuluhan, pendidikan, dan latihan para anggota, pengurus, dan manajer yang dinamis, dan terutama mengabaikan pula strategi-strategi yang mendukung perkembangan sendiri atas dasar keikutsertaan anggota koperasi.
- d. Koperasi telah dibebani dengan tugas-tugas untuk menyediakan berbagai jenis bagi para anggotanya (misalnya kredit), sekalipun langkah-langkah yang diperlukan dan bersifat melengkapi belum dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan (misalnya penyuluhan).
- e. Koperasi telah disertai tugas atau ditugaskan untuk menangani program pemerintah, walaupun perusahaan koperasi tersebut belum memiliki kemampuan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan program itu.
- f. Tujuan dan kegiatan perusahaan koperasi (yang secara administratif dipengaruhi oleh instansi dan pegawai pemerintah) tidak cukup mempertimbangkan, atau bahkan bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak dan tujuan-tujuan yang berorientasi pada pembangunan para individu dan anggota.

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (Barat) dan negara berkembang memang sangat berbeda. Di negara Barat, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, koperasi tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan

penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundangan internasional.

Di negara berkembang, koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri (*self help*). Keberadaan koperasi bukan merupakan kumpulan modal, dengan tujuan pokoknya adalah benar-benar mengabdikan untuk kepentingan anggota masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok, yaitu:

- a. Masalah internal koperasi, antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota, sehingga harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.
- b. Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.

Menurut Partadiredja (2012), faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok baru dimulai pada tahun 1986, sehingga dampaknya baru bisa dirasakan paling tidak 15 tahun setelahnya. Berbeda dengan Partadiredja, Baharuddin (2012) berpendapat bahwa faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi sehingga masih perlu diperbaiki lagi. Sedangkan Ismangil (2012) berpendapat bahwa faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerja sama di bidang sosial (gotong royong) memang sudah kuat, tetapi kerja sama di bidang usaha dirasakan masih lemah. Padahal kerja sama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi. (<http://mierameidi-anisuryadi.blogspot.com/2012/01/pembangunan-koperasi-di-negara>).

Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Bila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait guna kemajuan koperasi yang lebih baik.

7. Perkembangan Permodalan

Sumber modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang semuanya ini adalah untuk menambah modal usaha yang merupakan modal dari kekuatan sendiri. Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada waktu mulai menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib merupakan iuran yang dibayar pada

- 1) Meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota dalam pembukuan dan pembenahan koperasi,
- 2) Meningkatkan pendidikan perkoperasian bagi anggota koperasi tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi,
- 3) Meningkatkan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan teknis serta penyedia informasi teknologi,
- 4) Masyarakat koperasi melalui wadah penyuluhan perkoperasian untuk mewujudkan koperasi menjadi gerakan nasional.

Dari program-program yang diberikan sebagian kecil tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan manajemen. Program-program tersebut diberikan oleh pemerintah kepada pengurus koperasi dan pengurus koperasi menyampaikan kembali kepada anggotanya.

b. Program Perluasan Usaha Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya. Adapun program yang diberikan adalah:

- 1) Meningkatkan promosi usaha.
- 2) Menyediakan informasi peluang usaha dan pasar.
- 3) Mengembangkan jaringan pemasaran.

Dari program yang diberikan tersebut, belum ada program yang dilaksanakan dengan baik. Program-program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan ada juga yang dilaksanakan koperasi.

10. Program Kerjasama antar Koperasi dan Kemitraan Usaha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha koperasi baik dalam aspek kelembagaan maupun aspek usaha. Adapun program-program yang diberikan adalah:

- a. Mengembangkan jaringan usaha koperasi yang lebih luas baik di bidang produksi, pengolahan, maupun pemasaran.
- b. Menjalinkan hubungan kemitraan usaha dalam berbagai ben-

tuk/pola yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menunjang dan saling menguntungkan.

Dari program yang diberikan tersebut, beberapa koperasi telah melaksanakannya seperti bermitra dengan PT PLN dan PT Telkom. Program ini dilakukan oleh pengurus dengan membuat permohonan kepada pihak mitra (PT PLN dan PT Telkom) melalui pemerintah untuk mendapatkan dukungan dana.

11. Program Penelitian dan Pengembangan Koperasi

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan koperasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam koperasi. Adapun program-program yang diberikan adalah:

- a. Peningkatan struktur permodalan koperasi.
- b. Pemanjatan kelembagaan, organisasi, dan kemitraan usaha koperasi.
- c. Peningkatan kemampuan dan akses terhadap teknologi.

Program-program tersebut belum dijalankan dengan baik, namun program ini dilaksanakan oleh pengurus dan anggota dalam mengembangkan usaha koperasi sehingga harapan anggota dapat mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat dapat terwujud dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia terlaksana dengan baik.

12. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Menurut Muta'ali (2012), pembangunan adalah optimasi, interdependensi, dan interaksi di antara berbagai komponen pembangunan, yaitu sumber daya alam, sumberdaya manusia, tata nilai masyarakat dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam kenyataannya, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tuntutan kebutuhan manusia menyebabkan manusia mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan daya dukungnya, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Di samping itu, kerusakan juga terjadi akibat dari sistem pengaturan penggunaan sumberdaya alam yang belum memadai.

Pemanfaatan sumberdaya alam mensyaratkan diketahuinya kemampuan daya dukung lingkungan saat ini. Melalui suatu

analisis, perlu diperhitungkan kapan dan seberapa jauh kemampuan daya dukung tersebut dapat ditingkatkan. Selain itu, pemahaman tentang variasi keruangan dan faktor determinan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dinamika daya dukung wilayah merupakan fungsi keseimbangan dari sumberdaya wilayah dengan jumlah penduduk pada tingkat hidup layak dengan segala implikasinya. Inilah yang menjadi masalah dalam pembangunan nasional sekarang ini.

Pada dasarnya, pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional itu dan PJPT I, koperasi sangat berperan dan mendukung perkembangan di sektor pertanian dan industri kecil guna memenuhi kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Prestasi koperasi itu telah ditunjukkan melalui keikutsertaan dan sumbangan dalam mengurangi jumlah anggota masyarakat yang tergolong di bawah garis kemiskinan.

Menurut Pandji dan Widiyanti (1998), keberhasilan pembangunan koperasi dalam PJPT I tersebut telah melahirkan tantangan baru bagi koperasi pada PJPT II. Tantangan itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama bagi mereka yang baru saja diantarkan dari kemiskinan dan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Pembangunan ekonomi masa yang akan datang dihadapkan pada dua tantangan yaitu:

- a. meningkatnya daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan yang kompetitif;
- b. melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar seluruh sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa jiwa wirausaha. Dengan demikian, peran koperasi menjadi penting sebagai *sokoguru* dan bagian integral dari tata perekonomian nasional. Ko-

operasi secara bersama-sama dengan usaha swasta, daerah dan negara harus mampu menjadi penggerak utama dalam peran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan berfungsi sebagai wadah menggalang ekonomi rakyat.

Menurut Adisasmita (2002), dalam rangka kerja otonomi daerah, bidang koperasi merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten dan kota. Untuk itu, kebijakan strategis koperasi ke depan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. terciptanya koperasi yang berbasis anggota yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota;
- b. meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar baik di daerah, regional, nasional, maupun internasional;
- c. memperluas akses terhadap permodalan, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal;
- d. meningkatkan akses terhadap teknologi, manajemen kemampuan sumber daya manusia, serta memantapkan kemitraan.

Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan semakin berkurang dan menempatkan koperasi untuk ikut berperan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Pemerintah daerah lebih ditempatkan pada fungsi pengendali dan pengawas atas pekerjaan yang diserahkan kepada koperasi. Koperasi di tanah air kita sejak zaman penjajahan hingga sekarang telah membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada masa pembangunan ini, koperasi sangat besar sekali peranannya bukan hanya di bidang perekonomiannya saja, tetapi koperasi bisa menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia (Pandji dan Widiyanti, 1998).

Menurut Adisasmita (2002), banyak organisasi koperasi modern telah didirikan, terutama di daerah-daerah pedesaan di banyak negara berkembang. Organisasi-organisasi itu didaftarkan sesuai dengan "Undang-Undang Koperasi" negara yang bersangkutan dan biasanya disebut koperasi-koperasi 'modern'.

atau pemerintah guna membelanjai kegiatan-kegiatannya dalam rangka memprakarsai dan mengembangkan koperasi agar menjadi organisasi-organisasi (swadaya) koperasi yang efisien dan berorientasi pada kepentingan anggota masyarakat.

Banyak koperasi-koperasi, yang didirikan dengan bantuan yang lengkap dari pemerintah dan lembaga-lembaga pendorong swadaya semi pemerintah, kelihatannya masih berada pada tahap awal dalam pengembangan struktur organisasinya, mereka masih belum mampu berkembang sebagai organisasi-organisasi koperasi swadaya yang otonom tanpa bantuan keuangan dan manajemen, yang disediakan langsung oleh pemerintah negara-negara berkembang itu (oleh badan-badan kerja sama bilateral dan internasional). Hal ini terjadi, terutama pada koperasi-koperasi yang para anggotanya berasal dari penduduk pedesaan yang tergolong masih sangat 'miskin'. Dengan memperhatikan upaya 'ofisialisasi' pada banyak koperasi, timbullah masalah menyangkut 'transformasi struktur organisasi', dalam arti bahwa sunnguhpun lembaga-lembaga itu didaftarkan menurut Undang-undang koperasi dan diperkuat dengan dana yang cukup, namun mereka masih belum berkembang sesuai dengan konsepsi organisasi yang ideal, yang mampu mengembangkan dirinya sendiri (Adisasmita, 2002).

Meski sebagian besar organisasi koperasi di negara berkembang merupakan koperasi-koperasi pertanian atau koperasi-koperasi pedesaan, namun masih terdapat pula berbagai jenis koperasi lain yang juga berusaha di daerah perkotaan. Misalnya, koperasi konsumsi/konsumen, koperasi pembangunan perumahan, berbagai jenis koperasi para pengrajin, koperasi industri kecil, koperasi pedagang eceran, koperasi pekerja, dan lain-lain.

Menurut Leon Garoyan, dan Paul O. Mohn dalam Sukamdiyo (1996) sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, setiap anggota harus mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu:

1. Menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota.
2. Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas.

3. Mengesahkan serta memberhentikan pengurus dan pengawas.
4. Mengesahkan perubahan anggaran dan investasi yang penting.
5. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan.
6. Membantu permodalan koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Membayar simpanan-simpanan yang menjadi kewajibannya.
8. Melakukan transaksi dan aktif dalam kegiatan koperasi.
9. Memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan kerja pengurus.
10. Mengikuti dan mendorong perkembangan koperasi.

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan undang-undang perkoperasian di atas dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi harus berpartisipasi aktif dalam koperasinya, agar koperasi dapat mewujudkan harapan-harapan para anggotanya. Partisipasi tersebut dapat berupa: (1) menghadiri rapat-rapat yang diadakan koperasi dan ikut serta dalam sumbang saran atau kritik membangun serta memberikan suara untuk kemajuan koperasi pada setiap pengambilan keputusan; (2) berpartisipasi aktif dalam pemupukan modal koperasi; (3) berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan jasa atau pelayanan koperasi dan selalu setia berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi; (4) berpartisipasi dalam pengawasan jalannya organisasi dan bisnis koperasi agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

C. Kontribusi Perkembangan Koperasi dalam Pembangunan Wilayah

Bertolak dari pengalaman negara-negara lain ketika penguasaan faktor produksi lebih terkonsentrasi pada sekelompok orang kecil, maka proses pemerataan kemakmuran akan berlangsung agak lambat atau bahkan terhambat. Konstitusi kita sebenarnya telah memberikan arahan yang jelas ke mana tatanan pengembangan ekonomi harus diarahkan. Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan semula merupakan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran yang demikian menghendaki adanya mekanisme yang

arahan bahwa pembangunan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, mandiri, dan unggul, serta sebagai pelaku ekonomi yang menggalang kemampuan ekonomi rakyat di lingkup ekonomi nasional (Juarini, 2003).

Menurut Soedargo (2006), ada beberapa alasan yang menempatkan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, antara lain: *pertama*, koperasi lebih *fleksibel* karena skala usahanya tidak terlalu besar dan kesederhanaan spesifikasi teknologi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan koperasi mampu dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal; *kedua*, mudah penyebarannya sehingga memungkinkan berpeluang dalam proses pemerataan dalam kesempatan berusaha; *ketiga*, koperasi sebagai usaha kecil memiliki potensi untuk menopang perusahaan-persahaan besar dalam proses industrialisasi; *keempat*, pengembangan koperasi lebih dekat dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah (*grass root*).

Menurut Mubyarto (1988), upaya pemberdayaan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan: *pertama*, mengembangkan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi rakyat untuk berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan; *kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pencerahan, dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi; *ketiga*, melindungi rakyat dari persaingan yang tidak seimbang dan mencegah eksploitasi kelompok ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan koperasi bisa lebih baik apabila ada eksistensi di antara anggota-anggotanya. Kemampuan individu senasib untuk berkumpul dalam suatu kelompok akan melahirkan pertemuan dialogis dan bisa menumbuhkan dan memperkuat kesadaran serta solidaritas kelompok. Dengan cara tersebut, anggota koperasi bisa menumbuhkan keseragaman dalam keragaman dan bisa mengenali kepentingan mereka bersama. Mereka akan belajar mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan me-

rancang suatu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan "pendamping" atau pihak eksternal yang bisa memberikan semacam konsultasi, baik teknis maupun manajerial. Pendamping di sini hanya berfungsi sebagai stimulator dan tidak berhak mencampuri keputusan kelompok.

Penempatan posisi strategis koperasi sebagai wahana konsolidasi sumber daya anggotanya dapat dilakukan dengan pendekatan *bottom up planning*, yaitu mekanisme perencanaan dari bawah dan bukan pendekatan *top down* sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengembangan koperasi. *Bottom up planning* adalah sebuah kebijakan pengembangan koperasi yang dikemas sebagai akomodasi pemerintah terhadap prakarsa yang muncul dari masyarakat bawah (*grass roots oriented*) untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya, yang telah terabstraksi dalam bentuk konkret berupa gerakan koperasi. *Top down planning* adalah kebijakan yang dikemas oleh pemerintah "dari atas" sesuai dengan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.

Pendekatan *top down* biasanya dilaksanakan dengan menggunakan teori *trickle down effects* (efek tetesan ke bawah). Dalam realitasnya, pola *top down* dengan teori *trickle down effects* ternyata malah memperburuk perkembangan koperasi dan menyimpang asas, sendi, prinsip dan tujuan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat.

Bermodal *good will* dari pemerintah, walaupun hanya sebagai wadah bagi kegiatan ekonomi rakyat yang notabene kecil dan lemah, tetapi koperasi harus dapat mengambil manfaat dalam kancah perekonomian global. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, strategi pembenahan yang tepat adalah: *pertama*, konsolidasi kekuatan dan sumber daya potensial koperasi, meliputi potensi SDM, modal, lapangan usaha dan kemungkinan penetrasi di pasar domestik dan internasional; *kedua*, pembinaan kader-kader koperasi yang memiliki keterampilan berwirausaha sebagai langkah awal menciptakan profesionalisme dan kemandirian koperasi. Koperasi membutuhkan tenaga-tenaga yang ulet, inovatif, berwawasan luas dan memiliki keterampilan manaje-

rial dan jiwa kewirausahaan yang memadai. Untuk menciptakan kader-kader koperasi diperlukan pembinaan melalui pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

D. Tingkat Perkembangan Koperasi

Misi utama berkoperasi adalah menolong kaum buruh dan petani dalam mendukung apa yang dijalankan koperasi. Kemajuan koperasi di negara berkembang merupakan gerakan koperasi yang penonjolan dari peningkatan kesejahteraan para anggota (Soetrisno, 2001). Koperasi diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan organisasi lain di mana pengurusnya harus memahami kemajuan teknologi dan peningkatan pendapatan sehingga koperasi dapat berhasil dengan baik.

Perkembangan koperasi di Indonesia bukan saja merupakan organisasi usaha yang pada mulanya diperkenalkan di Inggris. Pada waktu itu, misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke-19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi untuk menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis. Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, koperasi baru diperkenalkan pada awal abad ke 20. Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju seperti di Uni Eropa (UE) dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan kaum kapitalis.

Dalam memahami pendapat ini, yang harus diperhatikan adalah penekanan pada kegiatan berkoperasi yang mempunyai misi utama untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi masalah ekonomi yang dirasakan kurang memadai sehingga timbul keinginan untuk menggalang kekuatan mereka sendiri, yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis. Oleh karena itu, muncul ide untuk

menghapus kaum kapitalis, dan hingga saat ini banyak koperasi di negara-negara maju yang sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan kaum kapitalis. Kondisi ini membuat koperasi hidup pada masa itu, tetapi tak lama kemudian terjadi ketidakpercayaan pada koperasi dalam hal manajemen-nya yang kurang memahami sehingga terjadi kepincangan yang merugikan koperasi sendiri. Khususnya di Kota Gorontalo saat ini memiliki jumlah koperasi yang cukup banyak, yaitu 231 unit, jumlah yang lebih besar berada di kecamatan Kota Selatan yang pada saat itu kecamatan ini sebagai pusat pemerintahan wilayah Kota Gorontalo.

Menurut Soetrisno (2001) bahwa sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara sedang berkembang sangat diharapkan oleh para anggota. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan yang sangat penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh lebih lanjut sebagai tuntutan masyarakat di mana koperasi dapat melindungi dirinya. Sedangkan, di negara sedang berkembang, koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara sedang berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan.

Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dan juga dibentuk departemen atau kementerian khusus yakni Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Me-

dibutuhkan penemuan-penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, baik kualitasnya, tahan lama, dan sebagainya, dan makin banyaknya pesaing-pesaing baru dalam skala yang lebih besar.

Adapun faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi adalah:

- a. posisi pasar yang kuat (antara lain dengan mengeksploitasi kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong integrasi konsumen);
- b. pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi;
- c. sangat memahami rantai produksi dari produk bersangkutan;
- d. menerapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa merespons secara tepat dan cepat setiap perubahan pasar; dan
- e. terlibat aktif dalam produk-produk yang mempunyai tren-tren yang meningkat atau prospek-prospek masa depan yang bagus (jadi mengembangkan kesempatan yang sangat tepat).

Berdasarkan penelitian terhadap perkembangan dari koperasi-koperasi pekerja di Amerika Serikat, Lawless dan Reynolds (2004) memberikan beberapa kriteria kunci dan praktik-praktik terbaik. Menurut mereka, kriteria-kriteria kunci untuk memulai suatu koperasi yang berhasil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kepemimpinan yang visioner yang bisa "membaca" kecenderungan perkembangan pasar, kemajuan teknologi, perubahan pola persaingan, dan sebagainya;
- b. menerapkan struktur organisasi yang tepat yang merefleksikan dan mempromosikan suatu kultur terbaik yang cocok terhadap bisnis bersangkutan (antara lain kondisi pasar/persaingan dan sifat produk atau proses produksi dari produk bersangkutan);
- c. kreatif dalam pendanaan (jadi tidak hanya tergantung pada kontribusi anggota, tetapi juga lewat penjualan saham ke non-anggota atau pinjam dari bank);
- d. mempunyai orientasi bisnis yang kuat.

Pendapat lain yang berkaitan dengan kemajuan koperasi adalah pendapat Pitman (2005). Dari hasil penelitiannya terhadap kinerja berbagai macam koperasi di Wisconsin (AS), Pitman mengemukakan faktor-faktor koperasi yang berhasil, yaitu koperasi yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memakai komite-komite, penasehat-penasehat dan ahli-ahli dari luar secara efektif;
- b. selalu memberikan informasi yang lengkap dan *up to date* kepada anggota-anggotanya sehingga mereka tetap terlibat dan suportif;
- c. melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan bisnis dengan memakai agenda yang teratur, prosedur-prosedur parlemen, dan pengambil keputusan yang demokrasi;
- d. mempertahankan relasi-relasi yang baik antara manajemen dan dewan direktur/pengurus dengan tugas-tugas dan berbagai tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas;
- e. mengikuti praktik-praktik akuntansi yang baik dan mempresentasikan laporan-laporan keuangan secara regular;
- f. mengembangkan aliansi-aliansi dengan koperasi-koperasi lainnya;
- g. mengembangkan kebijakan-kebijakan yang jelas terhadap konfidensial dan konflik kepentingan.

E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Koperasi

Pada dasarnya, keberhasilan koperasi itu tergantung tingkat partisipasi dan aktivitas para anggotanya serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh koperasi.

Menurut Keeling (2005), faktor yang memengaruhi perkembangan koperasi adalah akibat kombinasi dari sejumlah faktor berikut:

1. kurangnya pendidikan dan pengawasan dari dewan direktur/pengurus;
2. manajemen yang tidak efektif; dan
3. keanggotaan yang pasif.

Menurut Anderson dan Henehan (2001), manajemen dan direktur yang efektif dalam arti cepat mengambil suatu keputusan yang tepat dalam merespons perkembangan-perkembangan bisnis terkait (misalnya perubahan pasar atau masuknya pesaing-pesaing baru) sangat menentukan keberhasilan suatu koperasi. Faktor kunci lainnya adalah yang dipimpin oleh dewan direktur berkualitas.

Dalam menjabarkan sejumlah karakteristik yang merupakan faktor yang memengaruhi keberhasilan koperasi, di antaranya adalah:

1. menerapkan strategi yang rasional yang cocok dengan lingkungan bisnisnya yang berlaku untuk bisa tetap beroperasi;
2. mempunyai suatu visi yang lebih luas dari hanya memproduksi bahan baku (produsen perlu memahami apa artinya menanam dalam nilai tambah);
3. keputusan-keputusan didasarkan pada informasi yang kredibel;
4. keuangan baik;
5. pemilik atau dewan direktur bisa memimpin dengan baik (dewan direktur yang lebih banyak diambil dari luar bisa menaikkan kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan strategis);
6. memakai/mengerjakan manajer profesional yang juga meningkatkan kinerja koperasi; dan
7. punya keinginan menjadi "yang paling hebat di kelompoknya" vs. "menambah rantai nilai".

Banyak hal yang dapat memengaruhi buruknya kinerja koperasi di negara berkembang yang pada umumnya disebabkan oleh sejumlah faktor yang bisa dibedakan antara faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrol koperasi dan faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal terutama adalah keterbatasan partisipasi anggota, masalah-masalah struktural dan kontrol, dan kesalahan manajemen. Sedangkan faktor-faktor eksternal terutama adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar yang sering didorong oleh negara donor, kesulitan lingkungan ekonomi dan

politik serta harapan-harapan yang tidak realistis mengenai peran koperasi. Masalah paling signifikan adalah bagaimana cara pemerintah mempromosikan koperasi kepada masyarakat sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik.

Sedangkan menurut Soedirman (2006), faktor internal dan faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor internal

a. Partisipasi Anggota

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan.

Partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas tertentu, dan partisipasi anggota dalam koperasi adalah mengikutsertakan anggota koperasi dalam kegiatan operasional untuk pencapaian tujuan bersama. Namun, banyak anggota koperasi yang belum memanfaatkan jasa pelayanan yang tersedia di koperasi. Hal ini menunjukkan kurang tumbuhnya rasa memiliki dari anggota sehingga mereka masih memanfaatkan jalur lain dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Solidaritas Antar Anggota Koperasi

Berkoperasi juga dimaknai sebagai upaya membangun ikatan solidaritas antar anggota. Dengan ikatan ekonomi, ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih konkret. Ikatan solidaritas ini pada kenyataannya juga bisa dikembangkan untuk meraih tujuan gerakan yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya solidaritas yang kuat antar anggota koperasi dapat menjadi suatu kekuatan di dalam mencapai tujuan koperasi.

c. Pengurus Koperasi yang Juga Tokoh Masyarakat

Pengurus koperasi yang juga tokoh dalam masyarakat membuatnya rangkap jabatan sehingga fokus perhatian ter-

j. Sistem Manajemen

Sistem manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya koperasi. Dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, dan melimpahkan wewenang kepada manajer.

k. Kinerja Pengurus

Pengurus koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dengan pengurus yang memiliki kompetensi yang baik akan dapat membuat koperasi berkembang menjadi lebih baik.

2. Faktor Eksternal

a. Komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai *sokoguru* perekonomian nasional belum terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dikuasainya sebagian besar aset usaha nasional oleh sebagian kecil kelompok usaha besar. Jadi, dengan adanya kebijakan pemerintah ini koperasi hanya mendapatkan perhatian yang kecil. Sedangkan UKM ataupun koperasi memberikan omzet yang cukup besar dibanding usaha swasta dan ini akan sangat menguntungkan bagi pembangunan bangsa.

b. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan.

Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakikat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya baik. Karena itu, pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota harus digalakkan agar bisa meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting, karena dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi.

c. Iklim pendukung perkembangan koperasi

Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang begitu saja. Untuk itu, pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi. Dengan koordinasi tersebut, berbagai pihak yang ada sangkut pautnya dengan pertumbuhan koperasi dapat ikut berperan dengan baik dan maksimal.

d. Dicabutnya fasilitas tertentu oleh pemerintah

Koperasi berkembang mengikuti perkembangan fasilitas yang diberikan pemerintah, sehingga seakan-akan koperasi adalah organisasi yang sekadar menjalankan program-program pemerintah. Berbagai peluang usaha koperasi harus diakui belum optimal dimanfaatkan koperasi. Bahkan organisasi DEKOPIN yang diharapkan menjadi corong koperasi yang memperjuangkan aspirasi koperasi dan melaksanakan berbagai pelatihan tidak berjalan dengan baik.

e. Tingkat harga

Tingkat harga yang selalu berubah (naik-turun) bisa juga memengaruhi tumbuh kembang koperasi. Hal ini tentu akan menjadi ancaman dan bisa melemahkan koperasi baik secara internal maupun eksternal. Berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi dan berperan sesuai harapan. Apalagi berbagai peraturan, kebijakan, dan kesempatan atau peluang yang tersedia bagi koperasi belum dimanfaatkan oleh koperasi bagi kepentingan anggota dan masyarakat lingkungannya.

F. Prospek Perkembangan Koperasi terhadap Perekonomian Masyarakat

Menurut Djasmir (2006), prospek adalah kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja penjualan dengan meraih peluang yang ada serta mengatasi berbagai hambatan dan ancaman baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan Paul R. Krugman menyatakan bahwa prospek adalah peluang yang ter-

jadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk mendapatkan profit (<http://taqinpanteraya.blogspot.com>). Siswanto Sutejo menyimpulkan secara jelas bahwa prospek adalah suatu gambaran keseluruhan, baik ancaman ataupun peluang, dari kegiatan pemasaran yang akan datang yang berhubungan dengan ketidakpastian dari aktivitas pemasaran (<http://taqinpanteraya.blogspot.com>).

Dengan demikian, prospek merupakan kondisi yang akan dihadapi oleh koperasi di masa yang akan datang baik kecenderungan untuk meningkatkan atau menutup usaha koperasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi. Kelemahan dan kekuatan yang dimiliki koperasi memerlukan perencanaan dan perumusan strategis secara baik sehingga koperasi dapat memanfaatkan peluang-peluang dan mengetahui berbagai bentuk ancaman di kemudian hari.

Prospek pengembangan koperasi dilatarbelakangi oleh fenomena empiris bahwa koperasi Indonesia jika dibandingkan dengan praktik-praktik koperasi di berbagai negara industri maju yang menganut sistem ekonomi liberal dan kapitalistik dinilai oleh banyak kalangan masih jauh tertinggal, jalan di tempat, dan cenderung tidak mau beranjak dari ketergantungan pada bantuan pemerintah. Padahal koperasi di sejumlah negara maju baik di Eropa, Amerika, Canada dan beberapa negara Asia lainnya mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis global yang terjadi.

Tantangan yang dihadapi koperasi dewasa ini dalam perekonomian masyarakat khususnya adalah globalisasi yang ditandai dengan adanya pergerakan bebas barang dan modal/uang. Selain itu, perlakuan terhadap pelaku ekonomi sendiri adalah sama, sehingga era globalisasi sering menjadi dilema bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Globalisasi tidak bisa dibendung, upaya yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap tantangan globalisasi. Para pelaku usaha khususnya koperasi harus mampu bersikap kreatif dan antisipatif menghadapi globalisasi ekonomi melalui usaha dan kerja keras masyarakat sehingga keberhasilan dapat tercapai.

Soetrisno (2001) mengemukakan beberapa syarat agar koperasi bisa maju, yakni: (1) skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi; (2) koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi dasar menumbuhkan koperasi; (3) posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar untuk memperkuat posisi tawar koperasi; (4) pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi dalam pengembangan SDM.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh koperasi pada era sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. membangun suatu sistem koperasi yang menyatukan peran lokal dan peran regional. Dengan kata lain, bagaimana koperasi lokal dan koperasi regional dapat bekerja sama untuk jangka panjang;
2. menciptakan penghasilan yang cukup (menaikkan profit);
3. mengembangkan atau menyempurnakan strategi dan keahlian pemasaran (mensegmentasikan pasar hanya permulaan);
4. program-program peningkatan kualitas SDM; dan
5. mengembangkan dan melaksanakan suatu strategi *e-commerce*. Pesan paling utama dari Larson untuk koperasi-koperasi lokal adalah bahwa kinerja keuangan yang solid sangat penting; koperasi-koperasi harus mempunyai tujuan sebagai penggerak/peningkatan kinerja.

Peran dan perkembangan koperasi memberikan prospek terhadap tingkat kesejahteraan anggota di lingkungan koperasi dan perkembangan masyarakat di suatu wilayah. Prospek koperasi terhadap perekonomian masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan pengurus dan anggota tentang perkerasian, pemenuhan sandang dan pangan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, pemenuhan permodalan untuk menunjang kebutuhan anggota dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan jiwa kepemimpinan, kualitas dalam organisasi, kekerabatan, peluang kerja, tingkat produksi dan kesejahteraan.



BAB III

REKAM JEJAK KOPERASI DI KOTA GORONTALO

A. Kondisi Geografis Kota Gorontalo

Secara geografis, Kota Gorontalo terletak antara $00^{\circ}28'17''$ - $00^{\circ}35'56''$ Lintang Utara dan $122^{\circ}59'44''$ - $123^{\circ}05'59''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango; sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

Kota Gorontalo yang merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo memiliki total luas wilayah sebesar 6.675,58 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kota Barat, Dungi, Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Tengah, dengan persebaran luas dan persentase masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kota Gorontalo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Dungingi	435,18	6,52
2	Kota Barat	1.645,80	24,65
3	Kota Selatan	1.285,25	19,25
4	Kota Tengah	485,24	7,27
5	Kota Timur	1.518,17	22,74
6	Kota Utara	1.305,93	19,56
	Total	6.675,58	100,00

Sumber : Hasil Digitasi Peta Administrasi Kecamatan, 2010.

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, kecamatan terluas adalah Kota Barat dengan luas 1.645,80 ha atau seluas 24,65% dari total luas Kota Gorontalo. Bagian barat dari kecamatan ini merupakan danau sebagai tempat nelayan menangkap ikan dan dikonsumsi atau dijual. Selain itu, juga memiliki aset sejarah berupa benteng Otanaha, Otahia dan Otabiya yang dibangun sebagai tempat pertahanan Belanda yang sekarang ini dipelihara oleh pemerintah Kota Gorontalo sebagai tempat wisata. Kota Timur adalah kecamatan terluas kedua, yaitu 1.518,17 ha atau 22,74%, kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango yang memiliki pertanian lahan basah, kebun, juga pengembangan aktivitas perdagangan bagian timur Kota Gorontalo.

Sebagai pusat pemerintahan, Kota Gorontalo adalah Kecamatan Kota Selatan dengan luas 1.285,25 ha atau 19,25%, yang juga menjadi pusat perdagangan yang dikenal sejak dulu. Aktivitas perdagangan melayani Gorontalo dan wilayah sekitar Gorontalo Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara. Kota Utara dengan luas 1.305,93 ha (19,56%), merupakan kecamatan dengan potensi pertanian lahan basah seluas 954 ha sebagai salah satu sumber pangan kota untuk kebutuhan masyarakat, dan kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Kota Tengah memiliki luas 485,24 ha (7,27 %) dan menjadi pusat pengembangan bisnis Kota Gorontalo. Selain itu, juga terdapat fasilitas Pendidikan Tinggi sebagai tempat melanjutkan pendidikan baik yang berasal dari ling-

kungan Provinsi Gorontalo juga bagian Timur Indonesia, sehingga hal ini merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo. Sedangkan kecamatan Dungingi merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Barat dengan luas 435,18 ha atau seluas 6,25%, dan merupakan daerah pusat kerajinan tangan yang berada di wilayah pinggiran kota, sehingga menjadi perhatian masyarakat untuk pindah ke Dungingi sebagai pengembangan daerah baru.

Kota Gorontalo dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di wilayah Kota Gorontalo. Pada bulan oktober sampai april arus angin berasal dari barat/barat laut yang banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim penghujan, sementara pada bulan juni sampai september arus angin berasal dari timur yang tidak mengandung uap air. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan mei dan bulan oktober (Kota Gorontalo Dalam Angka, 2011). Selanjutnya Peta Administrasi Kota Gorontalo dapat ditampilkan dalam gambar berikut :



Kantor PLN, PDAM, Bappeda, Pelayanan Pajak (PBB) dan lain-lain.

b. Perkantoran non-pemerintah

Di Kota Gorontalo, perkantoran non-pemerintah antara lain perkantoran organisasi Partai Politik (PPP) dan pusat perdagangan di wilayah Kota Gorontalo.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan perdagangan dan jasa sebagian besar dilakukan di pasar (pasar umum, pasar buah, dan pasar jajan), pertokoan, warung dan sebagainya. Pasar umum meliputi Pasar Sentral, Pasar Bugis, Pasar Piloladaa dan Pasar Liliwo sudah penuh sesak dan tidak mungkin dilakukan perluasan secara horizontal. Kegiatan pasar-pasar ini menyebabkan kemacetan jalan di sekitarnya. Selain pasar-pasar tersebut, juga dapat dijumpai pasar buah yang berdampingan dengan pasar jajan yang terletak di Kawasan Kota (lama) dan di Kompleks Stadion Merdeka Kota Gorontalo.

Pertokoan dan warung menyebar di seluruh wilayah Kota Gorontalo meliputi supermarket, minimarket, toko dan warung. Pertokoan ini umumnya beraglomerasi di sekitar pasar-pasar umum seperti di sekitar Pasar Sentral (di antara Jalan H. Agus Salim, Sam Ratulangi, Budi Utomo dan Husni Thamrim) dan di sekitar Pusat Kota (lama) di antaranya di jalan Sultan Hasanuddin, Jend. Ahmad Yani dan Jend. Suprpto serta di sekitar jalan Andalas. Sedangkan warung selain lokasi tersebut di atas juga menyebar sampai ke lokasi-lokasi pemukiman penduduk. Kegiatan jasa seperti perbankan, PT. Pos Indonesia, dan sejenisnya umumnya terpusat di Kawasan Kota Selatan bercampur dengan fasilitas kota lainnya seperti perkantoran, fasilitas perdagangan, rumah makan bahkan ada yang berlokasi di daerah baru terbangun.

Fasilitas/sarana jasa lain yang tersedia di Kota Gorontalo yang dijadikan sebagai tempat beristirahat bagi para tamu yang datang dari daerah lain dan bermalam/nginap dan menikmati suasana kota adalah Quality Hotel Gorontalo.

Tabel 3.3

Jumlah Sarana Perdagangan Kota Gorontalo Tahun 2010

No	Sarana Perdagangan	Jumlah (unit)
1	Supermarket	2
2	Mini Market	7
3	Pertokoan	698
4	Warung	634
5	Pasar Sentral jumlah toko sebanyak	242
	Jumlah kios sebanyak	349
6	Pasar Keramat dengan jumlah toko sebanyak	12
7	Pasar Setyapraja dengan jumlah toko sebanyak	54
8	Pasar Moodu dengan jumlah toko sebanyak	28
9	Pasar Bugis dengan jumlah toko sebanyak	12
10	Pasar Liliwo dengan jumlah toko sebanyak	15
11	Pasar Piloladaa dengan jumlah took sebanyak	5
12	Pasar '42 dengan jumlah toko sebanyak	6
13	Terminal kota dengan jumlah toko sebanyak	97
14	Komplek Murni dengan jumlah toko sebanyak	48

Sumber : BPS dan Kota Gorontalo Dalam angka Tahun 2010

3. Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kota Gorontalo mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai tingkat Perguruan Tinggi. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Gorontalo tahun 2006 yaitu TK sebanyak 77 unit, SD sebanyak 114 unit, SLTP sebanyak 19 Unit, SMU sebanyak 7 unit, SMK sebanyak 4 unit. Untuk Perguruan Tinggi sebanyak 5 PT, yaitu Universitas Negeri Gorontalo, IAIN Gorontalo, ASMI Bina Taruna Gorontalo, Universitas Ichsan Gorontalo/Akademi dan Komputer Gorontalo, dan Universitas Terbuka.

Dari tabel di atas, jumlah penduduk kecamatan Kota Barat dari tahun 2005 sampai 2010 tercatat sebanyak 180.127 jiwa, sehingga penyebarannya setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2005, 11,23%, tahun 2006, 11,97%, tahun 2007, 18,88%, tahun 2008, 23,41% tahun 2009, 18,40% tahun 2010 turun menjadi 15,02% disebabkan pindah daerah.

Jumlah penduduk kecamatan Duingi dari tahun 2005 sampai 2010 tercatat sebanyak 21.568 jiwa, sehingga penyebarannya setiap tahun mengalami peningkatan, di mana tahun 2005, 14,20%, tahun 2006 14,38%, tahun 2007, 16,13%, tahun 2008 17,90% tahun 2009 18,86% dan 2010 turun menjadi 18,53%.

Jumlah penduduk kecamatan Kota Selatan dari tahun 2005 sampai 2010 tercatat sebanyak 35.988 jiwa, sehingga penyebarannya setiap tahun mengalami peningkatan tahun 2005, 16,13%, tahun 2006 16,33%, tahun 2007, 16,00%, tahun 2008, 16,85%, tahun 2009 17,88% dan tahun 2010 turun menjadi 16,81% disebabkan pindah penduduk dan meninggal dunia.

Jumlah penduduk kecamatan Kota Timur dari tahun 2005 sampai 2010 tercatat sebanyak 42.155 jiwa, sehingga penyebarannya setiap tahun mengalami peningkatan tahun 2005, 15,92%, tahun 2006 16,12%, tahun 2007, 16,18%, tahun 2008, 17,00%, tahun 2009, 17,65% dan tahun 2010 turun menjadi 17,13% disebabkan penduduk yang berpindah-pindah dan meninggal dunia.

Jumlah penduduk kecamatan Kota Utara dari tahun 2005 sampai 2010 tercatat sebanyak 33.149 jiwa, sehingga penyebarannya setiap tahun mengalami peningkatan tahun 2005, 15,29%, tahun 2006 15,48%, tahun 2007, 16,09%, tahun 2008, 16,97%, tahun 2009, 17,87% dan tahun 2010, 18,27%. Wilayah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan karena menjadi pengembangan Kota Gorontalo bagian utara.

Jumlah penduduk kecamatan Kota Tengah dari tahun 2005 sampai 2010 tercatat sebanyak 27.047 jiwa, sehingga penyebarannya setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2005, 14,17%, tahun 2006 14,37%, tahun 2007, 16,34%, tahun 2008, 17,44%, tahun 2009, 18,42% dan 2010 mengalami peningkatan dan kota ini me-

rupakan pengembangan daerah baru di wilayah Kota Gorontalo.

Berdasarkan penjabaran di atas, perubahan populasi penduduk dalam suatu wilayah akan menyebabkan tingkat hunian per kilometer. Hal ini yang menyebabkan bahwa jumlah lahan yang tersedia kurang memadai sehingga diharapkan pihak pemerintah perlu mencari jalan keluar, agar ledakan penduduk tidak akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap daerahnya.

Perubahan jumlah penduduk pada tahun 2009 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan hampir berimbang. Tahun 2009, perubahan rata-rata 99,99 persen, dengan jumlah penduduk laki-laki 91.425 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 91.436 jiwa (182.861). Untuk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Gorontalo turun menjadi 180.127 jiwa (182.861-2.734 jiwa).

Menurut Yunus (2008), kepadatan penduduk merupakan rasio jumlah penduduk yang tinggal di dalam wilayah administrasi tertentu dengan luas wilayah administrasi yang bersangkutan. Oleh karena dalam wilayah administrasi sangat sering terdapat pula lahan-lahan terbangun yang dimanfaatkan bukan permukiman, maka dalam perhitungan kepadatan penduduk administrasi tersebut termasuk dalam perhitungan luas wilayah denominatornya. Dengan demikian, perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kota Gorontalo yang setiap tahunnya meningkat dan tetap memperhatikan lahan yang ada menjadi tempat permukiman penduduk dan tempat berusaha guna memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat secara umum.

2. Angkatan Kerja

Tenaga kerja yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2009 menjadi 6.428 orang dan ini mengalami peningkatan dari tahun 2006 yang sejumlah 2.505 orang. Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja adalah sejumlah 79.167 jiwa, atau sekitar 61,72 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan sensus

dan komunikasi 15,02%; jasa kemasyarakatan 31,60%; dan lainnya 2,66%. Dengan demikian, jumlah persentase tertinggi adalah jasa kemasyarakatan (31,60%).

3. Sosial Ekonomi Masyarakat

Membangun aktivitas ekonomi bersama yang berpijak pada kekuatan sendiri dan kesamaan derajat dalam rangka mencapai perbaikan kehidupan ekonomi bagi seluruh anggota menjadi sebuah keidealan, dan hal ini membutuhkan rasa kebersamaan untuk mencapainya. Untuk itu koperasi sebagai suatu institusi ekonomi harus berusaha untuk menyatukan segala sumber daya dan faktor produksi yang dimilikinya secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya sehingga kemakmuran dapat terwujud.

E. Pendidikan

Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kota Gorontalo sekarang ini lebih difokuskan kepada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar/guru yang memadai.

Pada tahun ajaran 2009/2010, tingkat Taman Kanak-kanak jumlahnya mengalami perubahan dibandingkan pada satu tahun ajaran sebelumnya, yaitu sejumlah 86 sekolah. Sejalan dengan hal itu, jumlah murid TK juga mengalami peningkatan dari 4.239 pada tahun 2008/2009 menjadi 4.942 pada tahun 2009/2010 dan jumlah guru TK adalah 319 orang. Pada tahun yang sama, jumlah sekolah dasar (SD) adalah 112 buah dengan jumlah murid laki-laki 10.659, jumlah murid perempuan 9.757 dan jumlah guru SD adalah 1.319 orang.

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mengalami perubahan yakni 20 buah. Jumlah murid laki-laki meningkat dari 4.011 siswa pada tahun 2008/2009 menjadi 4.025 siswa pada tahun 2009/2010. Sementara itu, jumlah murid perempuan menurun dari 4.242 siswa pada tahun 2008/2009 menjadi 4.241 siswa pada

tahun 2009/2010 dan jumlah guru pada tahun 2009/2010 adalah 644 orang.

Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2009/2010 berjumlah 7 buah dengan jumlah murid laki-laki 2.012 siswa, jumlah siswa perempuan 2.455 dan jumlah guru 337 orang. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2009/2010 berjumlah 8 buah dengan jumlah murid laki-laki 1.755 siswa, jumlah siswa perempuan 2.240 dan jumlah guru 388 orang. Dari jumlah siswa SMA maupun SMK tersebut, terlihat bahwa jumlah siswa perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah siswa laki-laki, sehingga kebanyakan jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga lebih besar jumlahnya adalah perempuan.

F. Pendapatan

Perekonomian Kota Gorontalo tahun 2010 terlihat semakin membaik dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010, nilai PDRB (harga berlaku atau harga konstan) Kota Gorontalo sebesar 1.595.348,12 juta rupiah yang sebelumnya sebesar 1.337.880,19 juta rupiah pada tahun 2009. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2009 sebesar 559.910,93 juta rupiah.

Pada tahun 2010, perekonomian Kota Gorontalo masih didominasi oleh sektor tersier, yakni sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dapat kita lihat bahwa sektor jasa masih merupakan sektor yang paling dominan, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan yang besar dari kedua sektor tersebut sejalan dengan kedudukan Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo sebesar 7,60 persen, sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan ekonominya sebesar 7,43 persen. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo antara lain didukung oleh iklim investasi di berbagai sektor yang kondusif sehingga banyak pihak swasta yang menanamkan modalnya baik dalam skala kecil, menengah, dan besar. Makin banyaknya toko dan kompleks perumahan yang berdiri merupakan salah satu bukti nyata dari perkembangan jumlah pendapatan.

pembantu keperluan sehari-hari (sabun, minyak tanah). Adapun tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi yang berkualitas baik dan harga yang layak. Koperasi konsumsi menyalurkan barang yang dirasakan manfaatnya oleh anggota. Dalam menyalurkan atau menjual barang-barang tersebut kepada para anggota selalu dipertimbangkan bahwa anggota tidak boleh dipaksa dalam membeli barang-barang tersebut bahkan anggota dapat diberikan harga barang yang layak (Pandji & Widiyanti, 1998).

Koperasi konsumsi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Barang kebutuhan yang dijual di koperasi tersebut lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi jenis ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi jenis ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo dengan jumlah total 113 unit.

Jenis koperasi konsumsi sebarannya berada di Kota Selatan dengan jumlah 40 unit (35,40%); Kota Tengah dengan jumlah 26 unit (23,01%); Kecamatan Utara dengan jumlah 19 unit (16,81%); sedangkan jumlah terkecil ada di Kota Timur sebanyak 13 unit (11,50%), Kota barat 9 unit (7,96%), dan disusul kecamatan Duingingi 6 unit (5,31%). Koperasi konsumsi di Kota Gorontalo pada setiap kecamatan sangat memberikan manfaat bagi anggota, terutama dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan harga yang murah dan mudah. Oleh karena itu, koperasi jenis ini sangat dibutuhkan bagi anggota koperasi yang ada di Kota Gorontalo.

2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang sebagai anggota koperasi. Anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu barang dan jasa dan bersama-sama mengumpulkan modal (simpanan) untuk membangun sebuah perusahaan/koperasi (Anoraga Pandji, Widiyanti, 1997).

Koperasi Produksi ini didirikan untuk membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sifat koperasi produksi ini adalah semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang, semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli. Koperasi jenis ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo dengan jumlah total 118 unit yang terbagi atas jenis koperasi pertanian 5 unit, koperasi jasa 96 unit, dan koperasi perdagangan 17 unit (Tabel 3.9).

Tabel 3.9

Sebaran Jenis Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2010

Jenis Koperasi	Jumlah Kecamatan						Total
	Dungingi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	
Konsumsi	6	9	40	26	13	19	113
	5.31%	7.96%	35.40%	23.01%	11.50%	16.81%	100.00%
Produksi pertanian	1	0	2	0	1	1	5
	20%	0%	40%	0%	20%	20%	100%
Produksi jasa	10	10	32	12	23	9	96
	10%	10%	33%	13%	24%	9%	100%
Produksi perdagangan	1	1	5	4	4	2	17
	6%	6%	29%	24%	24%	12%	100%
	18	20	79	42	41	31	231
	8%	9%	34%	18%	18%	13%	100%

Sumber: Diskoperindagkot Kota Gorontalo 2010, diolah

Dari tabel di atas, jenis koperasi pertanian terbanyak terletak di Kota Selatan dengan jumlah 2 unit (40%), kemudian di Kecamatan Kota Timur dengan jumlah 1 unit (20%), disusul Kecamatan Utara dengan jumlah 1 unit (20%), Duingingi 1 unit (20%), sedangkan Kota Barat dan Kota Tengah tidak memiliki koperasi jenis ini (0%).

Berdasarkan tabel di atas, jenis koperasi jasa terbanyak terletak di Kota Selatan dengan jumlah 32 unit (33%), kemudian di Kecamatan Kota Timur dengan jumlah 23 unit (24%), disusul

Kecamatan Kota Tengah dengan jumlah 12 unit (13%), Dungingi dengan jumlah 1 unit (20%). Sedangkan jumlah terkecil adalah di Kota Barat, Dungingi 10 unit (10%), Kota Utara 9 unit (9%).

Berdasarkan data tabel di atas, jenis koperasi perdagangan terbanyak terletak di Kota Selatan dengan jumlah 5 unit (29%), kemudian di Kecamatan Kota Timur dan Kota Tengah dengan jumlah 4 unit (24%), disusul Kecamatan Kota Utara dengan jumlah 2 unit (12%), Dungingi dan Kota Barat dengan jumlah 6 unit (6%). Keberadaan koperasi pada setiap kecamatan sangat memberikan manfaat bagi anggota dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan anggota dapat terwujud.

I. Klasifikasi Koperasi Berdasarkan Hasil Penilaian Disperindagkop Kota Gorontalo Tahun 2010

Berdasarkan hasil penilaian Disperindagkop Kota Gorontalo tahun 2010, dari berbagai jenis koperasi yang ada, prestasi terbaik telah dicapai oleh koperasi konsumen/konsumsi, koperasi produsen dan koperasi jasa (lihat tabel 3.10).

Tabel 3.10
Klasifikasi Penilaian Koperasi Terbaik
Kota Gorontalo 2010

No	Nama Koperasi	Alamat	Hasil	
			Nilai	Kelas
	Koperasi Konsumen/Konsumsi			
1	KPRI Abdi Karya	Pemda Kota Gorontalo	87.75	A
2	Kopkar Tirta Bone	PDAM Kota Gorontalo	85.5	B
3	KPRI Mootame	SMPN 1 Kota Gorontalo	84	C
	Koperasi Produsen/Produksi			
1	Kopwan Sejahtera	Buladu Kota Barat	87.75	A
2	KUD Indah Jaya	Wonggaditi Kota Utara	79.75	B
3	Kopwan Seruni Mekar Indah	Ipilo Kota Timur	74.75	C
	Koperasi Jasa			
1	Kosika Ponuwa	Universitas Negeri Gorontalo	81.95	A
2	KSU Mitra Usaha	Tenilo Kota Barat	76.65	B
3	Kopma Huyula	Universitas Negeri Gorontalo	64	C

Sumber: Diperindagkop Kota Gorontalo 2011

Tabel 3.10 di atas merupakan penilaian koperasi terbaik yang dianggap mewakili setiap kecamatan berjumlah 9 unit koperasi, seperti: koperasi konsumen/konsumsi 3 unit, koperasi produsen/produksi 3 unit, koperasi dan koperasi jasa 3 unit dan setiap kecamatan terwakili sebagai klasifikasi koperasi terbaik tingkat Kota Gorontalo. Adapun penilaian koperasi terbaik yang dilaksanakan oleh Disperindagkop Kota Gorontalo adalah ingin memotivasi kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan aktivitas koperasinya dan memperbaiki kinerja dalam rangka mencapai prestasi koperasi menjadi lebih baik. Untuk itu, koperasi yang ada di wilayah Kota Gorontalo selalu berusaha melaksanakan kegiatan pengelolaan koperasi dengan baik, di mana hal ini juga dapat memberikan perhatian khusus dari setiap perbankan dalam memberikan bantuan dana dalam bentuk pinjaman, guna menambah modal yang dikelola pada koperasi sehingga anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan melalui organisasi koperasi.



BAB IV

PERKEMBANGAN DAN PERAN KOPERASI TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Deskripsi Karakteristik Responden

Koperasi di Kota Gorontalo berjumlah 231 unit, yang terdistribusi dalam tiga kategori kualitas koperasi, yaitu stagnan, berkembang dan kategori koperasi maju. Untuk itu dalam buku ini, akan dibahas penelitian dengan datanya diperoleh dari responden yang berjumlah 381 orang. Hal ini akan menjadi gambaran umum untuk dijadikan sampel dalam penelitian, yaitu karakteristik responden didasarkan pada kategori umur, jumlah anggota rumah tangga, dan tingkat pendidikan.

1. Umur Responden

Umur responden dari 381 orang diperoleh 122 orang (32%) yang berumur <40 tahun, 138 orang (36%) yang berumur antara 40-50 tahun, 116 orang (30%) yang berumur >50 tahun dan 5 orang. Umur responden ini dapat memengaruhi tingkat per-

kembangan koperasi sehingga koperasi dapat berhasil dalam mengembangkan usahanya (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1
Komposisi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Kualitas Koperasi						Total	
		stagnan		berkembang		maju			
		orang	%	orang	%	orang	%	orang	%
1	<40	37	30%	29	38%	56	32%	122	32%
2	40-50	46	37%	22	29%	70	40%	138	36%
3	>50	40	33%	26	34%	50	28%	116	30%
Jumlah		123	100%	77	100%	176	100%	376	99%

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 keterkaitan antara kategori kualitas koperasi dengan umur responden, dikatakan bahwa kategori koperasi stagnan, 37 responden (30%) umur kurang dari 40 tahun; 46 responden (37%) pada rentang umur antara 40-50 tahun; dan 40 responden (33%) umur lebih dari 50, dari total 123 responden pada koperasi kategori stagnan.

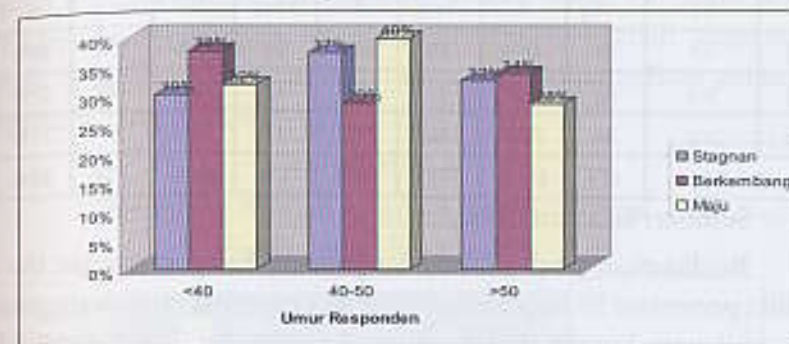
Untuk kategori koperasi berkembang tampak bahwa 29 responden (38%) umur kurang dari 40 tahun; 22 responden (29%) pada rentang umur 40-50 tahun; dan 26 responden (34%) umur lebih dari 50 tahun, dari total 77 responden pada koperasi kategori berkembang.

Untuk kategori koperasi maju, 56 responden (32%) umur kurang dari 40 tahun; 70 responden (40%) pada rentang umur 40-50 tahun; dan 50 responden (28%) umur lebih dari 50 tahun, dengan total 176 responden pada koperasi kategori maju.

Dari perbandingan kualitas koperasi dengan umur responden, bisa dinyatakan bahwa kualitas koperasi maju memiliki jumlah terbesar dari kualitas lainnya (176 orang) di mana responden pada kualitas koperasi kategori maju memiliki umur responden yang lebih tinggi adalah responden umur antara 40-50 tahun; 70 orang (40%) dan masih dalam umur yang produktif dan kinerjanya masih lebih besar bila dibandingkan dengan kualitas koperasi kategori

stagnan dan berkembang. Persentase responden berdasarkan umur ditampilkan dalam diagram batang berikut ini.

Gambar 4.1
Persentase Responden Berdasarkan Umur



Dari persentase responden sesuai umur dijelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan keanggotaan koperasi lebih dominan pada umur 40-50 yang memiliki kinerja dan semangat kerja yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap prospek koperasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Dengan demikian, kualitas koperasi kategori maju sangat ditentukan oleh kinerja dan semangat yang tinggi dari responden yang berumur antara 40-50 tahun sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik.

2. Jumlah Anggota Rumah Tangga Berdasarkan Responden

Kualitas koperasi di wilayah Kota Gorontalo dikaitkan dengan kategori stagnan, berkembang dan maju berdasarkan jumlah anggota rumah tangga. Hal ini terlihat sangat menarik perbedaannya sehingga keberadaan koperasi dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup para anggota serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, jenis kualitas koperasi baik stagnan, berkembang dan maju jika dikaitkan dengan jumlah anggota rumah tangga dengan total responden 334 orang bisa dilihat dalam tabel 4.2.

anggota sehingga dapat meningkatkan usaha koperasi.

Karakteristik responden jika dikaitkan dengan kualitas pendidikan anggota pada koperasi kategori "stagnan" menunjukkan bahwa (0%) yang berpendidikan SMP, 18 responden (15%) berpendidikan SMA, 5 responden (4%) berpendidikan diploma, 90 responden (73%) berpendidikan S1, 11 responden (9%) berpendidikan S2, sehingga total 124 responden untuk semua jenjang pendidikan pada koperasi kategori stagnan.

Untuk koperasi kategori "berkembang" menunjukkan bahwa 1 responden (1%) berpendidikan SMP, 21 responden (27%) berpendidikan SMA, 2 responden (3%) berpendidikan diploma, 51 responden (65%) berpendidikan S1, 3 responden (4%) berpendidikan S2, sehingga total 78 responden untuk semua jenjang pendidikan pada koperasi kategori berkembang.

Untuk koperasi kategori "maju", tampak bahwa sebanyak 0% yang berpendidikan SMP, 27 responden (15%) berpendidikan SMA, 9 responden (5%) berpendidikan diploma, 130 responden (73%) berpendidikan S1, 11 responden (6%) berpendidikan S2, sehingga total 177 responden dari semua jenjang pendidikan untuk koperasi kategori maju.

Kualitas koperasi di wilayah Kota Gorontalo dengan koperasi kategori "stagnan", "berkembang" dan "maju" berdasarkan tingkat pendidikan sangat bervariasi keberadaannya sesuai kategori koperasi berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjunjung tinggi solidaritas sesama anggota koperasi (Lihat tabel 4.3).

Tabel 4.3
Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kualitas Koperasi						Total orang
		stagnan		berkembang		maju		
		orang	%	orang	%	orang	%	
1	SMP	0	0%	1	1%	0	0%	1
2	SMA	18	15%	21	27%	27	15%	66

3	Diploma	5	4%	2	3%	9	5%	16	4%
4	S1	90	73%	51	65%	130	73%	271	71%
5	S2	11	9%	3	4%	11	6%	25	7%
Jumlah		124	100%	78	100%	177	100%	379	99%

Sumber: Hasil analisis

Untuk koperasi kategori berkembang menunjukkan bahwa 1 responden (1%) berpendidikan SMP, 21 responden (27%) berpendidikan SMA, 2 responden (3%) berpendidikan diploma, 51 responden (65%) berpendidikan S1, 3 responden (4%) berpendidikan S2, dengan total 78 responden untuk semua jenjang pendidikan pada koperasi kategori berkembang.

Untuk koperasi kategori maju, tampak bahwa 0% yang berpendidikan SMP, 27 responden (15%) berpendidikan SMA, 9 responden (5%) berpendidikan diploma, 130 responden (73%) berpendidikan S1, 11 responden (6%) berpendidikan S2, dengan total 177 responden dari semua jenjang pendidikan untuk koperasi kategori maju.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan responden jenjang pendidikan S1 masih mendominasi bahkan lebih tinggi persentasenya jika dibandingkan kualitas koperasi lainnya. Tingkat pendidikan pada koperasi kategori stagnan, berkembang dan maju persentasenya lebih tinggi adalah jenjang pendidikan S1 dengan rincian 130 orang (73%) disusul oleh koperasi kategori stagnan 90 orang (73%) dan koperasi kategori berkembang 51 orang (65%). Untuk itu, disimpulkan bahwa jenjang pendidikan S1 sangat tinggi persentasenya bila dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi di Kota Gorontalo.

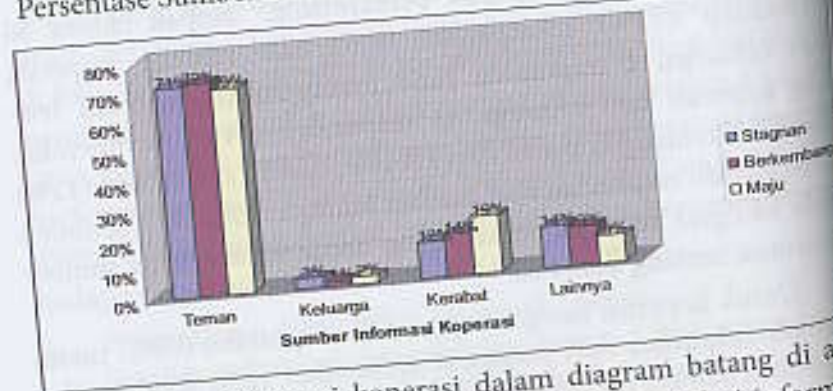
Pendidikan merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh pengurus dan anggota yang diikuti secara formal sehingga pengurus mempunyai bekal dalam menggerakkan dan memajukan koperasi untuk dapat berhasil dalam meningkatkan usahanya.

Sumber informasi koperasi dengan persentase tertinggi diperoleh dari teman dengan jumlah 123 orang (69%) dari koperasi kategori maju, disusul oleh koperasi kategori stagnan 88 orang (71%) dan koperasi berkembang 56 orang (72%). Berdasarkan sumber informasi responden bahwa koperasi kategori maju yang mendominasi jumlah tertinggi persentasenya adalah yang diperoleh dari teman. Hal ini yang membuat koperasi dapat berkembang dengan baik karena adanya pelayanan yang baik kepada teman-teman lainnya sehingga aktivitas koperasi dapat berjalan dengan baik.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota yang dikelola secara demokratis. Setiap anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi. Persentase responden berdasarkan sumber informasi tentang koperasi dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: teman, keluarga, kerabat dan sumber lainnya yang dapat mendukung perkembangan koperasi (lihat Gambar 4.4).

Gambar 4.4

Persentase Sumber Informasi Koperasi Berdasarkan Responden



Sumber informasi koperasi dalam diagram batang di atas menunjukkan bahwa persentase tertinggi berasal dari informasi yang disampaikan teman baik koperasi kategori stagnan, berkembang dan koperasi maju, sehingga jumlah anggota semakin bertambah banyak. Hal ini yang menyebabkan peminat untuk masi

menjadi anggota koperasi semakin bertambah dan berpengaruh terhadap perkembangan koperasi.

Berdasarkan wawancara dengan responden diperoleh berbagai informasi tentang alasan menjadi anggota koperasi adalah untuk menekan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha. Jika petani-petani kecil di pedesaan menyatukan usahanya ke dalam koperasi pertanian misalnya, beban usaha setiap petani akan berkurang dibandingkan kalau setiap petani mengerjakan usaha pertaniannya sendiri-sendiri. Misalnya, seorang petani yang memproduksi sayur-sayuran, jika segalanya dikerjakan sendiri mulai dari mencangkul tanah, merawat kebun sayuran, memetik hasilnya sampai membawanya ke pasar yang jauh dari desa, maka setiap kegiatan itu akan mengeluarkan biaya, yang tentunya akan lebih murah bila dilakukan bersama-sama. Untuk itu bila dikaitkan dengan keberadaan pengurus koperasi diharapkan dapat membawa amanah dan membangun rasa kebersamaan sesama anggota sehingga tercipta keharmonisan dalam koperasi sehingga koperasinya dapat berkembang dengan baik.

Adapun alasan responden menjadi anggota koperasi bisa dilihat dalam tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5

Alasan Responden Menjadi Anggota Koperasi

No	Alasan Ber Koperasi	Kategori Kualitas Koperasi						Total	
		Stagnan		Berkembang		Maju		orang	%
		orang	%	orang	%	orang	%		
1	Berorganisasi	50	40%	24	31%	64	36%	138	36%
2	Jadi Pengurus	0	0%	0	0%	4	2%	4	1%
3	Kesejahteraan	63	51%	42	54%	93	53%	198	52%
4	Otomatis	2	2%	2	3%	6	3%	10	3%
5	Mendapat Layanan	5	4%	2	3%	8	5%	15	4%
6	Meminjam/ menjual	2	2%	2	3%	1	1%	5	1%
7	Lainnya	2	2%	6	8%	1	1%	9	2%
Jumlah		124	100%	78	100%	177	100%	379	99%

Sumber: Hasil analisis

Dari diagram batang di atas, alasan responden menjadi anggota koperasi dari kategori kualitas koperasi yang menunjukkan persentase tertinggi adalah ingin meningkatkan kesejahteraan anggota melalui koperasi baik kualitas koperasi kategori stagnan, berkembang dan koperasi maju yang disusul oleh keinginan anggota untuk berkoperasi yang baik sehingga semua ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi di Kota Gorontalo.

5. Sebaran dan Perkembangan Koperasi

Jumlah sebaran koperasi di wilayah Kota Gorontalo adalah koperasi pemberi berbagai jenis jasa pelayanan, yang diharapkan dapat menunjang usaha-usaha ekonomi masyarakat sebagai anggota (unit usaha pertanian, satuan-satuan usaha dan rumah tangga), dengan menyediakan dan menawarkan barang dan jasa melalui penyaluran sarana produksi dan juga barang-barang konsumsi, kredit, pemasaran, pengolahan usaha lainnya.

Koperasi yang banyak dikembangkan adalah koperasi yang memberi pelayanan terpadu (*integrated co-operative*) atau 'koperasi penunjang produksi' (*production co-operative*). Koperasi serba-usaha (*multipurpose /multiproduce co-operatives*) atau koperasi konsumsi lebih dominan, dan diharapkan dapat menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Untuk meningkatkan 'efisiensi ekonomi' dari koperasi-koperasi primer, maka sering diadakan amalgamasi dalam rangka membentuk koperasi-koperasi yang berkedudukan di pusat-pusat administrasi tertentu dan bertugas melayani para anggota (kadang juga bukan anggota), yang tinggal di beberapa kelurahan/desa.

Jenis koperasi di Kota Gorontalo hanya terdapat empat jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi pertanian, koperasi produksi jasa, dan koperasi produksi perdagangan. Koperasi kredit dan koperasi serba usaha di wilayah kota memiliki koperasi produksi bidang perdagangan yang melakukan kegiatan penyediaan penjualan berbagai produk barang yang dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat, yang secara tidak langsung hal tersebut merupakan koperasi serba usaha, tetapi tidak tecermin

seperti dalam teori, yaitu koperasi serba usaha. Sedangkan koperasi kredit dalam praktiknya di Kota Gorontalo tecermin dalam koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan anggota dalam bentuk peminjaman uang/kredit dari koperasi dan penjualan barang-barang konsumsi lain yang dibutuhkan oleh anggota.

Adapun karakteristik pola sebaran koperasi di Kota Gorontalo berdasarkan lokasi pada setiap kecamatan dan jenis usaha koperasi ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Jumlah dan Jenis Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Gorontalo

No	Kecamatan	Jenis Koperasi								Jml. Unit	Jml. (%)
		Konsumsi		Produksi pertanian		Produksi Jasa		Produksi Perdagangan			
		Unit	(%)	Unit	(%)	Unit	(%)	Unit	(%)		
1	Dungingi	6	5	1	20	10	11	1	6	18	7,80
2	Kota Barat	9	8	0	0	10	11	1	6	20	8,70
3	Kota Selatan	40	35	2	40	32	34	5	29	79	34,20
4	Kota Tengah	26	23	0	0	12	13	4	24	42	18,20
5	Kota Timur	13	12	1	20	23	24	4	24	41	17,70
6	Kota Utara	19	17	1	20	9	9	2	12	31	13,40
Jumlah		113	100	5	100	95	100	17	100	231	100

Sumber: Diskoperindag Kota Gorontalo 2010, diolah

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Selatan merupakan wilayah yang sebaran jenis koperasinya paling banyak baik berdasarkan jumlah unit koperasi maupun jenisnya pada ke-6 kecamatan di Kota Gorontalo. Total jumlah koperasi yang tersebar di Kota Gorontalo, terdapat sejumlah 79 unit atau 34,2 % berada di lokasi Kecamatan Kota Selatan, kemudian disusul Kecamatan Kota Tengah sejumlah 42 unit atau 18,2 %, Kecamatan Kota Timur sejumlah 41 unit atau 17,7 %, Kecamatan Kota Utara sejumlah 31 unit atau 13,4 %, Kecamatan Kota Barat sejumlah 20 unit atau 8,7 % dan Kecamatan Dungingi sejumlah 18 unit atau 7,8 %. Persebaran koperasi pada setiap kecamatan lebih disebabkan karena pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terdapat di kecamatan tersebut.

Semakin besar jumlah penduduk dan jumlah toko yang berusaha pada satu daerah, akan semakin menguntungkan bagi gerakan koperasi untuk mendirikan sentra distribusinya. Lokasi pengembangan koperasi perlu didukung oleh fasilitas listrik, air, telepon, dan tempat parkir kendaraan yang memadai untuk memudahkan bagi anggota dan pelanggan berbelanja pada sentra distribusi.

Di beberapa kecamatan di Kota Gorontalo, jenis koperasi konsumsi di Kecamatan Kota Selatan jumlahnya lebih banyak dibanding kecamatan lainnya. Jenis koperasi konsumsi di Kota Selatan berjumlah 40 unit atau 35 %, Kota Tengah sejumlah 26 unit atau 23 %, di Kecamatan Kota Utara sejumlah 19 unit atau 17 %, di Kecamatan Kota Timur sejumlah 13 Unit atau 12 %, di Kecamatan Kota Barat sejumlah 9 unit atau 8 % dan di Kecamatan Duingingi 6 unit atau 5 %.

Dari sebaran koperasi konsumsi, bisa dilihat adanya pengelompokan dengan mengikuti arah pengembangan kawasan perdagangan dari pusat kota ke arah jalan Agus Salim di Kecamatan Kota Tengah sebagai pengembangan wilayah perdagangan baru dan sebagian wilayahnya merupakan lahan basah (persawahan) yang ditanami padi dan menghasilkan beras untuk kebutuhan masyarakat dengan tingkat kepadatan penduduk masih tergolong rendah (27.047 jiwa), bila dibandingkan dengan penduduk Kota Timur yang sangat tinggi (42.155 jiwa) dan Kota Selatan (35.988 jiwa), sehingga masih berpeluang untuk menumbuhkan organisasi koperasi di kalangan masyarakat di kota tersebut. Namun, dari sisi perkembangan jumlah dan jenis koperasi konsumsi kelihatan mengelompok yang ada di Kota Selatan, sedangkan koperasi konsumsi di Kota Tengah koperasinya menyebar pada setiap kelurahan sehingga dengan sendirinya anggota koperasi dan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya.

Fakta di atas sesuai pendapat Baswir (2012) bahwa keberadaan koperasi konsumsi merupakan koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis koperasi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang hendak dipenuhi melalui pendirian ko-

operasi yang bersangkutan. Koperasi konsumsi di lingkungan para buruh misalnya, menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sandang dan barang-barang keperluan sehari-hari lainnya. Koperasi konsumsi dalam lingkungan daerah pertanian, selain menjual barang-barang pokok, sering juga menjual bibit, semprotan, serta alat-alat pertanian. Sedangkan konsumsi dalam lingkungan para pelajar dan mahasiswa, biasanya mengonsentrasikan usahanya pada penjualan alat tulis, buku-buku serta alat-alat keperluan belajar lainnya.

Faktor keberhasilan utama dari jenis koperasi konsumsi adalah sentra distribusi, lokasi dan tempat usahanya. Berbeda dengan pola koperasi yang dianut selama ini yang bersedia dan berusaha di tempat terpencil dan jauh dari pusat kegiatan ekonomi rakyat. Berbagai literatur menunjukkan betapa perlunya pemilihan lokasi untuk pengembangan dan disiapkan dengan baik dalam menjamin keberhasilan usaha koperasi. Kesalahan dalam menentukan lokasi dan tempat usaha akan berakibat fatal terhadap kelanjutan badan usaha tersebut.

Lokasi memainkan peranan penting bagi suksesnya sebuah sentra distribusi. Lokasi yang baik sangat menentukan besarnya penjualan dan tingkat keuntungan yang diperoleh dari perputaran modal yang mungkin dicapai. Karenanya lokasi usaha harus berada pada tempat yang strategis yang mudah dicapai oleh anggota koperasi maupun masyarakat yang akan dilayani. Perhitungan yang paling utama dari penilaian lokasi adalah *luas dan kualitas trading area* (daerah perdagangan), karena menyangkut jumlah pelanggan potensial yang terdapat dalam area perdagangan tersebut.

Dalam mengembangkan saluran distribusi yang sangat membutuhkan dukungan gerakan koperasi setempat, terdapat empat pendekatan yang biasanya menjadi pertimbangan pokok masyarakat pembeli terhadap lokasi/tempat yaitu:

- a. Lokasi usaha dan sentra distribusi.
- b. Pemilihan komoditi yang ditangani.
- c. Pendekatan pelayanan terhadap pelanggan terutama kepada anggota koperasi.

beranggotakan para petani, buruh tani, serta mereka yang mempunyai sangkut paut secara langsung dengan usaha pertanian. Termasuk dalam kelompok koperasi pertanian adalah Koperasi Karet, Koperasi Tembakau dan Koperasi Cengkih.

c. Koperasi Produksi Jasa

Jenis Koperasi Produksi Jasa merupakan jenis koperasi yang jumlahnya terbesar kedua setelah jenis koperasi konsumsi di Kota Gorontalo. Total Jenis koperasi produksi jasa di Kota Gorontalo sejumlah 95 unit. Dari total jumlah tersebut, terdapat 32 unit koperasi atau 34% berada di Kecamatan Kota Selatan, 23 unit atau 24% berada di Kecamatan Kota Timur, 12 unit atau 13% berada di Kecamatan Kota Tengah, 9 unit atau 9% berada di Kecamatan Kota Utara, dan dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Duingi dan Kecamatan Kota Barat, masing-masing 10 unit atau 11% dari jumlah koperasi produksi jasa di Kota Gorontalo.

Menurut pendapat Baswir (2012), koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri. Perbedaannya adalah koperasi jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan utama pendirian koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Dengan menyatukan potensi ekonominya, masing-masing anggota koperasi jasa akan dapat mengembangkan potensi itu secara optimal. Contoh koperasi jasa adalah koperasi kredit, koperasi jasa angkutan dan koperasi jasa pemasaran.

Dalam UU No. 17/2012, tidak dikenal koperasi jenis ini sebagai suatu golongan koperasi yang berdiri sendiri. Namun, dalam praktik perkoperasian yang berlangsung di Indonesia pada umumnya berkelompok berdasarkan jenis anggotanya. Untuk itu, koperasi jenis ini diharapkan dapat menyatukan potensi yang ada agar kepentingan anggota dapat teratasi dan terlayani dengan baik.

Selanjutnya jenis koperasi produksi jasa dapat mengembangkan potensi yang ada secara optimal bahkan menawarkan produk barang dan jasa dengan harga yang murah, dengan menjadikan pelayanan sebagai motif utamanya, sehingga masyarakat yang

memiliki kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau. Dengan demikian, koperasi memiliki kekuatan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan perekonomian masyarakat. Dengan cara tersebut, koperasi akan memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai anggota koperasi. Selain itu, koperasi diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan ini hanya dapat dicapai oleh koperasi bila koperasi dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Jumlah jenis koperasi berdasarkan sebaran bila kaitkan dengan sebaran jumlah penduduk, tampak bahwa kepadatan dan jumlah penduduk di dua kecamatan ini merupakan jumlah penduduk terbesar dan terpadat di Kota Gorontalo, yaitu di Kecamatan Kota Timur 42.155 jiwa dan Kecamatan Kota Selatan 35.988 jiwa.

Perkembangan koperasi produksi jasa di Kota Gorontalo ini terjadi mengelompok, sebab kota ini merupakan pengembangan kota baru dengan persentase jumlah penduduk tertinggi 42.155 jiwa, dan berada pada wilayah pinggiran kota dan mempunyai potensi sebagai pusat bisnis yang berbatasan dengan kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan di Kecamatan Kota Selatan, sebarannya terpusat di tengah kota dan usaha koperasi sulit untuk dikembangkan lagi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang nyaman, karena jumlah penduduknya padat. Di Kota Tengah dan Duingi, koperasinya menyebar pada setiap kelurahan serta di Kota Barat merupakan daerah pegunungan yang berbatasan dengan kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

d. Koperasi Perdagangan

Jenis koperasi terbesar ketiga di Kota Gorontalo adalah koperasi perdagangan dengan jumlah 17 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 unit atau 29% di Kecamatan Kota Selatan, disusul oleh Kecamatan Kota Tengah dan Kota Timur masing-masing 4 unit atau

pengembangan kota sebagai pusat bisnis serta memiliki jumlah penduduk 27.047 jiwa.

Jenis koperasi konsumsi kategori 2 adalah Kota Utara dengan jumlah penduduk 33.149 jiwa dengan persentase 47,1%. Kota ini menjadi pengembangan kota baru, sehingga memberikan peluang usaha yang besar. Apalagi kota ini adalah pusat penghasil beras dengan daerah persawahan yang luas dibandingkan kota lainnya di Kota Gorontalo. Kategori 3 adalah Duingingi, dengan persentase 46,5% (lebih dari 60 anggota). Walaupun perbedaannya sangat kecil (0,6%), tetapi daerah ini merupakan pengembangan daerah baru yang memiliki daerah persawahan dan perkebunan yang luas sehingga potensi daerahnya sangat baik untuk dikembangkan.

Dari data yang ada, jumlah anggota koperasi dan jenis koperasi konsumsi dan produksi bisa kita jabarkan. Jumlah anggota terbanyak untuk jenis koperasi konsumsi persentase tertinggi 30-60 anggota, kurang dari 30 anggota, dan terendah lebih dari 60 anggota. Sedangkan persentase tertinggi untuk jenis koperasi bidang pertanian adalah kurang dari 30 anggota, 30-60 anggota, dan terendah lebih dari 60 anggota. Persentase tertinggi untuk jenis koperasi produksi bidang jasa adalah lebih dari 60 anggota, 30-60 anggota, dan terendah kurang dari 30 anggota. Persentase tertinggi untuk jenis koperasi produksi bidang perdagangan adalah kurang dari 30 anggota, lebih dari 60 anggota, dan terendah 30-60 anggota, tetapi daerahnya berpotensi untuk dikembangkan sejumlah unit koperasi di kalangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi di Kota Gorontalo, khususnya kawasan baru, memiliki sarana sebagai pusat pengembangan usaha pada bidang koperasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota agar bisa mencapai kesejahteraan.

Koperasi konsumsi sendiri adalah koperasi yang berusaha dalam bidang menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggota setiap hari (Baswir, 2010). Misalnya, barang-barang pangan (beras, gula), barang sandang (pakai-an dan tekstil), dan barang untuk keperluan sehari-hari seperti

sabun, minyak tanah, dan lain-lain. Oleh sebab itu, koperasi ini mengusahakan barang kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan anggota dan masyarakat dengan tujuan agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi berkualitas baik dengan harga yang layak pada koperasi. Dengan demikian, koperasi konsumsi ini berusaha untuk menyediakan atau mengadakan barang serta menjual kembali barang-barang tersebut dengan harga yang murah dan menyenangkan para anggota. Jenis konsumsi yang dilayani oleh koperasi konsumsi sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang hendak dipenuhi oleh koperasi.

Koperasi produksi bidang pertanian ternyata masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis koperasi yang berada di bagian Utara Kota Gorontalo yaitu Kota Tengah dan Kota Utara ini adalah termasuk koperasi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Jenis koperasi bidang pertanian tidak semata-mata berusaha menyelenggarakan produksi pertanian saja, namun juga berusaha membantu para anggotanya dalam mengelola hasil pertanian pada tingkat yang lebih tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya, membantu memasarkan hasil, membantu dalam penyediaan sarana-sarana pertanian (alat-alat pertanian, pupuk, obat-obat pemberantasan hama) dan membantu menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari para anggota dengan harga yang wajar dan dapat dibeli secara kredit serta menyediakan kredit investasi lainnya guna menunjang keberhasilan usaha tani. Sedangkan anggota koperasi produksi pertanian sendiri memiliki anggota yang signifikan, dan hal ini bisa dilihat dari persentase berikut: persentase tertinggi 4,40% untuk anggota kurang dari 30, anggota koperasi antara 30-60 dengan persentase 1,60 % dan jumlah anggota lebih dari 30 dengan persentase 1,00%.

Dalam koperasi lainnya, yakni koperasi bidang jasa, akan menyediakan jasa bagi anggota maupun masyarakat. Contoh dari koperasi ini adalah koperasi angkutan, koperasi jasa audit, hotel/restoran dan jasa pariwisata, dan koperasi lain semacamnya yang dapat memberikan jasa kepada anggota. Oleh karena itu, koperasi produksi bidang jasa sangat dibutuhkan dan dikembangkan di kalangan para anggota dan masyarakat.

B. Tingkat Perkembangan Koperasi

1. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jumlah Unit Usaha

Perkembangan jumlah unit Koperasi di Kota Gorontalo menunjukkan trend naik yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 0,75%. Perkembangan koperasi periode enam tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Perkembangan Jumlah Koperasi di Kota Gorontalo
Periode Tahun 2005-2010

No.	Tahun	Jumlah (Unit)	Jumlah (%)	Perkembangan (%) / tahun
1	2005	183	14,38	0
2	2006	191	15,00	0,62
3	2007	211	16,57	1,57
4	2008	226	17,75	1,18
5	2009	231	18,15	0,4
6	2010	231	18,15	0
Jumlah			100	3,77
Rata-rata Jumlah 212,17		Rata-rata pertumbuhan 0,75		

Sumber: Disperindagkop Kota Gorontalo 2011

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2007 merupakan tingkat kenaikan perkembangan jumlah koperasi yang paling tinggi, yaitu mencapai 1,57% (naik 20 unit). Setelah tahun 2007, perkembangan jumlah koperasi cenderung menurun, tetapi jika dilihat dari jumlah unit mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena: 1) semakin berkurangnya keinginan untuk berkoperasi, 2) pengelolaan usaha koperasi yang belum baik, 3) kemampuan dan kejujuran manajemen koperasi yang kurang baik, dan 4) perhatian pemerintah pada koperasi juga sangat minim sehingga pembinaan dan pengawasan ke koperasi tidak memadai.

2. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Jumlah Permodalan

a. Omset

Omset yang dimiliki koperasi juga dapat bersumber dari perkembangan usaha serta modal (Tabel 4.10).

Tabel 4.10

Perkembangan Omset Koperasi di Kota Gorontalo 2005-2010

No	Tahun	Omset (Rp)	Omset (%)	Perkembangan (%) / tahun
1	2005	51.181.668,00	7,77	7,77
2	2006	61.877.771,00	9,39	1,62
3	2007	66.279.137,00	10,06	0,67
4	2008	359.143.732,00	54,49	44,43
5	2009	55.962.265,00	8,49	-46,00
6	2010	64.672.278,00	9,8	1,31
Jumlah			100,00	100,00
Rata-rata		109.852.708,00	Pertumbuhan rata-rata 0,34%	

Sumber: Disperindagkop Kota Gorontalo, 2011

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perubahan omset koperasi di kota Gorontalo dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rata-rata perubahan sebesar 16,67% atau rata-rata omzetnya dalam enam tahun terakhir sebesar Rp. 109.852.708. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan tingkat perputaran piutang yang tidak mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan bahwa perkembangan omset dalam usaha koperasi di Gorontalo bervariasi dan besarnya mengalami peningkatan pada tahun 2005-2007 sebesar 7,77% sampai 10,06%. Sedangkan tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai 54,49% (Rp. 359.143.732) atau 6 kali lipat dari tahun sebelumnya, di mana pemerintah pusat memberikan suntikan dana kepada setiap koperasi dengan bunga yang rendah sehingga banyak pengurus pada saat itu terlena dan terjadi penyalahgunaan dana koperasi. Tahun 2009, persentasenya turun mencapai 8,49% (Rp. 55.962.265) dan 2010 kembali mengalami peningkatan mencapai 9,80% (Rp. 64.672.278). Jika dibandingkan dengan jumlah omzet tahun 2008, hal ini merupakan peningkatan yang sangat tinggi yakni sebesar 54,49% (Rp. 359.143.732), dan jumlah tersebut digunakan untuk memupuk dana yang dikelola pada koperasi. Oleh karena itu, perkembangan jumlah omset koperasi pada saat ini kembali mengalami peningkatan dan berjalan dengan baik, karena rasa solidaritas yang tinggi dari para anggota.

enam tahun terakhir sebesar Rp. 111.972.197. Perkembangan tahun 2005-2009 kecenderungannya meningkat untuk tahun 2009 sebesar Rp. 245.114.302, (36,48%). Hal ini disebabkan oleh adanya banyak CPNS yang masuk menjadi anggota baru sehingga menyebabkan jumlah modal sendiri meningkat. Sedangkan tahun 2010 menurun mencapai Rp. 29.508387 (4,39%), dan hal ini disebabkan oleh anggota koperasi yang menarik simpanan sukarelanya yang digunakan dalam merayakan hari raya dan kepentingan lain sehingga menyebabkan menurunnya modal sendiri di wilayah Kota Gorontalo.

Adapun rincian yang menjadi sumber modal koperasi (G. Kartasapoetra dkk, 2000) adalah sebagai berikut:

Pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

Kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan, dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Ketiga, Simpanan khusus/lain-lain seperti simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), simpanan qurban, dan deposito berjangka.

Keempat, dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Kelima, hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak lain sebagai berikut:

- a) Anggota dan calon anggota
 - b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
 - c) Bank dan lembaga keuangan bukan bank serta lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Sumber lain yang sah.
- 3) Modal dari Luar (Pinjaman)

Perkembangan modal dari luar (pinjaman) dalam 6 tahun terakhir yang dimiliki koperasi di wilayah Kota Gorontalo bisa dilihat dalam tabel 4.13.

Tabel 4.13

Perkembangan jumlah modal luar koperasi
Kota Gorontalo 2005-2010

No	Tahun	Modal Luar (Rp)	Perkembangan (%)
1	2005	21.329.440	2,21
2	2006	23.786.426	2,46
3	2007	257.956.719	26,68
4	2008	281.754.121	29,14
5	2009	336.660.189	34,82
6	2010	45.308.089	4,69
Rata-rata		161.132.497	16,67

Sumber: Disperindagkop Kota Gorontalo, 2011

Dari Tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan modal dari luar (pinjaman) koperasi di Kota Gorontalo dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata perkembangan sebesar 16,67% atau rata-rata modal sendiri dalam enam tahun terakhir sebesar Rp. 161.132.497.

Tabel 4.15

Jumlah Aset Koperasi (Rp 000) dan Jenis Koperasi
di Kota Gorontalo 2010

No	Jenis Koperasi	Klasifikasi Jumlah Aset (%)			Total (%)
		<Rp. 5200	Rp. 5200- Rp. 10400	>10400	
1	Konsumsi	15,20	4,09	46,78	66,08
2	Produksi Pertanian	1,17	0,58	1,17	2,92
3	Produksi Jasa	13,45	4,09	3,51	21,05
4	Produksi Perdagangan	4,68	0,58	4,68	9,94
	Jumlah	34,50	9,36	56,14	100,00

Sumber: Diskoperindagkop Kota Gorontalo 2010, diolah

Berdasarkan data tabel tentang jumlah aset koperasi dan jenis koperasi, tampak bahwa untuk jenis koperasi konsumsi, persentase tertinggi adalah 46,78% aset yang jumlahnya lebih dari Rp. 10.400.000; 15,20% aset kurang dari Rp. 5.200.000; dan terendah 4,09% untuk aset dalam rentang Rp. 5.200.000-10.400.000. Aset tertinggi untuk jenis koperasi produksi bidang pertanian kurang dari Rp 5.200.000 dan lebih dari Rp 10.400.000 masing-masing (1,17%) dan terendah 0,58% untuk aset antara 5.200.000-10.400.000. Aset tertinggi jenis koperasi produksi bidang jasa adalah 3,51% dalam aset lebih dari 10.400.000; aset kurang dari Rp. 5.200.000; dan terendah 4,09% aset dalam rentang Rp. 5.200.000-Rp. 10.400.000. Aset tertinggi jenis koperasi produksi bidang perdagangan adalah 4,68% aset kurang dari Rp. 5.200.000, dan 4,68% jumlah aset lebih dari Rp. 10.400.000. Dengan demikian, klasifikasi jumlah aset persentase tertinggi secara keseluruhan adalah jenis koperasi konsumsi dengan persentase 66,08%, sehingga jenis koperasi ini perlu mendapat perhatian pengurus untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah khususnya untuk dikembangkan di kalangan masyarakat, di mana anggota dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dan kesejahteraan dapat terwujud.

Selanjutnya klasifikasi jumlah aset tertinggi kedua adalah jenis koperasi jasa dengan total persentase 21,05%, hal ini juga

perlu mendapatkan perhatian dari pengurus untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah khususnya untuk dikembangkannya dikalangan masyarakat, dimana anggota dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi.

Aset koperasi merupakan kekayaan koperasi yang dapat digunakan untuk mempertahankan jalannya organisasi koperasi dimana dari setiap jenis koperasi yang ada yaitu koperasi konsumsi dan koperasi produksi bidang pertanian, jasa dan perdagangan, secara keseluruhan berjalan lancar dan masih didominasi oleh koperasi konsumsi dengan persentase tertinggi 66,08% dan jumlah persentase terkecil adalah jenis koperasi produksi pertanian karena di Kota Gorontalo untuk areal pertanian semakin berkurang yang disebabkan oleh adanya areal tersebut sudah banyak yang digunakan untuk pembangunan rumah penduduk tetapi koperasi di Kota Gorontalo masih perlu untuk dikembangkan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya secara bersama untuk mencapai kemakmuran anggota masyarakat.

Dengan melihat jumlah persentase setiap jenis koperasi maka jenis koperasi konsumsi yang masih mendominasi jumlah tertinggi 66,08% yang disebabkan masyarakat sangat peduli terhadap keberadaan koperasi sehingga koperasinya perlu untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah daerah untuk mengembangkan dikalangan masyarakat sehingga para anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi secara bersama.

Aset koperasi di Kota Gorontalo banyak yang mengelompok di satu kecamatan tertentu, misalnya di Kota Tengah dan Kota Timur, karena kota ini merupakan pengembangan kota baru dan pusat bisnis. Sedangkan di Kota Selatan yang jumlah penduduknya berada pada urutan ke-2 (35.988 jiwa) setelah Kota Timur yang sebesar 42.155 jiwa sudah sulit pengembangannya, karena daerahnya termasuk daerah yang padat penduduk. Oleh karena itu, besar peluang bagi kecamatan lainnya untuk mengembangkan koperasi menjadi lebih baik dan di Kota Timur sebagai daerah pengembangan kota baru di Kota Gorontalo, walaupun kecamatan tersebut berada di daerah pinggiran kota sebagai daerah baru yang dikembangkan.

Pengertian aset atau aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan, seperti kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tak terwujud, dan lain-lain. Pengertian aktiva tetap (Harnanto, 1991) adalah salah satu unsur penting yang perlu menjadi fokus perhatian bagi perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dan menghasilkan pendapatan.

Aktiva tetap meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk digunakan secara aktif dalam operasi perusahaan, dan mempunyai masa kegunaan relatif permanen. Aktiva tetap berwujud yang mempunyai masa kegunaan yang terbatas harus didepresiasi selama masa kegunaannya, yang disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya. Sedangkan yang termasuk dalam golongan aktiva ini adalah bangunan, mesin dan alat-alat pabrik, mebel dan alat-alat kantor, kendaraan dan alat-alat transport, serta alat kerja bengkel. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud meliputi hak-hak preferensi (istimewa) yang dijamin oleh undang-undang, kontrak, perjanjian-perjanjian yang mempunyai masa manfaat dalam waktu relatif permanen jika dibandingkan dengan lainnya.

Sedangkan jumlah aset koperasi bidang jasa menunjukkan bahwa koperasi bidang jasa dengan persentase tertinggi berada pada rentang jumlah aset Rp. 5.200.000–Rp. 10.400.000, dengan persentase tertinggi 43,8%; jumlah aset lebih dari Rp. 10.400.000, dengan persentase 42,3%; dan jumlah aset kurang dari Rp. 5.200.000, dengan jumlah persentase 39,0%. Klasifikasi jumlah aset tertinggi-kedua adalah jenis koperasi konsumsi yang kurang dari 5.200.000 dengan persentase 44,1 %, dan sisanya dengan jumlah aset lebih besar 10.400.000.- dengan persentase 51,3%. Untuk itu, koperasi konsumsi sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat dan perlu pengembangan guna melayani kebutuhan anggota.

Dari data ini juga diketahui bahwa jumlah koperasi produksi bidang jasa mengelompok di Kota Tengah yang menjadi kota pengembangan baru, sedangkan di Kota Utara dan Duingingi menyebar di daerah pinggiran kota dengan Kota Selatan menjadi kota terpadat penduduknya sehingga agak sulit untuk dikembangkan

koperasi bidang jasa. Untuk itu, koperasi bidang jasa masih besar harapan untuk dikembangkan, apalagi daerah pinggiran kota merupakan pengembangan daerah baru di wilayah Kota Gorontalo.

Jasa sendiri adalah setiap tindakan atau yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun. Hasilnya, bisa tidak terikat pada suatu produk bahkan sifatnya hanya penghubung saja. Dalam hubungan dengan aset koperasi, bidang jasa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup layak. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif tinggi karena terbatasnya karakteristik fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan. Untuk jasa, kualitas apa dan bagaimana yang diterima konsumen umumnya tidak diketahui sebelum jasa bersangkutan dikonsumsi.

Untuk aset koperasi bidang perdagangan, jumlah aset koperasinya bisa dilihat sebagai berikut: persentase tertinggi yaitu 13,6% berada pada jumlah aset kurang dari Rp 5.200.000, dengan keberadaan jumlah aset koperasinya menyebar di Kota Utara dan Kota Tengah dan dalam rentang Rp.5.200.000–Rp.10.400.000 dengan persentase 6,3%, sedangkan yang lebih dari Rp. 10.400.000 dengan persentase 5,1%. Keberadaan koperasi ini menyebar di Kota Utara dan Kota Tengah. Kedua kota ini mempunyai potensi untuk pengembangan kota baru sebagai pusat bisnis. Untuk itu, jumlah koperasi bidang perdagangan memiliki potensi untuk dikembangkan dan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan anggota.

Secara umum, perkembangan koperasi di Kota Gorontalo pada dasarnya menunjukkan kemajuan yang baik di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah omset koperasi yang ada di Gorontalo ini (Lihat Tabel 4.16).

Timur, sedangkan di Kota Utara dan Duingi menyebar dan berada pada daerah pinggiran kota. Hal ini berarti keberadaan anggota koperasi konsumsi terbesar berada di pusat kota.

Perkembangan jumlah omset koperasi saat ini mengalami peningkatan dan berjalan dengan baik, karena keanggotaan koperasi memiliki rasa solidaritas yang cukup tinggi dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan koperasi dengan baik. Keberadaan koperasi pada saat ini sebenarnya cukup besar untuk dikembangkan dengan baik di masa mendatang, karena rasa kebersamaan masyarakat sebagai anggota sangat tinggi dalam pembangunan koperasi. Keberhasilan koperasi merupakan suatu hal yang mutlak dicapai, sehingga koperasi dapat melahirkan kader wirausaha koperasi yang dapat mengembangkan usaha koperasinya dengan baik, sehingga ke depan koperasi ini dapat bersaing dengan badan usaha lainnya di daerah, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai anggota.

Sedangkan omset koperasi bidang pertanian dengan persentase tertinggi adalah sebesar 2,5% dengan omset lebih besar dari Rp. 9.300.000, dan 1,7% omset kurang dari Rp 4.650.000. Jika dibandingkan dengan jumlah omset koperasi konsumsi, koperasi pertanian itu lebih besar, yang disebabkan karena omset pada koperasi merupakan peningkatan hasil dari pengelolaan dana koperasi yang disalurkan/dipinjamkan kepada anggota dan koperasi berusaha untuk melayani anggota dengan baik yang didasari atas kebersamaan dan solidaritas sesama anggota yang sangat tinggi sehingga koperasinya berhasil dengan baik.

Untuk jenis koperasi jasa, persentase tertinggi adalah 50% omset dalam rentang jumlah Rp. 4.650.000-9.300.000. Ada juga yang jumlahnya lebih dari 9.300.000 atau sebesar 41,1%, sedangkan omset kurang dari Rp. 4.650.000 merupakan persentase terendah yaitu 40,7%. Untuk omset dalam rentang Rp. 4.650.000-9.300.000,- Keberadaan omset bidang jasa sebesar 50% merupakan jumlah omset koperasi yang mampu berjalan dengan baik dan masih mendominasi dari jumlah omset jenis koperasi lainnya di wilayah Kota Gorontalo. Dengan demikian, jumlah omset koperasi

bidang jasa masih dibutuhkan untuk dikembangkan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anggota masyarakat.

Sedangkan omset koperasi bidang perdagangan pada wilayah Kota Tengah bersifat mengelompok, sedangkan pada Kota Utara dan Duingi bersifat menyebar. Namun, yang berada di pinggiran kota menjadi pengembangan wilayah kota baru yang merupakan pusat pengembangan bidang perdagangan guna melayani kebutuhan anggota. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi ini diharapkan tidak hanya mendistribusi barang saja, tetapi juga dapat memproduksi barang-barang yang dibutuhkan anggota, serta berusaha memperoleh barang-barang yang dibutuhkan anggota dari pedagang besar (grosir) atau memperoleh langsung dari pabrik yang menghasilkan barang-barang tersebut, dengan harapan anggota dapat membeli dengan harga yang murah.

Dari segi omsetnya, persentase tertinggi dari koperasi perdagangan adalah omset yang kurang dari 4.650.000 dengan persentase 8,5%. Jumlah omset lebih dari 9.300.000 dengan persentase 7,6% dan omset dalam rentang 4.650.000-9.300.000 dengan persentase terendah 0%. Jumlah omset dan jenis koperasi bidang perdagangan menyebar pada wilayah Kota Tengah, Kota Utara dan Duingi sebagai pengembangan daerah baru. Walaupun berada di daerah pinggiran kota, tetapi kota ini memiliki potensi untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perhatian pemerintah untuk mengembangkan pusat perdagangan berada pada pinggiran kota adalah jauh lebih bijaksana, sebab di pusat kota penduduknya sudah sangat padat sehingga sulit untuk berkembang.

Perkembangan koperasi di Kota Gorontalo dari sisi jumlah modal menurut jenis koperasinya pada tahun 2010 bisa dilihat dalam Tabel 4.17.

produksi bidang pertanian dengan persentase tertinggi ketiga, yakni koperasi dengan klasifikasi modal Rp. 10.400.000 (1,3%).

Koperasi jasa dan perdagangan merupakan jenis koperasi dengan klasifikasi modal lebih tinggi dari jenis koperasi produksi bidang pertanian. Untuk itu, koperasi konsumsi dalam kegiatannya diharapkan jangan hanya berfungsi dalam mendistribusi barang saja, tetapi juga dapat memproduksi barang-barang yang dibutuhkan anggota, serta berusaha memperoleh barang-barang yang dibutuhkan anggota dari pedagang besar (grosir) atau memperoleh langsung dari pabrik yang menghasilkan barang-barang tersebut. Harapannya, anggota masyarakat dapat membeli barang dengan harga yang murah dan mudah mendapatkan barangnya.

Untuk koperasi pertanian, jumlah modal yang menempati persentase tertinggi adalah sebesar 4,3% dari jumlah modal dalam rentang Rp. 5.200.000-Rp.10.400.000. Dari jumlah modal koperasi lebih kecil Rp. 3.750.000 dengan persentase 3,4%, jumlah modal di atas Rp. 10.400.000 dengan jumlah persentase 1,3%. Modal tertinggi untuk jenis koperasi produksi bidang pertanian adalah 4,3%. Hal ini berarti bahwa koperasi pertanian itu minim partisipasi, tetapi jenis koperasinya perlu dikembangkan, karena keberadaan koperasi di Kota Gorontalo wilayah utara sangat dibutuhkan oleh para petani (menyebarkan). Sebab di wilayah tersebut memiliki lahan basah/persawahan yang menghasilkan padi (beras) untuk kebutuhan masyarakat dan koperasi ini perlu dikembangkan di kalangan anggota masyarakat.

Sedangkan untuk koperasi produksi bisang jasa, jumlah modal dengan persentase tertinggi berada pada jumlah modal Rp. 10.400.000 (46,7%), jumlah modal dalam rentang Rp. 5.200.000-10.400.000 dengan persentase 34,8%, dan jumlah modal kurang dari Rp. 5.200.000 dengan jumlah persentase 31,0%. Hal ini berarti bahwa jumlah modal untuk koperasi produksi bidang jasa (menyebarkan) di Kota Tengah di mana Kota Tengah sebagai kota pengembangan baru, di pinggiran kota, dan memiliki potensi untuk dapat berkembang dengan baik serta berada di jalan utama ke arah barat yang berbatasan dengan kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

sebagai pintu utama memasuki wilayah Kota Gorontalo. Kota Selatan sendiri termasuk kota padat penduduk sehingga agak sulit untuk dikembangkan koperasi bidang jasa.

Sedangkan modal untuk koperasi bidang perdagangan persentase tertingginya berada pada rentang jumlah modal Rp. 5.200.000-10.400.000 (13,0%), jumlah modal kurang dari Rp. 3.750.000 dengan persentase 10,3%, dan jumlah modal lebih dari Rp 10.400.000 dengan jumlah persentase 5,3%. Hal ini berarti bahwa jumlah modal koperasi produksi bidang perdagangan menyebar di Kota Tengah sebagai pengembangan daerah baru, di Kota Utara dan Duingi menyebar secara merata di daerah pinggiran kota. Untuk itu, koperasi bidang perdagangan masih besar harapan untuk dikembangkan dengan baik.

4. Kontribusi Koperasi Terhadap Perekonomian Masyarakat

Perkembangan koperasi pada masing-masing kelurahan/desa ditunjukkan oleh pergerakan dan aktivitas ekonomi yang ada di dalamnya. Salah satu aktivitas yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan koperasi pada setiap kelurahan/desa di Kota Gorontalo adalah aktivitas di bidang perkoperasian.

Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 231 unit koperasi telah berdiri di Kota Gorontalo. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 183 unit (tahun 2005). Sebaran koperasi pada setiap kecamatan di wilayah Kota Gorontalo sendiri diketahui bahwa Kecamatan Kota Selatan memiliki unit koperasi dalam jumlah paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 79 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap koperasi sangat tinggi yang ditandai dengan tingginya jumlah unit koperasi yang ada di Kota Selatan. Walaupun di sisi lain perolehan sisa hasil usaha (SHU)nya lebih tinggi di Kota Tengah sebesar Rp. 3.461.955.000.

Jumlah kelurahan dan jenis koperasi menurut kecamatan yang ada di wilayah Kota Gorontalo tahun 2010 yang melakukan kegiatan usahanya dalam melayani kebutuhan anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilihat dalam Tabel 4.18.

koperasi hanya 42 unit jika dibandingkan dengan jumlah unit koperasi di Kota Selatan.

Oleh karena itu, jika dilihat dari jenis koperasi dengan jumlah unit koperasi pada setiap kecamatannya, terjadi suatu peningkatan secara melembaga, tetapi secara umum peningkatannya relatif saja. Keberadaan koperasi dari sisi tipe antara kota dan desa perkembangannya tentu berbeda, di mana jenis koperasi di wilayah kota kemajuannya cukup baik, sebab koperasi ini berada di tengah-tengah masyarakat yang banyak menggunakan jasa koperasi sehingga jumlah sisa hasil usaha meningkat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan koperasi dari sisi tipe antara kota dan desa adalah dalam rangka ingin melihat koperasi sebagai dunia usaha. Oleh karena itu, program pemerintah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap koperasi dalam rangka mengembangkan usaha dan menghasilkan koperasi yang tumbuh dan berperan secara mikro dan makro. Sebagai wujud nyata peran koperasi dalam pembangunan wilayah, indikator dan variabel harus terlihat jelas dan terukur sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan performa koperasi dalam pembangunan wilayah.

Tabel 4.20

Tipe Koperasi Menurut Karakteristik
Desa dan Kota di Kota Gorontalo, 2010

Tipe Koperasi	Desa	Kota	Total (%)
1. Konsumsi	2,16	47,75	48,92
2. Produksi:			
a. Pertanian	0,00	2,16	2,16
b. Jasa	0,43	41,13	41,56
c. Perdagangan	0,43	6,93	7,36
Jumlah	3,03 (N=7)	96,97,0 (N=224)	100,00

Sumber: Diskoperindagkop Kota Gorontalo 2010, diolah.

Dari tabel di atas, tampak bahwa koperasi menurut karakteristik desa dan kota dapat berkembang baik untuk koperasi konsumsi, bahkan koperasi produksi juga sangat baik menurut karakteristik desa dan kota. Adapun jumlah persentase tertinggi menurut karakteristik desa untuk tipe koperasi konsumsi adalah sebesar 2,16%, dan persentase tipe koperasi kota sebesar 47,75%. Jumlah koperasi produksi bidang pertanian, jumlah persentase menurut desa adalah 0,00%, sedangkan jumlah koperasi produksi bidang pertanian menurut kota adalah 2,16%. Jumlah koperasi produksi bidang jasa menurut tipe desa adalah 0,43% dan kota sebesar 41,13%. Sementara untuk jumlah koperasi menurut tipe desa dan kota bidang perdagangan berturut-turut adalah sebesar 0,43% dan 6,93%. Dengan demikian, tipe koperasi desa memiliki persentase tertinggi di tipe koperasi konsumsi (2,16%). Oleh sebab itu, kepedulian masyarakat terhadap koperasi konsumsi semakin tinggi jika dibandingkan dengan tipe koperasi lainnya. Perkembangan koperasi yang ada di kota memberikan kesan bahwa di kota koperasinya mudah dijangkau dan masalah transportasi lancar sehingga mendorong masyarakat untuk memajukan koperasi, sedangkan koperasi yang ada di daerah pinggiran kota juga perlu diperhatikan perkembangannya karena memiliki potensi untuk dikembangkan.

Tipe koperasi menurut karakteristik desa maupun kota untuk koperasi konsumsi total persentasenya adalah sebesar 48,92%. Jumlah persentase tipe koperasi kota untuk koperasi konsumsi 46,75% dan mendominasi koperasi lainnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tipe koperasi kota masyarakatnya memiliki rasa kepedulian cukup tinggi daripada yang ada di desa. Adapun koperasi menurut karakteristik desa dan kota, keberadaannya menyebar di Kota Tengah, Duingingi dan Kota Utara. Sedangkan di Kota Selatan berada di pusat kotanya, sehingga peluang untuk berkembang sulit. Karakteristik koperasi yang ada di desa memiliki potensi untuk berkembang dengan baik, misalnya sebagian besar rumah tempat tinggal sudah dijadikan tempat usaha/toko, karena lahan yang ada sudah tidak tersedia lagi (sempit) dari sisi penggunaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

Tabel 4.21

Distribusi Jumlah Anggota Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Gorontalo, 2010

Jumlah Anggota	Dungingi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Total (%)
<30 anggota	2,16	2,60	8,23	5,19	5,63	5,63	29,44
30-60 anggota	3,90	2,16	9,52	3,46	5,19	2,60	26,84
>60 anggota	1,73	3,90	16,45	9,52	6,93	5,19	43,72
Jumlah	7,79 (N=18)	8,66 (N=20)	34,20 (N=79)	18,18 (N=41)	17,75 (N=42)	13,42 (N=31)	100,00 (N=231)

Sumber: Diskoperindagkop Kota Gorontalo 2010, diolah

Dari tabel di atas, jumlah anggota yang kurang dari 30 anggota adalah di Kota Selatan dengan persentase 8,23% atau yang tertinggi dari semua jumlah anggota menurut kecamatan yang ada di Kota Gorontalo, Kota Timur dan Kota Utara masing-masing memiliki persentase 5,63%, Kota Tengah 5,19%, Kota Barat 2,60% dan Dungingi 2,16%, sehingga distribusi jumlah anggota tertinggi didominasi oleh kecamatan kota Selatan 8,23%.

Untuk jumlah anggota antara 30-60 anggota, distribusi jumlah anggota untuk kecamatan Kota Selatan sebanyak 9,52% yang mendominasi dalam jumlah tertinggi. Sedangkan Kota Timur 5,19%, Dungingi 3,90%, Kota Tengah 3,46%, Kota Utara 2,60%, dan terendah Kota Barat 2,16%. Distribusi jumlah anggota koperasi yang lebih dari 60 anggota untuk Kota Selatan adalah sebesar 16,45% yang ini berarti mendominasi jumlah tertinggi, sedangkan Kota Tengah 9,52%, Kota Timur 6,93%, Kota Utara 5,19%, Kota Barat 3,90%, dan terendah Kecamatan Dungingi 1,73%.

Dari ini bisa dilihat bahwa jumlah anggota kurang dari 30, antara 30-60 dan lebih dari 60 pada setiap kecamatan di wilayah Kota Gorontalo masih termasuk jumlah anggota yang sifatnya me-

ngelompok, dan juga ada yang menyebar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini masih dibutuhkan masyarakat di wilayah Kota Gorontalo dalam rangka untuk mengembangkan usaha para anggota dan masyarakatnya. Perkembangan jumlah anggota dapat meningkatkan modal koperasi sehingga masyarakat sebagai anggota dapat terlayani kebutuhannya. Dengan sendirinya, anggota tersebut dapat mengembangkan usaha sendiri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya, walaupun anggota tersebut berada di wilayah pinggiran kota termasuk daerah Dungingi yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota baru.

Perkembangan aset koperasi di Kota Gorontalo setiap tahun mengalami peningkatan, walaupun dari sisi analisisnya setiap kecamatan peningkatan jumlah asetnya tidak merata (lihat Tabel 4.22).

Tabel 4.22

Distribusi Aset Koperasi menurut Kecamatan di Kota Gorontalo, 2010

Jumlah Aset	Dungingi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Total (%)
<5200	1,73	1,30	9,52	4,76	4,76	3,46	25,54
5200-10400	0,00	0,87	3,03	0,00	1,73	1,30	6,93
>10400	6,06	6,49	21,65	13,42	11,26	8,66	67,53
Total	7,79 (N=18)	8,66 (N=20)	34,20 (N=79)	18,18 (N=42)	17,75 (N=41)	13,42 (N=31)	100,00 (N=231)

Sumber: Diskoperindag Kota Gorontalo 2010, diolah

Dari data tabel di atas, jumlah aset kurang dari 5.200.000 di Kota Selatan persentasenya adalah 9,52%, Kota Tengah dan Kota Timur masing-masing 4,76%, Kota Utara 3,46%, Dungingi 1,73%, dan Kota Barat 1,30%. Untuk jumlah aset antara 5.200.000-10.400.000, Kota Selatan 3,03%, Kota Timur 1,73%, Kota Utara 1,30%, Kota Barat 0,87%, dan Kecamatan Kota Tengah dan Ke-

di kalangan masyarakat masih dibutuhkan karena koperasi ini merupakan wadah sosial yang melayani kepentingan masyarakat yang ekonominya lemah untuk diberi semangat berusaha agar dapat mencapai kemakmuran secara bersama.

Modal koperasi menurut Kecamatan di wilayah Kota Gorontalo sangat bervariasi, di mana jumlah modal Rp. 3.750.000 didominasi oleh kecamatan Kota Timur dengan persentase 10,82%, Kota Utara dengan persentase 5,19%, Kota Tengah dengan persentase 3,90%, Kota Selatan dengan persentase 2,16%, Duingingi 1,73%, dan terendah Kecamatan Kota Barat dengan persentase 1,30%. Untuk modal antara Rp. 3.750.000- 7.500.000 adalah Kota Tengah 3,03%, Kota Timur 2,60%, Kota Utara 2,16%, Kota Selatan 1,73%, Kota Barat 0,43% dan Duingingi 0,00% kecamatan terendah.

Selanjutnya persentase modal koperasi lebih dari Rp. 7.500.000 untuk Kota Selatan sebesar 30,30%, Kota Tengah 11,26%, Kota Barat 6,93%, Kota Utara dan Duingingi masing-masing (6,06%), dan persentase terendah adalah Kota Timur 4,33%. Keberadaan modal koperasi di Kota Tengah ternyata mengelompok, karena kecamatan ini merupakan pengembangan daerah baru sebagai pusat perdagangan barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga serta masyarakatnya sangat peduli terhadap pengembangan koperasi di wilayahnya. Kota Selatan secara keseluruhan memiliki persentase tertinggi 34,20%, sebab kota ini merupakan pusat pemerintahan di Kota Gorontalo. Di Kota Utara, distribusi modalnya menyebar, sedangkan di Kota Selatan distribusi modalnya terpusat di kotanya saja karena daerah ini sudah sulit berkembang lagi disebabkan penduduk yang padat kedua (35.988 jiwa) setelah Kota Timur (42.155 jiwa).

Di Duingingi distribusi modalnya menyebar di wilayahnya karena kota ini termasuk pengembangan kota baru yang berada di wilayah pinggiran kota, tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan walaupun jumlah penduduknya masih termasuk rendah (21.568 jiwa) dan di Kota Barat distribusi modalnya berada di daerah perbatasan kecamatan Duingingi ke arah barat dengan batas wilayah

Kabupaten Gorontalo dan bagian selatan sampai di Tanjung Kramat yang berbatasan dengan kecamatan Batudaa Pantai.

5. Karakteristik Perkembangan Koperasi

Perkembangan koperasi di Kota Gorontalo secara umum mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah perkembangan modal yang dikelola koperasi yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dana cadangan dan hibah. Adapun jumlah perkembangan modal di Kota Gorontalo bisa dilihat dalam tabel 4.24 berikut ini.

Tabel 4.24

Jumlah Perkembangan Modal di Kota Gorontalo Tahun 2010

Jumlah Anggota	Duingingi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Total (%)
<1% per tahun	0,87	1,30	2,16	1,30	0,00	1,30	6,93
0% per tahun	4,33	2,60	12,12	12,12	12,55	9,52	53,25
1% per tahun	29,42,60	4,76	19,91	4,76	5,19	2,60	39,83
Total	7,79 (N=18)	8,66 (N=20)	34,20 (N=79)	18,18 (N=42)	17,75 (N=41)	13,32 (N=31)	100,00 (N=231)

Sumber: Diskoperindag Kota Gorontalo 2010, diolah

Dari tabel di atas, untuk modal kurang 1% per tahun, yang tertinggi adalah Kecamatan Kota Selatan sebesar 2,16%, sedangkan Kota Utara, Kota Tengah, dan Kota Barat masing-masing 1,30%. Kota Duingingi sebesar 0,86% dan persentase terendah adalah Kota Timur sebesar 0,00% (tidak mengalami perkembangan). Untuk perkembangan modal 0% (nol persen per tahun), persentase Kecamatan Kota Timur adalah 12,55%, Kota Selatan dan Kota Tengah dengan persentase masing-masing 12,12%, Kota Utara 9,52%, Kota Barat 2,60%, dan terendah Kota Duingingi sebesar 4,33%. Untuk perkembangan modal 1% per tahun, ter-

Tabel 4.26
Perkembangan Modal Koperasi di Kota Gorontalo
Tahun 2010

Perkemb. Modal	Perkembangan Asset		
	<1%	0%	>1%
<1% per tahun	5,0	5,1	9,7
0% per tahun	65,0	58,1	45,2
1% per tahun	30	36,8	45,2
Total	100,0 (N=20)	100,0 (N=117)	100,0 (N=94)

Sumber: Diskoperindagkop Kota Gorontalo 2010, diolah

Berdasarkan tabel 4.26 di atas, jumlah aset untuk modal kurang dari 1% per tahun sebesar 5,0%; modal 0% per tahun sebesar 5,1%, dan modal lebih dari 1% pertahun sebesar 9,7%. Untuk modal 0% per tahun, aset kurang dari 1% (65,0%), aset 0% (58,1%), dan aset lebih dari 1% (9,7%). Untuk modal 1% per tahun, aset kurang dari 1% (30%), aset 0% (36,8%), dan aset lebih dari 1% (42,2%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aset 0% per tahun dan aset >1% per tahun mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu 93%. Jumlah perkembangan aset dan perkembangan modal bagi koperasi sebanding sehingga koperasi dapat melayani kebutuhan para anggotanya dengan baik.

Dari sini bisa dilihat bahwa di Kota Tengah modal koperasinya mengelompok dan jumlahnya lebih dari 1% dan modal yang kurang dari 1% menyebar di pinggiran kotanya. Di Kota Selatan, perkembangan modalnya terpusat di kotanya, karena daerahnya termasuk padat penduduk sehingga sulit untuk dikembangkan. Sedangkan di Kota Timur, perkembangan modalnya hanya aset yang 0% saja, karena Kota Timur merupakan hasil pemekaran dari Kota Selatan sebelumnya. Oleh karena itu, perkembangan jumlah modalnya seperti perkembangan modal yang di Kota Tengah, tetapi Kota Timur merupakan daerah pengembangan kota baru sebagai pusat perdagangan sehingga bisa sangat mendukung.

Perkembangan modal koperasi kurang dari 1% berada di Kota Utara dan menyebar di daerahnya dan berpeluang untuk mengembangkan modalnya karena daerahnya merupakan pengembangan daerah baru. Di Kota Duingi, perkembangan modalnya menyebar, sedangkan di Kota Barat perkembangan modalnya hanya di daerah pinggiran saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aset 0% per tahun dan aset >1% per tahun mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu 93%. Jumlah perkembangan aset dan modal sebanding sehingga koperasi dapat melayani kebutuhan anggota. Perkembangan koperasi di Kota Gorontalo berdasarkan rasio modal terhadap pengurus/anggota berdasarkan keberadaan koperasi dengan kategori maju, berkembang dan stagnan (lihat Tabel 4.27).

Tabel 4.27
Perkembangan Koperasi di Kota Gorontalo

Perkemb. Modal	Rasio modal terhadap pengurus/anggota			Total
	<64	64-128	>128	
<1%	2 12,5% (stagnan)	2 12,5% (stagnan)	12 75,0% (stagnan)	16 100,0%
0%	55 44,7% (stagnan)	4 19,5% (berkembang)	4 15,0% (berkembang)	123 100,0%
<1%	2 2,1% (berkembang)	4 4,35% (maju)	86 93,48% (maju)	92 100,0%
Total	59 25,2%	30 30,0%	142 61,7%	231 100,0%

Sumber: Diskoperindagkop Kota Gorontalo 2010

Dari tabel di atas, rasio modal terhadap pengurus dan anggota dilihat dari perkembangan modal koperasi yang ada di Kota Gorontalo tahun 2010 adalah: (1) rasio modal terhadap pengurus/anggota < 64, dengan modal kurang dari 1% per tahun yang mengalami kemajuan hanya 34%. Sedangkan untuk modal 0%

dan koperasi yang maju berada di pusat karena masyarakatnya sudah banyak yang memahami tata cara perkoperasian yang baik. Di Kota Dungingi, perkembangan koperasi yang stagnan menyebar di kotanya, koperasi yang berkembang juga menyebar dan perkembangan koperasi yang maju berada di pusat kota dan ada juga yang berada di pinggiran kota karena koperasi sangat membantu kebutuhan para anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan koperasi di Kota Barat yang maju berada di jalan utama arah barat Kota Gorontalo yang berbatasan dengan kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dan koperasi yang stagnan dan berkembang belum tampak di kota tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari jumlah koperasi 231 unit yang ada di wilayah Kota Gorontalo dilihat dari perkembangan modal dan rasio modal terhadap pengurus/anggota relatif tidak berkembang.

Sementara itu, rasio modal terhadap pengurus dan anggota dilihat dari perkembangan modal koperasi yang ada di Kota Gorontalo tahun 2010 adalah: (1) rasio modal terhadap pengurus/anggota kurang dari 64, dengan modal kurang dari 1% per tahun 2 koperasi (12,5%) stagnan, pengurus/anggota antara 64-128, 2 koperasi stagnan, dan 12 koperasi stagnan (75%) lebih dari 128 pengurus/anggota. Total 16 dari 231 koperasi. Untuk perkembangan modal 0%, tampak bahwa 55 koperasi (44,7%) stagnan, kurang dari 64 pengurus/anggota, 24 koperasi (19,5%) berkembang, pengurus antara 64-128, 44 koperasi berkembang (35,8%) lebih dari 128 pengurus/anggota, sehingga total 92 dari 231 koperasi di Kota Gorontalo. Untuk perkembangan modal lebih dari 1%, tampak bahwa 2 koperasi (2,17%) berkembang, untuk pengurus/anggota kurang dari 64, tampak 4 koperasi (4,35%) adalah koperasi maju, dan untuk pengurus/anggota antara 64-128, tampak 24 koperasi (19,5%) berkembang, untuk pengurus/anggota lebih dari 128, tampak 86 koperasi (93,48%) maju.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 16 koperasi stagnan untuk modal lebih dari 1%; 55 koperasi stagnan untuk modal 0% < 64; 68 koperasi berkembang pengurus/anggota antara

64 sampai anggota lebih dari 128. Selanjutnya, perkembangan pengurus di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa Kota Tengah perkembangan pengurus/anggota kurang dari 64 dengan modal kurang dari 1% per tahun yang berada pada 2 koperasi dengan persentase 12,5% stagnan; pengurus/anggota 64-128, ada 2 koperasi yang bersifat stagnan. Untuk itu, dari sisi perkembangan pengurus, anggotanya mengelompok di Dungingi baik yang kurang dari 64, dalam rentang 64-128, maupun yang lebih dari 128. Di Kota Utara, perkembangan anggota/pengurusnya menyebar, perkembangan koperasinya juga menyebar bahkan berada di daerah pinggiran kota, dan koperasi yang maju mengelompok di pusat Kota Tengah.

Di Kota Utara perkembangan koperasi yang stagnan menyebar, koperasi yang berkembang juga menyebar, dan koperasi yang maju berada di pusat kota. Perkembangan koperasi di Kota Timur yang stagnan berada di pusat kotanya, karena merupakan daerah baru yang membutuhkan pengembangan. Sedangkan koperasi yang berkembang juga berada di pusat kotanya dan perkembangan koperasi yang maju berada di kelurahan Talumolo dan Leato Selatan di mana kedua koperasi tersebut berada di pinggir pantai selatan Kota Gorontalo, tempat para nelayan menangkap ikan.

Perkembangan koperasi di Kecamatan Kota Selatan yang stagnan berada di pusat kota, perkembangan koperasi yang berkembang menyebar bahkan berada di daerah pinggiran kota, dan koperasi yang maju berada di pusat karena masyarakatnya sudah banyak yang memahami tata cara perkoperasian yang baik. Di Kota Dungingi, perkembangan koperasi yang stagnan menyebar di kotanya, koperasi yang berkembang juga menyebar dan perkembangan koperasi yang maju berada di pusat kota dan ada juga yang berada di pinggiran kota, karena koperasi sangat membantu kebutuhan para anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa keberadaan koperasi berjumlah 231 unit yang ada di Kota Gorontalo, ada 16 unit koperasi yang stagnan untuk modal lebih dari 1%, 55 unit koperasi untuk modal 0% lebih kurang 64, dan 68 koperasi berkembang pengurus/anggota.

Ketujuh, jaringan pasar. Jaringan pasar merupakan suatu tempat untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pelayanan koperasi umumnya terfokus pada internal koperasi yang belum terbentuk jaringan antar koperasi. Koperasi akan lebih berdaya saing jika koperasi mampu membentuk jaringan usaha. Melalui jaringan yang kuat, koperasi akan mampu berkibrah di pasar global dengan meningkatkan mutu pelayanan. Dapat dijelaskan bahwa jaringan adalah suatu faktor pendukung yang mempunyai kekuatan yang menentukan dalam melaksanakan usaha ekonomi dan program lainnya.

Kedelapan, jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Para pengurus dan manajer koperasi umumnya dikelola oleh tim manajemen dengan status pendidikan yang tidak begitu tinggi, sehingga kemampuan manajerialnya juga kurang memadai. Apalagi pelatihan sebagai media penambah wawasan dan kemampuan manajerialnya belum tersedia secara optimal. Kualitas sumber daya koperasi merupakan suatu hal penting dalam perkembangan koperasi secara keseluruhan.

Kesembilan, pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi produksi dan informasi yang belum memadai. Pada umumnya koperasi masih belum memiliki akses terhadap alat-alat komunikasi modern seperti jaringan internet. Banyak koperasi yang masih menggunakan mesin ketik sehingga cukup lamban dalam memberikan berbagai pelayanan kepada anggota. Jadi, koperasi harus lebih tanggap dan lebih cepat dalam memperoleh informasi-informasi agar tidak tertinggal dengan badan usaha lain, karena untuk memenuhi keinginan anggotanya dan masyarakat koperasi harus selalu mengikuti perkembangan zaman.

Kesepuluh, sistem manajemen. Sistem manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya koperasi. Dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, dan melimpahkan wewenang kepada manajer.

Kesebelas, kinerja pengurus. Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu, kinerja pengurus mempunyai kedudukan yang menentukan akan keberhasilan koperasi. Dengan pengurus yang memiliki kompetensi yang baik akan dapat membuat koperasi berkembang menjadi lebih baik.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan koperasi antara lain: *pertama*, komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai *sokoguru* perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikuasainya sebagian besar aset usaha nasional oleh sebagian kecil kelompok usaha besar. Jadi, dengan adanya kebijakan pemerintah koperasi masih dapat perhatian yang kecil. Sedangkan UKM ataupun koperasi memberikan omset yang cukup besar dibanding dengan usaha swasta.

Kedua, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan. Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakikat koperasi, manfaat koperasi, serta hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota dan meningkatkan kemampuan manajerial harus diberikan. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting, karena dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi.

Ketiga, iklim pendukung perkembangan koperasi. Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang begitu saja. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi. Dengan koordinasi-koordinasi tersebut dimaksudkan agar berbagai pihak yang ada sangkut-pautnya dengan pertumbuhan koperasi dapat dihasilkan pandangannya.

pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, seperti lembaga-lembaga yang menawarkan modal untuk memupuk keberadaan modal pada koperasi, dan hal ini didasarkan atas kepercayaan terhadap manajemen sehingga koperasi dengan sendirinya dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan dan aktivitas koperasi berjalan baik apabila memperoleh dukungan anggota masyarakat yang berfungsi sebagai pemilik modal dan sebagai pengguna jasa koperasi serta menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan anggota.

Koperasi melakukan usaha/pelayanan yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, setiap bentuk usaha koperasi harus mampu menghasilkan dampak yang menunjang peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Adapun manfaat koperasi terhadap ekonomi masyarakat adalah memberikan pelayanan yang layak kepada anggota untuk menghasilkan manfaat bagi anggota, seperti menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan anggota, sehingga secara langsung anggota menikmati hasil yang dilakukan oleh koperasi.

Anggota koperasi merupakan pusat pengembangan yang mempunyai posisi penting dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, koperasi harus mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya sendiri melalui proses "nilai tambah" (Indrawan, 1998). Hal tersebut dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dikelola secara efisien dan penuh kreasi sehingga dapat memotivasi calon anggota untuk tergerak memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Harapan masyarakat agar koperasi tetap berperan secara optimal dalam perekonomian masyarakat harus terus diupayakan dalam tatanan perekonomian yang mengglobal. Banyak pihak yang masih berharap terhadap eksistensi koperasi, karena sektor ini dipandang memiliki arti strategis bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Upaya-upaya untuk memperbaiki keberadaan koperasi harus menjadi tugas semua unsur yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian sehingga eksistensi koperasi dapat dipertahankan (Wirasasmita, 2002).

Wirasasmita menyatakan bahwa eksistensi koperasi dapat dipertahankan bila mampu memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi anggotanya melalui penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat disediakan oleh koperasi untuk kebutuhan anggota. Dengan manfaat ekonomi inilah anggota diharapkan tetap loyal berpartisipasi terhadap koperasinya. Peningkatan keberadaan koperasi melalui penciptaan keunggulan kompetitif memerlukan manajemen yang profesional dalam mengelola usahanya, sehingga partisipasi anggota dapat ditingkatkan dan kesejahteraan terpenuhi. Profesionalisme kepengurusan koperasi dan partisipasi anggota merupakan dua variabel penentu keberhasilan perusahaan koperasi (Ropke, 1989). Selain dihadapkan dengan anggota dalam upaya memberikan pelayanan yang memadai, pengelola koperasi juga dihadapkan dengan para pesaingnya, di mana sumber daya manusia dalam melaksanakan jati diri koperasi masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan sehingga keberhasilan koperasi dapat terpenuhi.

Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi sangat tergantung pada faktor sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis dan mampu membawa organisasi koperasi berkembang ke arah yang baik. Sedangkan perkembangan koperasi di Kota Gorontalo sendiri memiliki keterkaitan erat dengan beberapa variabel seperti modal dan aset koperasi, perkembangan modal, perkembangan aset, jumlah anggota koperasi, omset, jumlah pengurus, rasio modal terhadap jumlah pengurus dan anggota serta besarnya SHU.

Berdasarkan hasil uji *communalities*, diketahui bahwa jumlah varian dari variabel mula-mula memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 0,5. Hal ini berarti semua variabel yang dianalisis dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel jumlah SHU, jumlah anggota, modal dan aset koperasi saat ini diketahui memiliki nilai *extraction* lebih dari 0,90 yang berarti lebih dari 90 persen varian dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nilai

Tabel 4.30

Uji *Rotated Component Matrix*
Variabel Pembentuk Perkembangan Koperasi

Keterangan	Component				
	1	2	3	4	5
Modal akhir	,966	,115	,120	,082	,018
Rasio modal dan jumlah pengurus+anggota	,891	-,048	-,117	-,008	-,083
Perkembangan modal	,855	,100	,076	-,107	,063
Modal awal	,795	,098	,141	,312	-,049
Modal akhir	,095	,983	,123	-,003	-,017
Aset awal	,141	,824	,309	,045	-,031
Perkembangan aset	-,009	,822	-,195	-,073	,009
Pengurus	-,002	-,066	,719	-,148	,034
Omzet	,120	,215	,718	,137	-,052
SHU	,089	-,046	-,044	,953	,015
Jumlah anggota	-,022	-,022	-,010	,013	,994

Berdasarkan karakter variabel penentu faktor di atas, selanjutnya dilakukan penamaan faktor, yaitu:

Faktor 1: Memberikan sumbangan sebesar 31,777%, yang merupakan *Faktor Keberadaan Koperasi*. Faktor ini merupakan kekuatan yang harus dimiliki oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi di kalangan masyarakat dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga pertumbuhan koperasi menjadi baik. Adapun komponen faktor 1 adalah modal akhir, rasio modal dan jumlah pengurus/anggota, perkembangan modal, jumlah modal awal.

Faktor 2: Memberikan sumbangan sebesar 20,376% yang merupakan *Faktor Kondisi Koperasi*. Faktor ini merupakan organisasi dalam bentuk kerjasama modern yang tersebar di daerah-daerah pedesaan di negara berkembang dan menjadi pusat perhatian dalam menunjang usaha-usaha ekonomi para anggotanya serta menjadi pusat penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan para anggota.

Faktor 3: Memberikan sumbangan sebesar 10,130%, dan ini merupakan *Faktor kekayaan koperasi*. Faktor ini merupakan kekuatan yang bersumber pada modal, di mana modal sebagai salah satu unsur penting dalam usaha koperasi yang diatur dalam anggaran dasar koperasi tentang bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana memanfaatkan sumber dana tersebut dengan baik sehingga dapat memperoleh manfaat bagi koperasi.

Faktor 4: Memberikan sumbangan sebesar 9,222%, dan ini adalah *Faktor Sisa Hasil Usaha*. Faktor ini merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh pada periode tertentu setelah dikurangi biaya-biaya yang bersumber dari pelayanan jasa kepada anggota maupun bukan anggota dan tidak dibagi dalam rangka pemupukan modal sehingga berkembang pada periode tahun berikutnya.

Faktor 5: Memberikan sumbangan sebesar 9,120%, dan ini adalah *Faktor Jumlah Anggota*. Keberadaan anggota merupakan basis bagi perkembangan dan kelangsungan hidup usaha koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sehingga berpengaruh pada jalannya organisasi koperasi.



BAB V

PROSPEK PERKEMBANGAN KOPERASI TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Prospek Perkembangan Koperasi dalam Rumah Tangga

Prospek koperasi sangatlah menjanjikan harapan positif terhadap rumah tangga di masa yang akan datang. Penelitian terhadap responden mengenai variabel prospek koperasi terhadap rumah tangga ini menggunakan 11 (sebelas) indikator sebagai pertanyaan di mana indikatornya adalah: (1) adanya peningkatan pendidikan, (2) peningkatan pengetahuan, (3) peningkatan modal, (4) ketersediaan sandang dan pangan, (5) peningkatan jiwa kepemimpinan, (6) peningkatan kualitas dalam berorganisasi, (7) kemudahan memperoleh kebutuhan rumah tangga, (8) peningkatan keakraban, (9) peluang pekerjaan, (10) kemudahan menjual produk, dan (11) peningkatan kesejahteraan. Dari hasil yang diperoleh dari daftar isian, tanggapan responden terhadap prospek koperasi dalam rumah tangga di Kota Gorontalo bisa dilihat dalam Tabel 5.1.

Koperasi pada dasarnya selalu menjalankan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota yang harus disiapkan oleh koperasi di mana usahanya selalu memerhatikan kebutuhan anggota dalam penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan anggota. Bahkan produk dari anggota ditampung oleh koperasi kemudian disalurkan kembali kepada konsumen yang membutuhkan. Dengan demikian, penyediaan kebutuhan anggota selalu menjadi perhatian pengurus, sehingga para anggota merasa bangga dengan keberadaan koperasi dalam kehidupan para anggota.

2. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Pengetahuan

Ada keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang maupun stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota (lihat Tabel 5.3).

Tabel 5.3

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Pengetahuan

Prospek Pengetahuan	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	48	54	63
Sedang	39	29	31
Rendah	13	17	6
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel di atas, koperasi memang memberi dampak bagi adanya prospek pengetahuan pada koperasi. Pada prospek pengetahuan yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 48%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 54%, dan kategori stagnan sebanyak 63%; untuk prospek pengetahuan kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 39%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 29% dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 31%; sedang-

kan untuk prospek pengetahuan yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 13%, berkembang 17%, dan stagnan sebanyak 6%. Tingkat perkembangan koperasi maju sebanyak 48% yang dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan para anggota sehingga berpengaruh terhadap kualitas koperasi.

3. **Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Modal**
Keberhasilan koperasi sesuai analisis data responden menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang maupun stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota (Tabel 5.4).

Tabel 5.4

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Modal

Prospek Modal	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	48	60	65
Sedang	36	25	25
Rendah	16	15	10
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel di atas, koperasi memang memberi dampak bagi adanya prospek modal pada koperasi. Pada prospek modal yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 48%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 60%, dan kategori stagnan sebanyak 65%; untuk prospek modal kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 36%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 25% dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 25%; sedangkan untuk prospek modal yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 16%, berkembang 15%, dan stagnan sebanyak 10%. Tingkat perkembangan koperasi maju sebanyak 48% yang dipengaruhi oleh jumlah modal yang dioperasikan pada koperasi sehingga berpengaruh terhadap perkembangan modal koperasi.

6. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Berorganisasi

Berdasarkan hasil analisis data terhadap responden, ternyata koperasi juga membawa prospek yang baik dalam hal berorganisasi, karena memang ada keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang dan stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota (Tabel 5.7).

Tabel 5.7

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Berorganisasi

Prospek Berorganisasi	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	47	49	56
Sedang	36	35	25
Rendah	17	16	19
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel di atas, koperasi memang memberi dampak bagi adanya prospek berorganisasi pada koperasi. Pada prospek berorganisasi yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 47%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 49%, dan kategori stagnan sebanyak 56%; untuk prospek berorganisasi kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 36%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 35% dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 25%; sedangkan untuk prospek berorganisasi yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 17%, berkembang 16%, dan stagnan sebanyak 19%. Tingkat perkembangan koperasi maju sebanyak 47% yang dipengaruhi oleh kepemimpinan koperasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap jalannya organisasi koperasi.

7. Tingkat Perkembangan Koperasi dalam Prospek Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Koperasi juga memberikan prospek terhadap penyediaan kebutuhan rumah tangga, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang dan stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota. Selengkapnya lihat Tabel 5.8.

Tabel 5.8

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Dalam Prospek Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Penyediaan Kebutuhan RT	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	46	57	47
Sedang	37	26	29
Rendah	17	17	24
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel di atas, koperasi memang memberi dampak bagi adanya penyediaan kebutuhan rumah tangga dalam koperasi. Pada penyediaan kebutuhan yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 46%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 57%, dan kategori stagnan sebanyak 47%; untuk penyediaan kebutuhan kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 37%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 26% dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 29%; sedangkan untuk penyediaan kebutuhan yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 17%, berkembang 17%, dan stagnan sebanyak 24%. Tingkat perkembangan koperasi maju sebanyak 46% yang dipengaruhi oleh kepemimpinan koperasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap perkembangan koperasi.

10. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Menjual Produk

Sesuai analisis data responden, koperasi juga berhasil dalam hal prospek menjual produk, dan ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang, maupun stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota (Tabel 5.11).

Tabel 5.11

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Menjual Produk

Prospek Menjual Produk	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	47	50	50
Sedang	33	32	28
Rendah	19	18	22
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Tabel di atas menunjukkan bahwa koperasi memang memberi dampak bagi penjualan produk pada koperasi. Pada penjualan produk yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 47%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 50%, dan kategori stagnan sebanyak 50%; untuk penjualan produk kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 33%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 32% dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 28%; sedangkan untuk tingkat penjualan produk yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 19%, berkembang 18%, dan stagnan sebanyak 22%. Tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 47% koperasi, dan hal ini dipengaruhi oleh kepengurusan koperasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap keberadaan anggota dalam menjual produknya pada koperasi dan pendapatan anggota meningkat.

11. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kesejahteraan

Keberadaan koperasi juga memberikan prospek kesejahteraan terhadap anggotanya, dan ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kesejahteraan anggota dan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang dan stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota (Tabel 5.12).

Tabel 5.12

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kesejahteraan

Prospek Kesejahteraan	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	50	54	61
Sedang	36	25	22
Rendah	14	21	17
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Tabel di atas menunjukkan bahwa koperasi memang memberi dampak bagi adanya prospek kesejahteraan bagi anggota koperasi. Pada prospek kesejahteraan yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 50%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 54%, dan kategori stagnan sebanyak 61%; untuk prospek kesejahteraan kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 36%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 25%, dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 22%; sedangkan untuk prospek kesejahteraan yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 14%, berkembang 21%, dan stagnan sebanyak 17%. Tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 50% koperasi, dan hal ini dipengaruhi oleh kepengurusan koperasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap keberadaan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan tabel di atas, prospek PAD untuk tingkat perkembangan koperasi kategori tinggi bisa didapatkan: untuk kualitas koperasi maju sebanyak 57% koperasi, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 55%, dan kategori stagnan sebanyak 72%; untuk tingkat perkembangan kategori sedang, terlihat perkembangan kategori maju sebanyak 29%, kualitas koperasi yang berkembang sebanyak 29%, dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 20%; sedangkan untuk tingkat perkembangan koperasi rendah, tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 14%, kualitas koperasi yang berkembang sebanyak 16%, dan perkembangan koperasi kualitas stagnan sebanyak 8%. Tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 57% koperasi, dan hal ini dipengaruhi oleh pengurus koperasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kegiatan Produksi

Koperasi juga memberikan pengaruh bagi prospek kegiatan produksi di mana ada keterkaitan antara tingkat perkembangan koperasi dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang maupun stagnan. Di sini, anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota.

Tabel 5.15

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Kegiatan Produksi

Kegiatan Produksi	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	58	56	66
Sedang	28	27	24
Rendah	14	17	10
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Tabel di atas menunjukkan bahwa koperasi memang memberi dampak bagi adanya kegiatan produksi pada koperasi. Pada kegiatan produksi yang tinggi, untuk kualitas koperasi maju sebanyak 58%, kualitas koperasi kategori berkembang sebanyak 56%, dan kategori stagnan sebanyak 66%; untuk kegiatan produksi kategori sedang, terlihat tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 28%, kualitas koperasi berkembang sebanyak 27% dan kualitas perkembangan koperasi stagnan sebanyak 24%; sedangkan untuk tingkat kegiatan produksi yang rendah, tingkat perkembangan koperasi untuk kategori maju sebanyak 14%, berkembang 17%, dan stagnan sebanyak 10%. Tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 58% koperasi, dan hal ini dipengaruhi oleh keberadaan pengurus koperasi yang melayani anggota masyarakat dalam menciptakan kegiatan produksi bagi anggota sehingga anggota bisa mendapatkan manfaatnya.

3. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Peluang Kerja

Koperasi juga memberikan dampak bagi adanya peluang kerja, karena memang ada keterkaitan antara peluang kerja dengan kualitas koperasi baik kualitas koperasi kategori maju, berkembang maupun stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota.

Tabel 5.16

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Peluang Kerja

Peluang Kerja	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	60	53	66
Sedang	26	27	22
Rendah	14	20	12
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

banyak 26%, dan stagnan 24%; sedangkan untuk pemasaran produk yang rendah, tingkat perkembangan maju sebanyak 14%, berkembang sebanyak 15%, dan stagnan sebanyak 12%. Tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 60% koperasi, hal ini dipengaruhi oleh keberadaan pengurus koperasi yang aktif dalam memasarkan produk.

6. Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Komoditas Unggulan

Keberadaan koperasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap adanya komoditas unggulan, karena memang ada keterkaitan antara prospek komoditas unggulan dengan tingkat perkembangan koperasi baik untuk kategori maju, berkembang maupun stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota secara bersama.

Tabel 5.19

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Komoditas Unggulan

Komoditas Unggulan	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	63	54	61
Sedang	22	26	24
Rendah	15	20	15
Jumlah	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel di atas, komoditas unggulan kategori tinggi, maka tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 63%, kategori berkembang sebanyak 54%, dan kategori stagnan sebanyak 61%; untuk tingkat komoditas unggulan sedang, tingkat perkembangan kategori maju sebanyak 22%, berkembang sebanyak 26%, dan stagnan sebanyak 20%; sedangkan untuk komoditas unggulan rendah, maka tingkat perkembangan koperasi maju sebanyak 15%, berkembang sebanyak 20%, dan perkembangan koperasi stagnan sebanyak 15%. Tingkat perkem-

bangsan koperasi kategori maju sebanyak 63% koperasi, dan hal ini dipengaruhi oleh pengurus koperasi terhadap terciptanya hasil komoditas unggulan.

7. Tingkat Perkembangan Koperasi terhadap Prospek Multiplier Effect

Keberadaan koperasi juga memiliki pengaruh terhadap prospek *multiplier effect*, karena memang ada keterkaitan antara *multiplier effect* dengan tingkat perkembangan koperasi baik kategori maju, berkembang maupun stagnan, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para anggota secara bersama.

Tabel 5.20

Matriks Tingkat Perkembangan Koperasi Berdasarkan Prospek Multiplier Effect

Multiplier Effect	Tingkat Perkembangan Koperasi		
	Maju (%)	Berkembang (%)	Stagnan (%)
Tinggi	59	51	63
Sedang	24	31	25
Rendah	17	18	12
Jumlah (%)	100	100	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan Tabel 5.20 di atas, *multiplier effect* kategori tinggi tingkat perkembangan maju sebanyak 59%, berkembang sebanyak 51%, dan kategori stagnan sebanyak 63%; sedangkan *multiplier effect* sedang, tingkat perkembangan maju sebanyak 24%, berkembang sebanyak 31%, dan stagnan sebanyak 25%; sedangkan untuk *multiplier effect* rendah, maka tingkat perkembangan maju sebanyak 17%, berkembang 18%, dan stagnan sebanyak 12%. Tingkat perkembangan koperasi kategori maju sebanyak 59% koperasi, dan hal ini dipengaruhi oleh pengurus koperasi terhadap terciptanya *multiplier effect*.

Tabel 5.23

Tanggapan Responden terhadap Prospek Koperasi
Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anggota

No	Indikator	Persepsi						Total
		BB		SS		TBB		
		Org	%	Org	%	Org	%	
1	KP Sehari-hari	225	59,06	100	26,25	56	14,70	381
2	Pend. Anak	286	75,07	75	19,69	20	5,25	381
3	Kesehatan	275	72,18	80	21,00	26	6,82	381
4	Perumahan	25	6,56	250	65,62	106	27,82	381
5	Lainnya	150	39,37	150	39,37	81	21,26	381
	Rata-rata	192	50,45	132	34,38	57	15,17	381

Sumber: Hasil analisis

Ket: BB: Bertambah Baik, SS: Sama Saja, TBB: Tidak Bertambah Baik.

Keberadaan responden terhadap prospek koperasi dalam pemenuhan kebutuhan anggota berdasarkan Tabel 5.23. menunjukkan bahwa indikator tanggapan *bertambah baik*, untuk indikator kebutuhan pokok sehari-hari dengan jumlah responden 225 orang (59,06%), indikator untuk memperoleh pendidikan anak dengan jumlah responden 286 orang (75,07%), indikator untuk kebutuhan kesehatan dengan jumlah responden 275 orang (72,18%), indikator untuk memperoleh perumahan dengan jumlah responden 25 orang (6,56%), dan indikator lainnya diperoleh media masa dan iklan dengan jumlah responden 150 orang (39,37%). Dengan demikian, dari indikator yang ada masih mendominasi indikator untuk memperoleh pendidikan bagi anak dengan jumlah 286 responden (75,07%) merupakan jumlah tertinggi dari prospek koperasi dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan anak sehingga dapat meningkatkan derajat SDM di lingkungan keluarga.

Selanjutnya prospek terhadap koperasi dalam pemenuhan kebutuhan anggota sesuai bahwa indikator yang ada di peroleh tanggapan *sama saja*, untuk indikator kebutuhan pokok sehari-hari sesuai tanggapan responden berjumlah 100 orang (26,25%), indikator untuk memperoleh pendidikan anak dengan jumlah responden 75 orang (19,69%), untuk kebutuhan kesehatan de-

ngan jumlah responden 80 orang (21,00%) indikator untuk memperoleh perumahan dengan jumlah responden 250 orang (65,62%) dan indikator lainnya diperoleh media masa dan iklan dengan jumlah responden 150 orang (39,37%). Dengan demikian, dari indikator yang ada masih mendominasi indikator untuk memperoleh perumahan dengan jumlah 250 responden (65,62%) merupakan jumlah tertinggi dari prospek koperasi dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan sehingga anggota dapat tempat tinggal dalam kehidupan keluarga.

Selanjutnya untuk indikator tanggapan responden *tidak bertambah baik*, untuk kebutuhan pokok sehari-hari diperoleh jumlah responden 56 orang (14,70%), indikator untuk memperoleh pendidikan anak dengan jumlah responden 20 orang (5,25%), untuk kebutuhan kesehatan dengan jumlah responden 26 orang (6,82%), indikator untuk memperoleh perumahan dengan jumlah responden 106 orang (27,82%), dan indikator lainnya diperoleh media masa dan iklan dengan jumlah responden 81 orang (21,26%). Dengan demikian persepsi anggota terhadap pemenuhan kebutuhan akan perumahan masih mendominasi dengan jumlah 106 responden (27,82%) yang merupakan jumlah persentase tertinggi dari prospek koperasi dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan menjadi kebutuhan utama dari anggota koperasi sehingga mereka hidup layak seperti masyarakat lainnya.

C. Prospek Jenis Usaha Koperasi

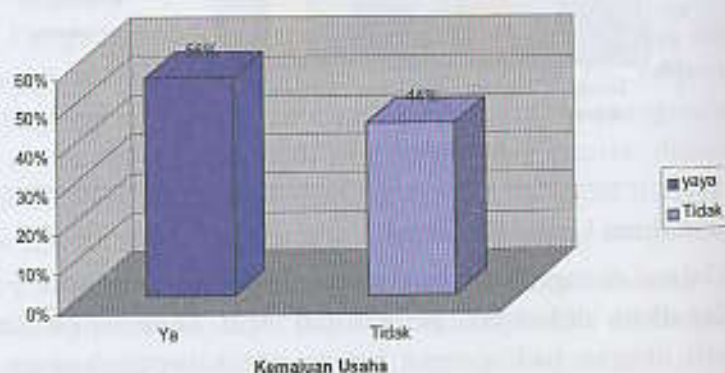
Kegiatan koperasi sesuai keinginan anggota dalam prospek meningkatkan usaha koperasi di masa yang akan datang kecenderungannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, walaupun banyak berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi, sehingga diperlukan perencanaan dan perumusan strategis secara baik dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengetahui berbagai bentuk ancaman yang membutuhkan pemecahan dari pengurus dan pemerintah sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik. Tantangan yang dihadapi dewasa ini dalam perekonomian khususnya pada koperasi adalah masalah permodalan serta penyediaan barang untuk kebutuhan anggota sehingga mampu mengantisipasi pemenuhan kebutuhan anggota.

Tabel 5.25
Kemajuan Usaha Koperasi

No	Tanggapan	Jumlah	
		Orang	%
1	Ya	213	56
2	Tidak	168	44
Jumlah		381	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel di atas, dalam prospek kemajuan usaha koperasi tampaknya responden yang menjawab persepsi ya, berjumlah 213 orang (56%). Hal ini lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan menjawab tidak, yaitu berjumlah 168 orang (44%), sehingga prospek kemajuan usaha koperasi sangat baik. Selanjutnya kemajuan usaha koperasi yang dijalankan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Selanjutnya prospek kemajuan usaha koperasi dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini.



Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa kemajuan usaha koperasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase tertinggi prospek kemajuan usaha koperasi mencapai 56% jawaban

responden yang menjawab ya, walaupun di sisi lain jawaban yang ada hampir sebanding. Oleh karena itu, kemajuan koperasi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota.

E. Prospek Koperasi Berdasarkan Tempat/Lokasi Koperasi

Pengembangan koperasi dewasa ini perlu memerhatikan keadaan tempat/ lokasi, di mana lokasi yang strategis dapat berpengaruh terhadap kemajuan koperasi. Selanjutnya keberadaan koperasi di suatu wilayah perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam memajukan koperasi. Untuk itu, perlu adanya perubahan dan pengembangan cara pandang dalam pengelolaan koperasi sehingga koperasi dapat berhasil dan berkembang dengan baik. Kemajuan usaha koperasi dapat dilihat dari tempat/lokasi dalam Tabel 5.26.

Tabel 5.26.
Berdasarkan Tempat/Lokasi

No	Tanggapan	Jumlah	
		Orang	%
1	Ya	223	59
2	Tidak	158	41
Jumlah		381	100

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan Tabel 5.26, tanggapan tentang prospek koperasi berdasarkan tempat/lokasi koperasi tampaknya responden yang menjawab ya berjumlah 223 orang (59%), lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan menjawab tidak yang berjumlah 158 orang (41%), sehingga prospek koperasi berdasarkan tempat/lokasi berpengaruh terhadap perubahan dan strategi dalam pengelolaan koperasi agar kesejahteraan anggota dapat tercapai. Koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya pengelola yang dapat mengembangkan koperasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang memiliki identitas yang unik, sehingga untuk menyelesaikan kondisi

objektifnya juga memerlukan penanganan secara khusus pula. Peran pemerintah sangat strategis, menginga. maju mundurnya koperasi tidak lepas dari adanya kebijakan khusus dari pemerintah. Karena koperasi memiliki kekhususan, di mana para pengelola mulai dari level pemegang kebijakan sampai pelaksana teknis di lapangan semestinya merupakan orang yang benar-benar memiliki pemahaman seutuhnya tentang perkoperasian.

Koperasi tidak dapat disamakan dengan badan usaha lainnya, karena koperasi tidak akan mampu bersaing jika peran pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap koperasi. Hal ini karena koperasi bukanlah badan usaha, melainkan perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjunjung tinggi semangat demokrasi ekonomi dan kesetaraan antar anggota. Koperasi tidak akan memandang seseorang hanya berdasarkan modal usaha (saham) yang dimilikinya secara perorangan, melainkan juga berdasarkan keaktifannya dalam menggunakan jasa koperasi, sehingga koperasi tidak mempunyai peluang terhadap persaingan bebas dalam permodalan. Untuk itu, pemerintah berusaha mendukung pembentukan koperasi oleh masyarakat dan tidak melihat usaha apa yang diinginkan masyarakat sebagai calon anggota, sehingga pembentukan koperasi selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat secara bersama. Adapun manfaat koperasi terhadap ekonomi masyarakat adalah memberikan pelayanan yang layak kepada anggota untuk menghasilkan manfaat terhadap anggota, antara lain dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan, sehingga anggota secara langsung dapat menikmati hasil yang diusahakan oleh koperasi sehingga kesejahteraan anggota terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, H, 2002, *Pengembangan Wilayah, Konsep dan Teori*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adisasmita. H, 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit, Graha Ilmu, Jakarta.
- Ahmed, Riazuddin, 1964. *Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development*. Dalam Dr. Mauritz Bonow (Ed). *The Role of Cooperatives in Social and Economic Development*. International Cooperative Alliance: London
- Anoraga Pandji dan Ninik Widiyanti, 1998, *Dinamika Koperasi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, A, 2005, *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Tinjauan Kritis, P4Wpress, Bogor.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, penerbit Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi., 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Azwar, Saifuddin., 2007, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baridjambek, M. C, 1993, *Pembangunan Koperasi Perkotaan Dan Peranannya Bagi Masyarakat Industri*, Makalah disampaikan Pada Lokakarya Tentang Koperasi Perkotaan Menyongsong PJPT II di DKI Jakarta, Hotel Wisata Internasional, 16 Juni 1993.
- Baridjambek, M. C, Ahmad, S, Sri Budiawati, 1994, *Strategi Dan Pendekatan Integral Serta Pola Penelitian Bagi Studi Kelayakan Pengembangan jaringan Sentra Distribusi Koperasi*, Jaringan Usaha Koperasi Dewan Koperasi Indonesia

- Baridjambek, M. C, Ahmad, S, Sri Budiawati, 1994, *Strategi Dan Pendekatan Integral Serta Pola Penelitian Bagi Studi Kelayakan Pengembangan jaringan Sentra Distribusi Koperasi*, Jaringan Usaha Koperasi Dewan Koperasi Indonesia
- Baruwadi, Mahludin H., 2005, *Peran Subsektor Perkebunan Kelapa Pada Perekonomian Wilayah dan Pendapatan Rumah Tangga Petani di Provinsi Gorontalo*, Naskah Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Baswir, Revrisond. 2012, *Koperasi Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Canon, Syarwani., 2007, *Analisis Dampak Perluasan Wilayah Administrasi Kota Manado Terhadap Kinerja Perekonomian Kota Manado Dan Daerah lain Di Propinsi Sulawesi Utara*, Naskah Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Casselmann, Hendradjogi, 2004. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta
- Copley, Paul, 2005, *Marketing Communications Management; Concepts and Theories, cases and Practices*, Jordan Hill, Oxford.
- Daldjoeni, N, 1997. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*, P.T. Alumni, Bandung
- Danasasmita, Kudus., 1995 *Keberadaan Koperasi Susu Di Pedesaan Serta Dampaknya Bagi Kegiatan Usaha Anggota Yang Memiliki Keterbatasan Sumber Daya Lahan Ushatani*, Jawa Barat, Naskah Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Djojohadikoesoemo, Margono R.M. 1940. *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*. Balai Poestaka : Batavia Centrum.
- Eriyanto, 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- G. Kartasapoetra, R. G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, 2000. *Praktek Pengelolaan Koperasi* Rineka Cipta: Jakarta.
- Hanel, Alfred, 1989. *Organisasi Koperasi, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi di Negara-negara Berkembang*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Harnanto, 1991, *Analisa Laporan Keuangan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Henehan, Brian M., Bruce L Anderson, 2001, *Considering Cooperation: A Gaide for New Cooperative Development*. Juornal of Applied Economics and Management College of Agricultural and life Science. www.google.Com.
- Herman, Soewardi, 1986, *Filsafat Koperasi, Cooperativism*, IKOPIN, Bandung.
- <http://mierameidianisuryadi.blogspot.com/2012/01/pembangunan-koperasi-di-negara.html>, 29 juni 2012 pukul 20.44, Partadiredja.
- <http://www.google.co.id>, 29 juni 2012 pukul 22.10. dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Hudiyanto, 2002. *Sistem Koperasi, ideologi dan pengelolaan*. UII Press. Yogyakarta.
- Husodo, Sapto., 2005, *Penilaian Ekonomi Lahan Dan Keberlanjutan Usaha Tani di Kawasan Pinggiran Kota Yogyakarta*, Naskah Disertasi (tidak dipublikasikan) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- ICA, 2001, *Jati Diri Koperasi (Prinsip-Prinsip Koperasi untuk Abad ke-21)*, LSP21, Jakarta.
- Joesron, Tati Suhartati., 1999, *Pengaruh Dimensi Waktu Pengalaman Terhadap Skala Usaha dan Efisiensi pada Koperasi Susu*, Jawa Barat, Naskah Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung
- Joesron, Tati Suhartati., 2005, *Manajemen Strategik Koperasi*, Penerbit Graha Ilmu, Candi Gebang Permai, Yogyakarta.
- Juarini., 2003, *Prilaku Ekonomi Petani Terhadap Resiko Usahatani Di Lahan Pantai Kabupaten Kulon Progo*, Naskah Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Kalimin., 2007, *Mengembangkan Sikap Pemberdayaan, Kompensasi, Kepuasan Kerja, Komitmen dan Kompetensi Manajer Sebagai upaya Mendorong pencapaian kinerja manejer*

- Koperasi Susu di Jawa*, Naskah Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung
- Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane; 2009, *Marketing Management*, Thirteenth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Masngudi, H. 1990. *Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta.
- Mubyarto, 1988, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Penerbit LP3S, Jakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2011, *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi., 2001, *Peranan Wanita Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal* (Studi Kasus Pola Ruang Belanja Wanita di Kompleks Perumahan, Daerah Pinggiran Kota) Majalah Geografi Indonesia, Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 15.
- Muta'ali, Lutfi., 2012, *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugraga Yuni, *Faktor Yang Mempengaruhi Kemajuan Koperasi*, Akses tanggal 12 Juli 2012.
- Ramudi Ariffin, 2001, *Pengaruh Skala Ekonomi dan Biaya Terhadap Dampak Koperasi*, Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Ropke, Jochen., 1989, *The Economic Theory of Cooperatives*, Buku II, University Marburg Germany.
- Ropke, Jochen., 1995. "Kewirausahaan Koperasi". UPT Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung: UPT Penerbit IKOPIN
- Rowley, Jennifer; 2006, *Information Marketing*, Second Edition, Ashgate Publishing Limited, UK, US.
- Roy, Ewell Paul, 1981. *Cooperatives Today and Tomorrow* (Terjemahan), The Interstate Printers and Publishers, Inc. Danville, Illinois.
- Rully Indrawan, 1998, *Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja Anggota Pengurus dan Karyawan Terhadap Efektifitas Organisasi Koperasi*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Selo Soemardjan, 1981, *Perubahan Sosial*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta
- Setyawarman, A, 2009, *Pola Sebaran dan Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Retail Modern*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Kota, UNDIP Semarang.
- Soedirman (2006), *Evaluasi Kinerja Koperasi* (<http://www.united-bit.com>)
- Soedjono, Ibnoe, 1993, *Kewirakoperasian*, Makalah sebagai Pembahasan terhadap Makalah Prof. Jochen Ropke, IKOPIN, Bandung.
- Soedjono, Ibnoe., 1983. *The Role of Cooperatives in The Indonesian Society*. Dalam H.J. Esdert (ED). *Can Cooperatives Become the Motive Force in the Economic of Indonesia*, Friedrich Ebert Stiftung: Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Grafika Persada Jakarta.
- Soetrisno Noer, 2001, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Intrans, Jakarta
- Sudarsono & Edilius, 2002, *Koperasi, Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Sugianto, 2007, *Pengaruh Kompetensi Manajemen dan Komitmen Manajemen terhadap Perubahan Struktur Modal Koperasi Melalui Pembentukan Kinerja Keuangan dan Promosi Ekonomi Anggota di Jawa Barat*, Naskah Disertasi, Universitas Pajajaran Bandung
- Sugiono, 2005, *Statistika Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.

- Sulaiman, Wahid, 2004, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*, Andi, Yogyakarta.
- Syamsudin Djahmat, 1997. *Manajemen Koperasi*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Tarigan. R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta
- Tarigan. R. 2007. *Ekonomi Regional-Teori dan Aplikasi*. Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*, Penerbit Sinar Grafika.
- Vanderberghe, C., Stordeur, S., D'hoore, W (2002), *Transactional and Transformational Leadership in Nursing: Structural Validity and Substantive Relationships*. European Journal of Psychological Assessment.
- Widiyanti dan Y. W. Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Reneka Cipta. Jakarta.
- Wirasasmita, Yuyun, 1002, *Penemuan kembali dan Revitalisasi Kaidah-Kaidah Koperasi dan Usaha Mencapai Keunggulan Kompetitif*, pada Seminar Sehari Satu Abad Bung Hatta, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Wirasasmita, Yuyun, 1992, *Saling Ketergantungan berbagai landasan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi*, Hasil Seminar, IKOPIN.
- Wisnubroto Soekardi, Aminah Siti Lela, Nitisapto Mulyono, 1983, *Asas-asas Meteorologi Pertanian*, Ghalia Indonesia.
- Yunus, Hadi Sabari, 2001, *Perubahan Pemanfaatan Lahan Di Daerah Pinggiran Kota, Kasus Di Pinggiran Kota Yogyakarta*, Naskah Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari, 2005, *Manajemen Kota*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari, 2007, *Konsep dan Pendekatan Geografi, Khusus Untuk Pengembangan Wilayah, Makalah Dipresentasikan Dalam Rangka Stadion General Fakultas Ilmu Sosial jurusan Geografi UNS*, 29 Nopember Surabaya.

- Yunus, Hadi Sabari, 2008, *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari., 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zahnd, Markus, 2006 *Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*, Kanisius, Jogjakarta

Index

A

Adisasmita 57, 58, 59, 60
Afrika 23, 44, 45, 47
Anderson 72

B

Baswir 2, 54, 118, 120, 124, 129
Belanda 2, 24, 28, 84, 159
BIMAS 28

C

Casselman 18, 19
central place 12
Chapman 6
Christaller 6, 12, 13
Coca-Cola Coke 69
concentric development 7
Cultural-determinism 97

D

Daldjoeni 6, 12
DEKOPIN 77
Disperindagkop 101, 102, 127, 132,
133, 134, 135, 137, 139
Djasmin 78

E

Eppink 97
Eurostat 2001 68

G

G. Kartasapoetra 136

H

Hanel 17, 18
Henehan 72

Herskovits 97

I

ICA 16, 23, 24, 41, 47, 68
ILO 17, 23, 45
Inggris 1, 2, 23, 28, 44, 45, 66
International Cooperative Alliance
16
International Cooperative Identity
Statement (ICIS) 23
International Labor Organization
(ILO) 17
Ismangil 51

J

Jepang 25, 68
Jerman 1, 44

K

kapitalis 4, 66, 67, 68, 69
Keeling 72
Koperasi Pegawai Negeri 35
Koperasi Perumahan Nasional 31
koperasi primer 15, 16, 30, 32, 59,
116
koperasi sekunder 15, 16, 33
KUD 27, 29, 32, 34, 53, 101
KUT 28

L

land-reform 60
Larson 80
Lawless 70
leaf-frog development 7
Leon Garoyan 38, 61
liberal 1, 4, 78, 212

M

Malinowski 97
Melville J. Herskovits 97
Mubyarto 64
multi-purpose 34
Muta'ali 6, 10, 11, 55

O

Orde Baru 26, 27

P

Pandji 2, 31, 32, 33, 39, 40, 53, 56,
58, 99
Partadiredja 51
Paul O. Mohn 38, 61
Paul R. Krugman 78
Perancis 1, 28, 45, 66, 68
Peterson 69
Pitman 71
PT PLN 55
PT Telkom 55

R

Raden Ana Wiraatmaja 24
Rapat Anggota Tahunan 39, 40, 53,
138
resolution XVII 45
revolusi industri 2
Reynolds 70
Rhodesia 44
ribbon development 7
R. McNamara 47
Roberto Barberini 23
Rochdale Principles 1

S

Selo Soemardjan 97
SHU 48, 53, 138, 139, 153, 155, 181,
182, 184
single purpose 34
Sitio 48, 80, 81
Soedargo 64

Soedjono 19

Soetrisno 66, 67, 69, 79
Soewardi 19
sokoguru 4, 19, 30, 57, 76, 118, 177
Superorganic 97
Sven Akheberg 23

T

Tamba 48, 80, 81
Tarigan 6, 8, 9, 62
Teori lokasi VII, 6, 8, 9
Teori Pola Spasial Kota VII, 7
Teori Sebaran Keruangan VII, 6
Transvaal 44

U

Uni Eropa (UE) 67
Upiyan Karanji 98

V

Verordenin op de Cooperative
Vereenigingen 24

W

Widiyanti 2, 25, 26, 27, 31, 32, 33,
40, 44, 53, 56, 58, 99
Wirasmita 19, 20, 178, 180, 181
Wisconsin 71

Y

Yunus 6, 7, 8, 92

RIWAYAT PENULIS

Nama : DR. Hi. Usman Moonti, M.Si.
NIP : 196011201986021001.
Tempat, Tanggal Lahir: Gorontalo, 20 November 1960
Pangkat/Jabatan/Gol. : Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IVc.
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat : Jl. Manggis No. 20 Kelurahan Libuo,
Lingkungan I Kecamatan Duingingi, Kota
Gorontalo
Telpon/HP : 0435-825428/08124456759

Keluarga :

Orang Tua : Ayah : Kadir Moonti (Alm)
Ibu : Hadijah Dai (Alm)
Isteri (Menikah 1987) : Dra. Hj. Rospin Huntoyungo
Anak : 1. Mutia Agustiani Moonti, S.Kep
2. Aditya Moonti.

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Tabongo, tamat 1973
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Batudaa, tamat 1976
3. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Gorontalo, tamat 1980
4. S1 IKIP Negeri Manado, tamat 1985
5. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, Bidang Kajian Utama Ekonomi Koperasi, 2000
6. S3 di Universitas Gadjah Mada, 2013

Pekerjaan:

1. Guru tidak tetap pada SMA Muhammadiyah Manado, 1985-1986
2. Dosen tetap pada Universitas Negeri Gorontalo, 1986 sampai sekarang

3. Dosen tidak tetap pada Universitas Ichsan Gorontalo, 2005 sampai sekarang
4. Dosen tidak tetap pada Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia Gorontalo, tahun 1996-2007

Pengalaman Penelitian:

1. Pembangunan Irigasi Bongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo 1992
2. Keberadaan Nener di Kelurahan Pohe Kecamatan Kota Gorontalo 2005
3. Perhitungan harga pokok produksi dalam meningkatkan pendapatan pada perusahaan Cempaka Jaya Kota Gorontalo 2007
4. Partisipasi anggota pada Koperasi 2008

Penulisan Bahan Ajar:

1. Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan 2005
2. Dasar-Dasar Akuntansi 2006
3. Pengantar Koperasi 2006
4. Manajemen Koperasi 2008

Pembicara pada Seminar/Pelatihan:

1. Pokok-pokok Pikiran PT dalam Merespon Pengelolaan Keuangan Daerah, di Provinsi Gorontalo. 2002
2. CTL Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ekonomi Pada Guru SLTP, di Kabupaten Boalemo. 2002
3. Analisa Rasio Keuangan "Pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik, di Provinsi Gorontalo. 2003
4. Seminar Sehari "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah, di Universitas Negeri Gorontalo. 2006
5. Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNY Ke 46 dengan tema : Membangun Pendidikan Dalam Perpektif Karakter dan Kebangsaan (Aspek Sosial dan Ekonomi dalam Pendidikan Bangsa.) 2010

6. Seminar Internasional In The Internastional Conference On The Future of Urban and Peri-Urban Area Held by the Faculty Geography, Gadjah Mada University (Board Competence, Mananger Enterpreneurship Capability and Participation of Cooperation Member). 2011

Pelatihan Yang Pernah Diikuti:

1. Penataran Dosen Bidang Studi IKIP dan FKIP Universitas Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 1989
2. Pendidikan dan Latihan Bendaharawan Departemen Keuangan RI 1994
3. Tim Penyusun Rencana Operasional Program Kegiatan dan Pembiayaan Penyelenggaraan Program Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D-II PGSD) STKIP Negeri Gorontalo. 1994
4. Pendidikan dan Pelatihan Sepala Jarak Jauh Angkatan II, Oleh LAN. 1995
5. Pelatihan Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 1995
6. Pelatihan Penyusunan GBPP dan SAP, di FIS Universitas Negeri Gorontalo. 2005
7. Pelatihan, Applied Approach (AA) Kementrian Nasional di Universitas Negeri Gorontalo 2006

Seminar Dan Lokakarya:

1. Temu Karya Nasional Koperasi Mahasiswa Se-Indonesia di UGM. 1993
2. Seminar Metodologi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Oleh Program Pascasarjana IKIP Jakarta. 1996
3. Seminar Nasional dalam Rangka Lustrum-IV tahun 1999 Program Pascasarjana Bandung. 1999
4. Seminar Nasional "Perekonomian Indonesia 1999 Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, di Topas Galeria Hotel. 1999
5. Kegiatan Pelatihan Calon Pelatih (TOT) Pembelajaran Kontekstual Oleh Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama di Wisma PU Surabaya. 2001

6. Penyusunan GBPP, SAP, Kontrak Perkuliahan Oleh LP3 dan P3 AI IKIP Negeri Gorontalo. 2002
7. Seminar Sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Se-Provinsi Gorontalo, IKIP Negeri Gorontalo. 2002
8. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa IKIP Negeri Gorontalo. 2003
9. Seminar Sehari ASEAN Free Trade Area (AFTA), di Provinsi Gorontalo. 2003
10. Penataran dan Lokakarya Bimbingan dan Konseling Bagi Penasehat Akademis, dan Petugas Bimbingan Konseling, STKIP Gorontalo. 2004
11. Seminar Meningkatkan Peran Lembaga-lembaga Keuangan Dalam Investasi dan Pembiayaan Pembangunan Daerah. 2005
12. Seminar dan Lokakarya Nasional Pemutakhiran Kurikulum Berbasis Kompetensi Lulusan serta Peningkatan Pembimbingan dan Kepenasehatan Akedemik FIS Universitas Negeri Gorontalo. 2005
13. Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Kulikukulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Guru dan Dosen di Provinsi Gorontalo. 2006
14. Seminar Internasional Tentang As Member of Organizing Committee of the Intertional Confrence " Looking Back, Loking Forward : Gorontalo, Sulawesi and Maluku, di Universitas Negeri Gorontalo. 2006
15. Seminar Pendidikan Dalam Rangka Hardiknas "Masa Depan Guru dan Dosen Dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo. 2006
16. Seminar Nasional Ratifikasi Instrumen HAM Internasional Serta Upaya Pemajuan HAM di Indonesia, di Universitas Negeri Gorontalo. 2007
17. Rapat Kerja Nasional "Meletakkan Dasar-dasar Pengembangan SDM yang Bermoral dalam Berprilaku Ekonomi, di Hotel Sedona Manado. 2008
18. Seminar Nasional Tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, di Hotel Sedona Manado. 2008

19. Workshop Improving of Quality Curriculum Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Manajemen, IMHERE Universitas Negeri Gorontalo. 2008

Sertifikat/Penghargaan:

1. Penghargaan Kader Fungsionalis Golkar Dewan Pimpinan Daerah Kotamadya Gorontalo. 1986
2. Penghargaan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam Menyukkseskan Pemilu. 1987
3. Latihan Prajabatan tingkat III Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Universitas Samratulangi, Manado). 1987
4. Penghargaan atas Partisipasi/Peran Aktif dalam Penataran P-4 Pola 100 Jam Universitas Samratulangi, Manado. 1987
5. Peserta Seminar Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis Ke 24 FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo. 1987
6. Penghargaan Dosen Teladan III Tingkat Fakultas Universitas Samratulangi 1991
7. Pembinaan dan Latihan Satuan Pengamanan (Satpam) STKIP Gorontalo. 1994
8. Upaya Peningkatan Ekspor Daerah Melalui Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) dan Global System Preferences among Developing Countries (GSTP) di Hotel Quality Gorontalo. 2005
9. Penghargaan Sebagai Ketua KOPMA Terbaik. 2006
10. Peserta Pelatihan Penyusunan/Pengisian Borang Akreditasi Internal Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo (BPM-PT) 2007
11. Peserta Workshop Akreditasi Program Studi/Institusi Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta (BPM-PT) Di Universitas Negeri Gorontalo. 2007
12. ESQ Leadership Training di Gedung GSG Universitas Negeri Gorontalo. 2007
13. Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung MPR RI Jakarta. 2007
14. Reformasi Birokrasi Dan Sistem Keuangan Nasional di Audito-

- rium Binakarna, Bidakara, Pancoran, Jakarta. 2007
15. Sertifikasi Dosen Profesional Oleh Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008
16. Peserta Pertemuan Dekan FISIP, FIA, FIS, dan FIKOM Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia di Hotel Savoy Homann. 2008
17. Peserta Pertemuan Dekan FISIP, FIA, FIS, dan FIKOM Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia "Membangun Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Negeri Dalam Meningkatkan SDM Dosen" di Universitas Riau. 2009
18. Peserta Seminar Peningkatan Kualitas Pemahaman Masyarakat Daerah Terhadap Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Di Hotel Quality Gorontalo. 2011
19. Peserta Kegiatan "Training Of Trainers" Bagi Dosen Dan Mahasiswa Melalui Soft Skill Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. 2011
20. Workshop Rencana Nasional Anti Korupsi Di Lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Regional II di Hotel Santosa Villas & Resort, Lombok. 2011
21. Certificate Of Paticipation "Was a Registered Partipant at the 15 th UNESCO-APIED International Conference, di Sultan Hotel Jakarta, Indonesia. 2011
22. International Seminar Utilization of Geospatial Information to Raise Environmental Awareness in Realizing the Nation Character, di Surakarta, Central Java, Indonesia. 2012
23. Seminar Nasional Perubahan Ildim di Indonesia "Manajemen Resiko Bencana Akibat Perubahan Iklim, Oleh Sekolah Pascasarjana UGM. 2012

Jurnal:

1. Jurnal Ilmu Sosial "Peranan Guru Dalam Mengefektifkan Cara Belajar Siswa". 2003
2. Jurnal Ilmu Sosial "Perhitungan Harga Pokok Produksi". 2003
3. Jurnal Inovasi "Pola Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". 2004
4. Jurnal Ilmu Sosial "Pengawasan Intern Dalam Perusahaan". 2005

5. Analisis Pengembangan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Vol. 05, No. 01). 2012
6. Pengembangan Koperasi Indonesia Suatu Orientasi dari Kondisi SosialvBudaya dan Ekonomi dalam rangka Globalisasi (Vol. 09, No. 02). 2012

Penelitian Kelompok:

1. Pembinaan Bagi Pengusaha Konpeksi di Kotamadya Gorontalo Dalam Meningkatkan Produksi Sandang Jadi. 1990
2. Produktivitas Pengolahan Nener dan Hubungannya Dengan Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pohe. 1998

Pengalaman Jabatan:

1. Sekretaris Program Studi Pendidikan Dunia Usaha 1988-1990
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi (4 Bulan) 2001
3. Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial UNG 2002-2006
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG 2006-2010
5. Pembantu Rektor III UNG 2010 -2011

Lain-lain:

1. Pimpinan Proyek 1991-1998
2. Satya Lencana Karya Satya Presiden RI 10 dan 20 Tahun
3. Pengurus Pusat HISPISI (Himpunan Sarjana Pengetahuan Ilmu Sosial Indonesia) 2007-2010
4. Penginisiatif Pembukaan Program Studi Baru di Universitas Negeri Gorontalo (S1 Akuntansi, Manajemen, Hukum, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi)b2007-2009

Gorontalo, 20 Agustus 2014
DR. Hi. Usman Moonti, M.Si

Peran dan keberadaan koperasi di Kota Gorontalo sangat penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Selama krisis ekonomi, koperasi berperan dalam pemberian pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, koperasi di Kota Gorontalo menunjukkan tingkat sebaran yang tidak merata, dan dapat diidentifikasi dengan adanya perbedaan perkembangan dan kemampuan yang sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal, seperti SDM, organisasi dan kelembagaan, manajemen, modal, kegiatan usaha, keanggotaan, teknologi, maupun faktor eksternal, seperti politik, informasi dan komunikasi, perekonomian, hukum dan sosial budaya.

Buku ini berisi jejak rekam perkembangan koperasi dari awal berdirinya sampai masa kini, teori-teori koperasi dari berbagai ahli, ragam bentuk koperasi di Indonesia serta perkembangannya. Fokus pembahasan secara komprehensif dan mendetail, akan di pusatkan pada koperasi di kota Gorontalo, yang mencakup sejarah, sebaran, perkembangan, dan kemampuannya dalam menopang ekonomi kerakyatan di kota Gorontalo. Tentunya akan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan referensi, dan bahan data yang lengkap sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan koperasi kedepan di Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, kearah sistem ekonomi yang lebih tahan terhadap gempuran sistem ekonomi liberal saat ini, dan lebih bermanfaat serta mampu berperan positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

Riwayat Penulis

DR. HI. Usman Moonti, M.Si., lahir di Gorontalo, 20 November 1960, merupakan akademisi yang sangat aktif dalam berbagai penelitian, pembicara berbagai seminar, penulis produktif dan pernah meraih Satya Lencana Karya Satya Presiden RI. Diantara karya tulis yang sudah terbit adalah Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Dasar-Dasar Akuntansi, Pengantar Koperasi, Manajemen Koperasi. Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan buku terbaru yang diterbitkan. Bapak 2 anak yang merupakan suami dari Dra. Hj. Rospin Huntayungo ini meraih Gelar S1 di IKIP Negeri Manado, S2 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, dan meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Sampai sekarang masih aktif mengajar di Universitas Negeri Gorontalo.



Interpena

